

MENEMUKAN
KONSENSUS KEBANGSAAN BARU
NEGARA, PASAR, DAN CITA-CITA Keadilan

MENEMUKAN KONSENSUS KEBANGSAAN BARU

Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan

Faisal Basri

Thee Kian Wee

Handi Risza

A. Prasetyantoko

Indrasari Tjandraningsih

Budi Hikmat

Disunting oleh

Dinna Wisnu & Ihsan Ali-Fauzi

Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD)
Yayasan Wakaf Paramadina
Jakarta, 2013

MENEMUKAN
KONSENSUS KEBANGSAAN BARU:
NEGARA, PASAR, DAN CITA-CITA KEADILAN

Penyunting:
Dinna Wisnu
Ihsan Ali-Fauzi

Penyunting Bahasa: Husni Mubarak
Perancang Sampul & Isi: Irsyad Rafsadi
Foto Sampul: Bryan Reinhart (masterfile)

Cetakan I, Desember 2013

Diterbitkan oleh
Pusat Studi Agama dan Demokrasi
(PUSAD) Yayasan Paramadina
bekerjasama dengan The Ford Foundation

Alamat Penerbit:
Paramadina, Bona Indah Plaza Blok A2 No D12
Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak
Jakarta Selatan 12440
Tel. (021) 765 5253

© PUSAD Paramadina 2013
Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

ISBN: 978-979-772-040-7

Sekapur Sirih

Buku ini bermula dari orasi ilmiah yang disampaikan Faisal Basri dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) VI, di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, pada 11 Desember 2012 lalu. Acara ini adalah acara tahunan Yayasan Wakaf Paramadina. Kali ini yang keenam, setelah di lima tahun sebelumnya kami mengundang Komaruddin Hidayat, Goenawan Mohamad, Ahmad Syafii Maarif, Karlina Supelli, dan R. William Liddle untuk menyampaikan orasi ilmiah yang pertama hingga kelima.

Dari segi “pembukuan” (maksudnya: mengolah bahan awal orasi ilmiah menjadi sebuah buku), ini yang kelima. Sejak empat tahun lalu, kami juga berhasil menerbitkan orasi ilmiah Goenawan Mohamad menjadi buku *Demokrasi dan Kekecewaan* (2009), Syafii Maarif menjadi buku *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (2010), Karlina Supelli menjadi buku *Dari Kosmologi ke Dialog: Mengenal Batas Pengetahuan, Menentang Fanatisme* (2011), dan R. William Liddle menjadi buku *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan* (2012). Selain orasi ilmiah

Goenawan, Syafii, Karlina, dan Liddle, keempat buku itu juga memuat sejumlah komentar orang (dari berbagai latar belakang) atas orasi yang pertama dan tanggapan keempatnya atas para komentator mereka itu. Dengan aksi “pembukuan” seperti ini, kami berharap bahwa berbagai pemikiran yang disampaikan dalam orasi ilmiah yang pertama bisa terus bergulir, memicu perdebatan lebih lanjut, dan terdokumentasikan dengan baik.

Selain untuk mengenang sosok dan pemikiran Cak Nur, begitu biasanya almarhum Nurcholish Madjid dipanggil, NMML juga dimaksudkan untuk merenungkan dan melanjutkan sumbangan pemikirannya bagi bangsa Indonesia dewasa ini dan di masa depan. Kami yakin, inilah cara terbaik mengenang jasa-jasa Car Nur, salah seorang pendiri Yayasan Paramadina. Seraya tak hendak mengultuskannya, kami tetap merasa penting dan berkewajiban untuk mengapresiasi dan melanjutkan pikiran-pikirannya yang relevan untuk kehidupan kita sekarang dan di masa depan.

Bersamaan dengan terbitnya buku ini, kami ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah ikut membantu kelancaran semua urusan. Pertama-tama kami tentu mengucapkan ribuan terimakasih kepada Faisal Basri, yang telah bersedia bukan saja untuk menyampaikan orasi ilmiah, tapi juga untuk menulis makalah dan memberi komentar balik atas para penanggapnya dengan antusias. Mudah-mudahan penerbitan buku ini bisa menambah semangatnya untuk terus optimis melihat masa depan Indonesia.

Kami juga sangat mengapresiasi kesediaan para pemberi komentar untuk meluangkan waktu mereka. Kepada Dinna Wisnu, terimakasih banyak atas kesediaannya mengelola edisi khusus ini, membantu saya. Akhirnya, kami juga berhutang budi kepada kawan-kawan di Ford Foundation dan The Asia Foundation atas antusiasme mereka mendukung acara NMML dan menerbitkan serial buku dalam kerangka ini. Semoga kemenangan menjadi milik kita bersama.***

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD),
Yayasan Wakaf Paramadina
Ihsan Ali-Fauzi

Daftar Isi

i	Sekapur Sirih
v	Daftar Isi
vii	Daftar Peraga
ix	Pengantar Penyunting
1	BAGIAN I: ORASI ILMIAH
3	Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-Cita Keadilan <i>Faisal Basri</i>
33	BAGIAN II: TANGGAPAN-TANGGAPAN
35	Faisal Basri dan Konsensus Kebangsaan Baru: Empat Catatan Tambahan <i>Thee Kian Wie</i>
49	Mencari Titik Temu Negara, Pasar, dan Cita-Cita Keadilan <i>Handi Risza</i>
71	Indonesia dalam Pusaran Perekonomian Global: Respons dan Agenda Domestik <i>A. Prasetyantoko</i>

- 93 Pasar Kerja Fleksibel dan Keadilan bagi
 Kaum Pekerja
 Indrasari Tjandraningsih
- 109 Revitalisasi Demokrasi untuk Menangkal
 Jebakan Kelas Menengah
 Budi Hikmat
- 121 BAGIAN III: TANGGAPAN ATAS
 TANGGAPAN
- 123 Epilog dan Apresiasi atas Tanggapan
 Faisal Basri
- 131 Lampiran-lampiran
- 171 Tentang Penulis

Daftar Peraga

- 133 Peraga 1: “Pertumbuhan PDB di Asean-6 dan
Emerging Markets”
- 134 Peraga 2: “Perbandingan Beberapa Indikator
antara BRICS dan Indonesia, 2010”
- 135 Peraga 3: “TNC’s Top Prospective Host Economies
for 2013-15”
- 136 Peraga 4: “Japanese FDI: Upward Evaluation of
Indonesia”
- 137 Peraga 5: “FDI Flows (Inward) as % of GFCF”
- 138 Peraga 6: “FDI Stocks (Inward) as % of GDP”
- 139 Peraga 7: “Ease of Doing Business”
- 140 Peraga 8: “Indonesia: Governance Indicators”
- 141 Peraga 9: “PERC Perception Corruption Index”
- 142 Peraga 10: “Penduduk Indonesia mirip Jepang
tahun 1950”
- 143 Peraga 11: “Maximizing Opportunities: Indone-
sia’s Remaining Demographic Dividend”
- 144 Peraga 12: “Looking ahead within Indonesia”
- 145 Peraga 13: “GDP per Capita when Demographic
Bonus End”
- 146 Peraga 14: “Population, GDP/capita, and Struc-
ture of GDP”

- 147 Peraga 15: "Alokasi Subsidi pada APBN, 2009-2013"
- 148 Peraga 16: "Transaksi Perdagangan Pangan sudah Defisit"
- 149 Peraga 17: "Global Food Security Index 2012"
- 150 Peraga 18: "Peran Pemerintah Makin Loyo"
- 151 Peraga 19: "Belanja Pemerintah Pusat"
- 152 Peraga 20: "Nisbah Pajak Indonesia"
- 153 Peraga 21: "Tax Ratio in Selected Countries, 2010"
- 154 Peraga 22: "Government Debt to GDP Ratio"
- 155 Peraga 23: "Central Government Gross Debt Ratio"
- 156 Peraga 24: "Wiggle-room Index"
- 157 Peraga 25: Peranan Industri Manufaktur terus Melorot"
- 158 Peraga 26: "Produk Manufaktur pun telah Mengalami defisit"
- 159 Peraga 27: "Pergeseran Kekuatan Ekonomi Dunia"
- 160 Peraga 28: "PwC 2013: Top-20 Economies"
- 161 Peraga 29: "The Future of Archipelago Economy"
- 162 Peraga 30: "Tren Petumbuhan dan BI Rate"
- 163 Peraga 31: "PDB berdasarkan Sektor"
- 164 Peraga 32: "PDB berdasarkan Pengeluaran Pemerintah"
- 165 Peraga 33: "Komposisi Impor"
- 166 Peraga 34: "IHSG dan Indeks Agribisnis dan Pertambangan"
- 167 Peraga 35: "Perubahan Indeks"
- 168 Peraga 36: "Perkembangan Pasar Modal dan Valuta Selama Tahun 2013"
- 169 Peraga 37: "Proyeksi Defisit Neraca Minyak Indonesia"

Pengantar Penyunting

Indonesia sedang berbenah diri. Dalam konteks itu, kita tentu kenal sejumlah pemikir dan penggiat kegiatan sosial kemasyarakatan yang rela untuk terus memutar otak dan saling berdialog untuk mencari rumusan yang tepat dalam membenahi Indonesia di segala lini.

Salah satu tokoh yang menonjol adalah Faisal Basri, ekonom yang terkenal tajam dalam analisa dan aktif mewujudkan idealismenya dalam sejumlah kegiatan kemasyarakatan di segenap penjuru negeri. Sebagai akademisi, Faisal termasuk yang gigih mendesakkan ide-ide segar. Dia juga bersemangat “turun lapangan”, termasuk bergelut dalam politik praktis dengan sempat bergabung dalam sebuah partai politik yang sempat digugu kaum muda di awal pembentukannya tahun 1999, bergandengan tangan dengan sejumlah tokoh muda di sejumlah propinsi untuk mendirikan gerakan Pergerakan

Indonesia, menggawangi kebijakan-kebijakan ekonomi di KADIN dan di Dewan Ekonomi Nasional, menjadi anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha serta, pada tahun 2012, terjun sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dia juga tercatat aktif dalam sejumlah kegiatan organisasi nirlaba. Yang paling penting, beliau tidak pernah lupa untuk berbagi ilmu pada kaum muda dengan setia menjadi dosen di sejumlah Universitas di tanah air, termasuk di Universitas Paramadina.

Semua unsur di atas tampak kuat dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) VI yang disampaikan Faisal Basri tahun lalu dan kemudian menjadi dasar penerbitan buku ini. Bicara tentang pembenahan Indonesia, Faisal paham betul potensi Indonesia di sektor ekonomi makro, termasuk ragam indikator yang menempatkan Indonesia untuk masuk dalam radar negara dan perusahaan asing sebagai salah satu perekonomian yang paling prospektif. Namun dia memberi sejumlah catatan yang patut diwaspadai terkait keroposnya fundamental pertumbuhan ekonomi yang kini masih dinikmati Indonesia. Secara khusus Faisal mengangkat faktor-faktor struktural, kelembagaan dan pilihan politik yang menyebabkan lemahnya nilai tukar rupiah dibandingkan mata uang negara-negara lain, suburnya kegiatan memburu rente, dan buruknya penyusunan prioritas negara dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia.

Faisal Basri mengajak pembaca untuk berdialog tentang cita-cita bangsa Indonesia dan konsekuensi yang perlu ditanggung terkait penyusunan langkah tata kelola pembangunan, termasuk soal penyusunan

APBN, pemberian subsidi, belanja pemerintah untuk jaminan sosial dan pembukaan lapangan kerja. Sebagai ekonom, titik awal dialognya memang berupa indikator-indikator ekonomi, tetapi ia sebenarnya membuka diri untuk masuk ke dalam dialog yang lebih mendalam terkait pencarian jalan keluar dari kemelut yang selama ini melilit pemerintah Indonesia karena alasan keterbatasan dana APBN, risiko bila menambah utang, cara menambah pajak, bahkan cara-cara memanfaatkan peluang pembangunan yang ia katakan sangat terbatas dari segi jangka waktu.

Faisal mengajak Indonesia untuk bergegas di hadapan ekonomi pasar global yang beringas. Dia mengingatkan perlunya bangsa Indonesia mendesain ulang skenario pertumbuhan ekonominya. Dia ingin agar siapa pun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tidak kehilangan jiwa sosial, tidak mati rasa ketika berhadapan dengan ketimpangan sosial yang akut. Di sanalah ide Faisal berpotongan dengan pemikiran Nurcholish Madjid yang menegaskan pentingnya roh keadilan dalam transformasi lembaga-lembaga politik maupun ekonomi.

Seperti yang sudah menjadi tradisi setiap tahun, NMML juga mengundang sejumlah kalangan untuk mendialogkan gagasan-gagasan segar Faisal di atas. Karena titik pemikiran Faisal diawali dari sudut pandang seorang ekonom, kami memutuskan untuk mengundang tanggapan pemikiran dari sejumlah pemikir lain yang dalam kesehariannya juga bergulat dengan isu-isu ekonomi. Harapan kami adalah agar dialog seputar isu kebangsaan dan cita-cita keadilan yang digagas oleh Faisal dapat ditanggapi

dengan lebih menyeluruh dan mengena pada isu-isu sehari-hari.

Kami beruntung bisa mengumpulkan tanggapan pemikiran dari berbagai spektrum: Thee Kian Wie, pakar sejarah ekonomi yang memiliki pengalaman panjang memantau upaya pencapaian cita-cita Indonesia; Handi Risza, seorang ekonom bidang bisnis keuangan syariah; Agustinus Prasetyantoko, ekonom dengan keahlian khusus di bidang ekonomi dan bisnis; Indrasari Tjandraningsih, peneliti dan pegiat bidang buruh dan ketenagakerjaan; serta Budi Hikmat, kepala ekonom dan Director for Investor Relations di PT Bahana TCW Investment Management.

Thee Kian Wie menyoroti kelemahan Indonesia dalam mencegah membesarnya kegiatan korupsi yang pada akhirnya mengorbankan agenda pengentasan kemiskinan. Thee Kian Wie mengajak pelaku kebijakan untuk memperbaiki segala aspek pendidikan di tanah air, termasuk dengan melakukan pemerataan kesempatan menjalani pendidikan tinggi, menanggulangi ketergantungan Indonesia pada sumber daya alam, memperkuat sektor industri manufaktur dan menjaga lingkungan hidup demi generasi mendatang.

Agustinus Prasetyantoko mengajak kita melihat keterlibatan Indonesia dalam forum-forum kerjasama regional maupun global. Ia terdorong untuk merespon poin dialog soal pencapaian keadilan dalam dinamika perekonomian berbasis pasar global, yakni dengan menyoroti pusaran perekonomian global yang mengeroposi daya saing suatu negara. Intervensi ekonomi adalah solusi yang disarankan, asalkan tidak dilakukan bersamaan dengan pemburuan rente.

Handi Risza membantu kita melihat dialog seputar kelembagaan ekonomi yang sejalan dengan aturan main ekonomi pasar tetapi mampu memanfaatkan pasar untuk menjamin redistribusi kekayaan pada segmen masyarakat yang lebih luas. Ia menyoroti sejumlah momentum yang terabaikan oleh pengambil kebijakan dan problem ketimpangan struktural yang menjerat relasi antar-aktor.

Sementara itu, Indrasari Tjandraningsih membantu kita melihat lebih dekat pada makna keadilan bagi kaum pekerja, khususnya terkait tren *outsourcing* yang meluas praktiknya di Indonesia. Sisi gelap di bidang ketenagakerjaan memang layak mendapat perhatian karena dimensi ini kerap luput dari perhatian ekonom *mainstream*, sehingga solusi yang ditawarkan kerap “jauh panggang dari api”.

Akhirnya, di sisi lain, Budi Hikmat mengingatkan kita pada kerentanan yang sangat tinggi dari Indonesia di bidang pasar modal. Sebagai praktisi, Budi Hikmat mengindikasikan persoalan yang sangat serius terkait kemampuan Indonesia dalam merespon tekanan-tekanan pelaku pasar modal yang ia sebut bengis dan tak pandang bulu. Budi Hikmat mengajak pembaca untuk kembali ingat pada komitmen reformasi yang terkendala implementasinya dan sekarang beresiko menjerat Indonesia dalam jebakan kelompok menengah.

Ketika menanggapi para penanggapnya di atas, dalam epilog buku ini, Faisal Basri kembali menegaskan relevansi gagasan-gagasannya yang disampaikan setahun yang lalu. Dia menulis: “Tidak perlu waktu terlalu lama menunggu berbagai praktik baru dari perpaduan antara *extractive economic institutions* dan

extractive political institutions. Tak sampai setahun dari Nurcholish Madjid Memorial Lecture VI, terbongkar praktik pemburuan rente daging sapi yang melibatkan ketua umum partai politik.” Dan seperti mengulangi apa yang dikatakannya tahun lalu, dia menutup epilognya dengan kembali berujar kepada kaum muda: “Sudah saatnya kaum muda lebih aktif menyampaikan pandangan-pandangan subyektifnya tentang masa depan negeri tercinta dan mengambil inisiatif untuk menjawab tantangan masa depan yang bakal jauh lebih berat. Tuntutlah hak generasi mendatang. Jangan sampai sumber daya nasional kian terkikis oleh egoisme dan hawa nafsu negeri tua yang mengeksploitasi kekayaan nasional demi menutupi kekasalahan-kesalahan mereka di masa lalu.”

Dengan dorongan kuat dari Faisal yang pertama kali menyampaikan NMML, mudah-mudahan dialog yang disajikan dalam buku ini bisa memancing perdebatan dan dialog lebih luas dan lanjut di masa-masa mendatang. Jika itu terjadi, NMML dan penerbitan buku ini sudah mencapai apa yang dikehendaki sejak awal.***

Dinna Wisnu & Ihsan Ali-Fauzi
Desember 2013

BAGIAN I: ORASI ILMIAH

Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru Negara, Pasar, dan Cita-Cita Keadilan

FAISAL BASRI

Titik Balik

Kinerja perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir mengundang decak kagum banyak kalangan luar negeri. Terlepas dari berbagai persoalan yang belum kunjung terselesaikan dan masalah-masalah baru yang terus bermunculan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang selama 2009-2013 menunjukkan kecenderungan (*trend*) pertumbuhan ekonomi yang tidak menurun di tengah terpaan krisis ekonomi global yang belum berkesudahan sejak 2008.¹ Sangat banyak perkembangan positif hadir bersamaan setelah sekitar satu dasawarsa berangsur

¹ Lihat Peraga 1: “Pertumbuhan PDB di Asean-6 dan emerging markets”, di bagian lampiran buku ini, hal. 133.

bangkit dari krisis ekonomi yang sangat parah pada tahun 1998. Perubahan-perubahan mendasar dalam perkembangan politik, sosial, dan demografis turut mengiringi perubahan sosok perekonomian.

Titik balik perekonomian Indonesia terjadi pada tahun 2009. Tatkala hampir semua negara terjerembab ke lembah resesi,² Indonesia bersama dengan China dan India menikmati pertumbuhan ekonomi positif. Bahkan Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,6 persen. Padahal, hampir semua lembaga internasional memperkirakan tahun itu pertumbuhan Indonesia mendekati nol persen atau bahkan negatif. Di antaranya adalah IMF (International Monetary Fund) yang pada April 2009 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,5 persen pada tahun 2009. Dua bulan kemudian, tepatnya 5 Juni 2009, IMF melakukan koreksi ke atas menjadi 3-4 persen:

*Looking forward, we have raised our projection of economic growth for 2009 to 3-4 percent (from 2.5%) with inflation expected to decline to about 5 percent by the end of the year.*³

² Pada tahun 2009 perekonomian dunia mengalami resesi dengan kontraksi sebesar 0,7 persen. Perekonomian negara-negara maju mengalami kontraksi sebesar 3,7 persen.

³ Diunduh dari <http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09201.htm>. Proyeksi International Monetary Fund (IMF) tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir selalu lebih rendah dari realisasinya. Terjemahan Indonesia: "Ke depan, kami menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2009 menjadi sekitar 3-4 persen (dari sebelumnya 2.5%) dengan inflasi diharapkan menurun menjadi sekitar 5 persen di akhir tahun." (ed.)

Lebih parah lagi adalah majalah terkemuka, *The Economist*. Prediksi majalah ini – yang diracik oleh Economist Intelligence Unit – pada edisi 30 April 2009, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen. Namun, sebulan kemudian perkiraan berbalik menjadi ekspansi sebesar 2,4 persen.

*Despite the weakness of the global economy, the Economist Intelligence Unit has raised its forecast for Indonesian economic growth. We now expect real GDP to expand by 2.4% this year, compared with a contraction of 1.4% in our previous forecast. We expect growth to accelerate to 3.2% in 2010, up from 0.5% previously.*⁴

Sejak tahun 2009 itulah perekonomian Indonesia terbang dengan dua mesin. Jika sebelumnya hanya mesin konsumsi masyarakat (*private consumption*) yang menderu kencang, pada tahun 2009 mesin investasi mulai menggeliat, yang ditandai oleh sumbangsih pembentukan modal tetap bruto (*gross fixed capital formation*) terhadap produk domestik bruto (PDB) menembus 30 persen. Indonesia hingga kini bertengger sendirian di antara negara-negara Asean-5 dengan pencapaian tersebut. Jika dibandingkan dengan negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China,

⁴ *Economist.com*, May 22nd 2009 from the Economist Intelligence Unit ViewsWire. Terjemahan Indonesia: “Di tengah lemahnya perekonomian global, Economist Intelligence Unit menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami memperkirakan PDB riil akan mengalami ekspansi sebesar 2.4% tahun ini, dari yang sebelumnya diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 1.4%. Pertumbuhan diperkirakan meningkat menjadi 3.2% pada 2010, naik dari yang sebelumnya 0.5%.” (ed.)

dan Afrika Selatan), Indonesia sebetulnya unggul dalam beberapa hal. Posisi Indonesia bisa dikatakan lebih kompatibel dengan BRIC dibandingkan dengan Afrika Selatan.⁵

Selain didorong oleh pertumbuhan kredit investasi yang rata-rata mencapai di atas 30 persen, pembentukan modal juga ditopang oleh penanaman modal asing yang kian deras. Indonesia sudah bertengger terus di layar radar investor asing sebagaimana tampak dari data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Di dalam *World Investment Report* terbaru yang diterbitkan oleh lembaga di bawah naungan PBB ini, posisi Indonesia berada di urutan keempat dalam senarai *top prospective economies* di mata perusahaan-perusahaan transnasional untuk tahun 2013-2015.⁶ Posisi ini persis sama dengan edisi tahun lalu dan meningkat dua peringkat dibandingkan laporan tahun 2011.⁷ Sejalan dengan publikasi UNCTAD, A.T. Kearney FDI Confidence Index pun menunjukkan posisi Indonesia yang meningkat pesat dari urutan ke-19 pada tahun 2011 menjadi urutan ke-9 pada tahun 2012.⁸ Penilaian senada

⁵ Lihat Peraga 2: "Perbandingan beberapa indikator antara BRICS dan Indonesia, 2010", di bagian lampiran buku ini, hal. 134.

⁶ Untuk pertama kalinya, Indonesia masuk ke dalam daftar 30 besar penerima penanaman modal asing pada tahun 2012, tepatnya di urutan ke-17. Lihat United Nations Conference on Trade and Development, *World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development*, New York and Geneva, 2013: 3 dan 22.

⁷ Lihat Peraga 3: "TNC's top prospective host economies for 2013-15", di bagian lampiran buku ini, hal. 135.

⁸ Lihat <http://www.atkearney.com/research-studies/foreign-direct-investment-confidence-index>. Jika negara-negara maju

terlihat pula pada hasil survei yang dilakukan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pada tahun yang sama, yang menaikkan posisi Indonesia ke urutan ketiga sebagai negara yang menjanjikan (*promising*) bagi perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Posisi Indonesia sempat terpuruk pada urutan kesembilan pada tahun 2006.⁹

Pada tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an Indonesia sempat cukup memiliki daya tarik bagi investasi asing, terutama dari Jepang. Meskipun demikian, Indonesia tak pernah mengandalkan pada investasi asing sebagai sumber utama pembentukan modal. Relatif kecilnya peranan investasi asing ini juga terlihat dari nisbah akumulasi penanaman modal asing terhadap PDB. Selama Orde Baru, rezim lebih nyaman mengandalkan pada utang luar negeri ketimbang penanaman modal asing.

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan peran investasi asing. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata Asia dan Amerika Selatan, tetap saja peranan investasi asing di Indonesia masih relatif kecil. Yang cukup menarik adalah fakta besarnya sumbangan investasi asing di dalam perekonomian tidak terkait dengan ideologi negara. Banyak negara komunis dan negara sosialis yang peranan penana-

yang berada di atas peringkat Indonesia dikeluarkan, maka peringkat Indonesia mirip dengan peringkat versi UNCTAD.

⁹ Japan Bank for International Cooperation, "Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies," berbagai tahun. Lihat Peraga 4: "Japanese FDI: upward evaluation of Indonesia", di bagian lampiran buku ini, hal. 136.

man modal asingnya lebih besar atau bahkan jauh lebih besar ketimbang Indonesia.¹⁰

Arus investasi domestik dan investasi asing yang semakin deras sudah barang tentu ditopang oleh kestabilan makroekonomi yang semakin baik dan berkelanjutan. Laju inflasi yang terus menurun mendekati rata-rata Asean-5 dan China yang diiringi oleh penurunan suku bunga serta volatilitas nilai tukar rupiah yang terjaga merupakan prasyarat penting atau prasyarat perlu (*necessary conditions*). Memang terjadi penurunan nilai tukar rupiah sejak September 2011. Penyebab kemerosotan nilai tukar rupiah tidak disebabkan oleh faktor-faktor makroekonomi yang bersifat struktural sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998 dan 2009 seperti pelarian modal ke luar negeri ataupun pelonjakan impor secara umum. Faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab ialah meroketnya impor bahan baku minyak. Jika kondisi makroekonomi memburuk secara struktural, nilai rupiah dan indeks harga saham biasanya akan bergerak searah. Namun, terbukti bahwa penurunan nilai tukar rupiah belakangan ini tak diiringi oleh kemerosotan indeks harga saham.¹¹

Rintangan dan Daya Tarik

Iklim investasi di Indonesia sebetulnya tak mengalami perbaikan berarti. Nilai kemudahan berbisnis

¹⁰ Lihat Peraga 5: "FDI flows (inward) as % of GFCF" dan Peraga 6: "FDI stocks (inward) as % of GDP", di bagian lampiran buku ini, hal. 137 & 138.

¹¹ Selama bulan Juni 2013 indeks harga saham Indonesia memang mengalami kemerosotan cukup tajam, namun perhitungan *year to date* masih positif, sedangkan hampir semua negara *emerging markets* mengalami pertumbuhan negatif.

Indonesia versi International Finance Corporation (IFC) – lembaga keuangan di bawah Bank Dunia – justru mengalami penurunan pada tahun 2012.¹² Dengan Vietnam pun kita sudah kalah, apatah lagi dengan Malaysia dan Thailand. Patut dicatat bahwa peranan perusahaan-perusahaan asing cukup besar dalam meningkatkan ekspor China. Pada awal tahun 2000-an sekitar 40 persen ekspor China berasal dari perusahaan-perusahaan asing.

Dalam hal *governance* Indonesia pun masih tergolong ketinggalan. Bahkan dua dari enam unsur *governance*, yaitu *rule of law* dan *regulatory quality*, Indonesia mengalami pemburukan. Untuk pemberantasan korupsi (*control of corruption*), kinerja kita belum juga menunjukkan perubahan berarti.¹³ Dari 16 negara Asia Pasifik yang disurvei oleh PERC (Political and Economic Risk Consultancy) yang berbasis di Hong Kong, Indonesia hampir selalu berada pada posisi pertama atau kedua negara paling korup selama 2009-2013.¹⁴ Unsur *government effectiveness* masih memprihatinkan dengan angka di bawah 50. Bandingkan dengan Singapura yang nyaris mencapai angka maksimum 100. Di antara negara-negara Asean, posisi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Indochina.¹⁵

Lantas, apa yang membuat investasi semakin deras dan kegiatan usaha kian marak? Tak pelak

¹² Lihat Peraga 7: "Ease of doing business", hal. 139.

¹³ Lihat Peraga 8 "Indonesia: governance indicators", hal. 140.

¹⁴ Lihat Peraga 9: "PERC perception corruption index", hal. 141.

¹⁵ Political and Economic Risk Consultancy, Ltd, "Asian Intelligence," Issue #871, March 20, 2013: 6.

lagi, para investor tak hanya melihat perkembangan jangka pendek, melainkan lebih memperhitungkan potensi jangka menengah dan jangka panjang Indonesia yang geliatnya mulai menyembul.

Indonesia sedang berada pada fase *demographic dividend* dengan proporsi penduduk usia kerja tertinggi sepanjang sejarah.¹⁶ Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga tahun 2030. Dengan *dependency ratio* yang terus menurun dan akan mencapai titik terendah pada sekitar tahun 2030, jumlah tenaga kerja produktif tersedia dalam jumlah yang relatif besar.¹⁷ Kelompok usia muda ini memiliki potensi tabungan yang tinggi, juga sekaligus menjadi pendorong mesin konsumsi. Merekalah yang mulai merangsek ke strata menengah yang dari waktu ke waktu menunjukkan akselerasi. Dewasa ini memang mayoritas strata menengah masih berada di kelompok menengah-bawah. Pada tahun 2015, strata menengah-tengah akan maju lebih cepat dan pada tahun 2020 proporsinya paling besar. Strata menengah-atas baru akan dominan pada tahun 2025.¹⁸ Perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional telah mengantisipasi kecenderungan tersebut dengan membangun dan mengembangkan basis produksinya di Indonesia.

Pertanyaan paling mendasar adalah apakah kita sudah berada di jalur yang akan membawa rakyat Indonesia mendekat ke cita-cita kemerdekaan? Walaupun dengan intensitas yang lebih rendah, ke-

¹⁶ Lihat Peraga 10: "Penduduk Indonesia mirip Jepang tahun 1950", di bagian lampiran buku ini, hal. 142.

¹⁷ Lihat Peraga 11: "Maximizing opportunities: Indonesia's remaining demographic dividend", hal. 143.

¹⁸ Lihat Peraga 12: "Looking ahead within Indonesia", hal. 144.

adaan tahun 1980-an hingga krisis menjelang ada miripnya dengan keadaan sekarang. Investor asing marak, kredit perbankan tumbuh pesat, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 8 persen, industri manufaktur tumbuh dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran menurun, dan kestabilan makroekonomi terjaga. Pujian juga tak henti-henti dikumandangkan oleh lembaga-lembaga donor. Tak kurang Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang dijuluki *Asian miracle*.

Berpulang pada diri kita bagaimana bisa memanfaatkan momentum emas untuk lepas landas menuju negara maju yang menyejahterakan rakyatnya dan berkeadilan. Jika kita gagal memanfaatkan momentum ini, boleh jadi kita bisa menapaki akselerasi pembangunan sehingga tak sempat masuk ke dalam *middle-income trap*.

Masalah Mendasar

Harus diakui, di tengah kemajuan yang kita alami belakangan ini, tak sedikit pula perubahan mendasar yang menimbulkan keprihatinan mendalam dan kemunduran, seperti: terkikisnya kedaulatan pangan, energi, dan finansial. Juga terjadi pelemahan sektor industri manufaktur sebagaimana ditandai oleh penurunan sumbangannya dalam PDB dan defisit perdagangan sektor ini sejak tahun 2008. Wajah ketenagakerjaan dan kemiskinan juga masih tetap suram. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketimpangan, baik ketimpangan pendapatan, ketimpangan antarsektor, maupun ketimpangan antardaerah.

Kemampuan untuk tumbuh dengan rata-rata

6 persen setahun di tengah gejolak perekonomian dunia yang terus berlangsung sebetulnya jauh dari memadai untuk membawa bangsa kita bersejajaran dengan negara-negara tetangga di Asia Timur. Dengan hanya bertumbuh 6 persen setahun, pada tahun 2030, kala kita memasuki fase awal *aging population*, pendapatan per kapita Indonesia berdasarkan nilai konstan dollar AS tahun 2000 baru mencapai 3.583 dollar AS. Negara-negara Asia Timur Jauh telah lebih sejahtera kala mereka memasuki fase *aging*. Seandainya pun kita mampu memacu diri tumbuh dengan 10 persen, tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk Indonesia pada tahun 2030 masih tetap jauh lebih rendah.¹⁹

Kita sebetulnya sudah tertinggal jauh. Oleh karena itu, tak ada pilihan lain kecuali bergegas, memacu diri lebih cepat lagi. Untuk itu kita harus bercermin diri. Salah satu yang perlu dikaji ulang adalah tentang peran pemerintah/negara. Setelah krisis ekonomi tahun 1998 muncul indikasi kuat bahwa kehadiran negara justru memudar. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh peran negara yang eksekutif selama Orde Baru yang ditandai oleh peran negara di hampir segala bidang menimbulkan *abuse of power* sehingga menyuburkan praktik pemburuan rente yang masif, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta korupsi sistemik dan terorganisir. Selain itu, otoriterinisme Orde Baru menumbuhkan konglomerasi dan penguasaan kegiatan ekonomi dari hulu hingga hilir.

¹⁹ Lihat Peraga 13: "GDP per capita when demographic bonus end", di bagian lampiran buku ini, hal. 145.

Setelah Soeharto jatuh, pendulum bergerak ke ekstrem yang berkebalikan. Negara beringsut mundur dan pasar diberikan keleluasaan yang kian besar. Sayangnya partai-partai dan penguasa abai untuk membangun jaring-jaring pengaman pasar dan menempatkan negara pada peranan yang sepatutnya. Di kalangan masyarakat luas dan cerdik cendekia pun terbentuk semacam kubu yang pro-pasar dan pro-negara. Pasar dan negara dipertentangkan. Padahal pasar dan negara memiliki peran masing-masing dan harus kian diperkokoh secara bersamaan.

Mari kita mulai dari peran negara sebagai pelayan rakyat dalam artian luas. Sumbangsih konsumsi pemerintah sangat kecil di dalam produk domestik bruto, yaitu sekitar 9 persen, yang berarti tak sampai separuh dari Amerika Serikat yang notabene adalah kiblat kapitalisme yang cenderung meminimalisasikan peran negara. Perbandingan dengan negara-negara lain semakin menunjukkan betapa kecil konsumsi pemerintah kita. Tak hanya kecil, tetapi juga pertumbuhannya berfluktuasi tajam dengan pertumbuhan yang terkadang sangat rendah, bahkan negatif. Dari data berbagai negara menunjukkan bahwa tak ada kaitan erat antara ideologi suatu negara dengan besarnya konsumsi pemerintah. Jadi, rendahnya konsumsi pemerintah di Indonesia lebih disebabkan oleh pengabaian atau setidaknya kurang peduli akan pentingnya peran negara untuk melayani rakyatnya.²⁰

Sangat tidak bisa ditoleransikan jika pada tahun

²⁰ Lihat Peraga 14: "Population, GDP/capita, and structure of GDP", hal. 146.

anggaran 2013 subsidi untuk benih hanya sebesar 0,1 triliun rupiah atau 0,04 persen dari keseluruhan subsidi, sedangkan untuk subsidi BBM mencapai Rp 240 triliun atau sekitar duapertiga dari subsidi total.²¹ Perhatian yang sangat minim terhadap sektor pertanian – di tengah transaksi perdagangan pangan yang sudah defisit sejak 2007²² dan mengingat pula sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar – membuat persoalan pangan semakin rentan. Indeks *food security* kita tak sampai di angka 50 dari angka tertinggi 100. Padahal, kemandirian pangan adalah salah satu pilar penting untuk menjadi negara mandiri, selain kemandirian energi dan kemandirian keuangan.²³

Peran negara yang tak kalah penting adalah menyediakan barang dan jasa publik atau kuasi-publik. Peran ini tak bisa begitu saja diserahkan kepada swasta. Selama kurun waktu 2008-2011 peranan investasi publik hanya sekitar 3 persen PDB, jauh lebih rendah ketimbang di India, Korea, Malaysia, dan Thailand.²⁴ Dengan investasi publik yang relatif rendah ini, akumulasi modal publik tak akan bertambah secara berarti untuk bisa memenuhi tuntutan perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Pertambahan investasi publik boleh jadi sudah lebih kecil ketimbang tingkat penyusutan atau depresiasi stok modal publik, sehingga akumulasi stok modal publik merosot.

²¹ Lihat Peraga 15: “Alokasi subsidi pada APBN, 2009-2013”, di bagian lampiran buku ini, hal. 147.

²² Lihat Peraga 16: “Transaksi perdagangan pangan,” hal. 148.

²³ Lihat Peraga 17: “Global food security index 2012”, hal. 149.

²⁴ Lihat Peraga 18: “Peran pemerintah makin loyo”, hal. 150.

Dengan volume anggaran negara yang masih relatif rendah, sepatutnya prioritas diberikan secara lebih tajam, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Namun, alih-alih meningkatkan alokasi dana untuk belanja sosial, justru dana APBN makin mengucur deras untuk belanja tak produktif. Sungguh sangat ironis jika pengeluaran paling besar adalah untuk subsidi BBM. Sebaliknya, alokasi untuk belanja sosial justru paling kecil. Belanja modal yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas perekonomian juga lebih rendah ketimbang subsidi energi yang cenderung bersifat konsumtif.²⁵

Seharusnya kita malu mengklaim ber-Pancasila dan pada saat yang sama mencerca kapitalisme tetapi sangat kikir dalam memberdayakan rakyatnya, membiarkan rakyatnya berjibaku di medan laga yang bernama pasar dan persaingan bebas tanpa jaring-jaring pengaman yang memadai. Tengok Amerika Serikat. Pada tahun anggaran 2012, lebih 80 persen anggaran pemerintah federal dialokasikan untuk *income security*, *social security*, dan *medicare*. China sekalipun kalah dibandingkan dengan Amerika Serikat dalam soal belanja sosial ini. Namun, China jauh lebih peduli ketimbang Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah China memacu belanja sosial. Untuk *social security and employment spending* saja besarnya sudah hampir seperlima dari keseluruhan anggaran pemerintah pusat. Kontras sekali dengan Indonesia yang pada tahun anggaran 2012 hanya mengalokasikan 5,1 persen untuk belanja sosial.

Kita masih jauh dari cita-cita kemerdekaan.

²⁵ Lihat Peraga 19: "Belanja Pemerintah pusat", hal. 151.

Peta jalan untuk mewujudkan cita-cita tersebut tak kunjung jelas. Bahkan 68 tahun belum juga cukup untuk sekadar memilih kendaraan yang hendak kita tumpangi menuju cita-cita kemerdekaan. Kita sibuk bersilang-sengketa dengan pijakan yang rapuh, sehingga kerap pendulum bergerak ekstrem, bukannya menuju konvergensi. Di dalam relung gelap, para pemimpin kerap terbentur pada bebatuan besar dan terantuk-antuk menapaki titian.

Mengingat volume APBN kita masih relatif kecil, maka tinggal ada dua pilihan untuk memperkuat peran negara. Pertama adalah dengan meningkatkan pajak. Ruang gerak untuk meningkatkan pajak masih cukup besar karena nisbah pajak (*tax ratio*) kita masih rendah selain juga berfluktuasi, yang menunjukkan perpajakan kita masih rapuh.²⁶ Ruang gerak perpajakan masih terbuka untuk kelompok kaya dan korporasi. Sepatutnya intensifikasi perpajakan untuk sementara waktu tidak bersifat *broad base* mengingat mayoritas penduduk kita berusia muda dan produktif dan mayoritas perusahaan tergolong usaha kecil dan menengah (UKM).²⁷

Maka pilihan kedua lebih logis, yaitu dengan lebih banyak berutang. Bukan utang multilateral maupun

²⁶ Lihat Peraga 20: "Nisbah pajak Indonesia" dan Peraga 21: "Tax ratio in selected countries, 2010", di bagian lampiran buku ini, hal. 152 & 153.

²⁷ Ternyata harapan ini tak menjadi kenyataan. Justru pemerintah menerapkan pajak terhadap UKM mulai 1 Juli 2013. Lebih ironis lagi, pajak didasarkan pada omzet, bukan laba. Walaupun tarif nominal pajaknya hanya 1 persen, nyata-nyata ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena kalau rugi sekalipun, UKM tetap harus membayar pajak. Hal serupa tak bakal dialami oleh usaha besar.

bilateral, tetapi utang domestik dengan mengeluarkan lebih banyak obligasi negara. Masa sekaranglah yang paling tepat untuk meningkatkan utang, bukan justru sebaliknya bangga dengan nisbah utang terhadap PDB yang terus meluncur turun sehingga menjadi negara yang paling kecil tingkat utangnya di dunia.²⁸ Ditambah lagi ongkos berutang semakin murah karena empat dari lima agensi pemeringkat (*rating agency*) telah memasukkan Indonesia di aras *investment grade*.

Utang, jika digunakan secara benar akan menambah darah bagi perekonomian. Surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagian besar dibeli oleh rakyatnya sendiri yang mayoritas berusia muda. Rakyat membeli surat utang dari akumulasi iuran jaminan sosial, sehingga peredaran darah di dalam perekonomian kian lancar dan bisa menyentuh seluruh organ perekonomian.

Tanpa peningkatan pajak dan atau utang, kita akan kehilangan momentum untuk pindah gigi ke yang lebih tinggi (*shifting into the higher gear*). *Window of opportunity* hanya terbuka sekali dalam perjalanan suatu negara. Tahun 2030 sudah tidak lama lagi. Sungguh kita masih memiliki ruang gerak fiskal yang lebar, bahkan amat lebar, untuk mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Keleluasaan fiskal ini terlihat dari Wiggle-room index Indonesia yang sangat rendah, terendah kedua setelah Saudi Arabia.²⁹

²⁸ Lihat Peraga 22: "Government debt to GDP ratio" dan Peraga 23: "Central government gross debt ratio", di bagian lampiran buku ini, hal. 154 & 155.

²⁹ Lihat Peraga 24: "Wiggle-room index", di bagian lampiran buku ini, hal. 156.

Pasar tidak memiliki desain untuk menegakkan keadilan. Pasar sudah terbukti semakin beringas, menghadirkan sosok ketimpangan yang kian mennganga. Persoalan ketimpangan sudah menjadi isu yang mendunia. Ketimpangan tak sekadar merupakan persoalan negara-negara berkembang tetapi juga sudah merasuk dalam di negara-negara maju. Mekanisme pasar bebaslah yang kian disadari sebagai biang keladi ketimpangan yang memburuk.

Persoalan ketimpangan sudah semakin pelik dan multidimensional. Ketimpangan lebih rumit ketimbang sekadar berkaitan dengan kemiskinan, struktur gaji, kondisi kehidupan keluarga, dan kelangkaan infrastruktur di pedesaan (Garbraith, 2012: 5-7). Oleh karena itu ketimpangan bukan sekadar monopoli kajian pembangunan ekonomi, melainkan lebih karena desain perekonomian secara keseluruhan, desain sektor keuangan, hingga ke peran negara dalam menyikapi krisis finansial global.

Resep Neoklasik sudah terbukti gagal menjawab persoalan ketimpangan. Amartya Sen sudah wanti-wanti tentang kegagalan intelektual karena kehilangan jiwa sosial. Jika Amerika Serikat yang sudah memiliki sistem jaminan sosial saja menghadapi persoalan ketimpangan yang akut, Indonesia boleh jadi menghadapi masalah yang tak kalah seriusnya.

Setelah krisis ekonomi tahun 1998, lebih khusus lagi sejak tahun 2006, ketimpangan di Indonesia bertambah buruk. Indeks Gini, yang mengukur derajat ketimpangan, pada tahun 2011 telah menembus angka 0,4, yang berarti kita telah berpindah dari zona ketimpangan baik ke zona ketimpangan moderat. Data distribusi pendapatan juga menunjukkan ke-

cenderung serupa. Perolehan 20 persen kelompok terkaya terus naik, dari 40,6 persen pada tahun 1999 menjadi 48,2 persen pada tahun 2011; sedangkan perolehan 40 persen penduduk termiskin turun dari 21,7 persen pada tahun 1999 menjadi 16,8 persen pada tahun 2011. Penurunan terjadi juga untuk kelompok 40 persen menengah, yakni dari 37,8 persen pada tahun 1999 menjadi 34,7 persen pada tahun 2011.

Perlu dicatat bahwa kedua indikator ketimpangan di atas didasarkan pada data pengeluaran. Ketimpangan berdasarkan data pendapatan sudah barang tentu jauh lebih buruk. Publikasi majalah *Forbes* tentang orang-orang terkaya di Indonesia yang semakin banyak masuk ke dalam daftar orang-orang kaya dunia setidaknya memberikan indikasi betapa sangat timpang jurang kaya-miskin di Indonesia. Indikasi lainnya bisa dilihat dari terkonsentrasinya kepemilikan deposito yang bernilai Rp 1 miliar ke atas dan Indeks Gini untuk kepemilikan tanah.

Jumlah dan persentase penduduk miskin bisa pula menggambarkan akutnya persoalan ketimpangan ini. Selama 12 tahun terakhir persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional hanya turun dari 19,1 persen pada tahun 2000 menjadi 12,0 pada tahun 2012. Selain itu tampak bahwa dalam beberapa tahun terakhir penurunan angka kemiskinan semakin lambat. Negara-negara di Asia Timur mampu menurunkan angka kemiskinan lebih cepat. Mengacu pada garis kemiskinan dengan menggunakan angka pengeluaran per kapita sehari sebesar dua dollar AS berdasarkan harga internasional tahun 2005, persentase penduduk miskin Indonesia berada di atas rata-rata negara Asia Timur. Data yang tersedia

untuk tahun 2010 menunjukkan bahwa 46,1 persen penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan.

Kita bertambah yakin bahwa kondisi ketimpangan lebih buruk ketimbang data resmi dari kenyataan bahwa 54 persen pekerja kita adalah pekerja informal. Selain itu ada 38 persen pekerja formal namun tanpa dilindungi oleh kontrak kerja. Kedua kelompok pekerja ini sudah mencapai 92 persen, yang sudah barang tentu sebagian besar dari mereka hanya memperoleh upah ala kadarnya dan tidak menerima hak-hak normatif pekerja. Adapun kelompok kedua terdiri dari 6 persen pekerja dengan kontrak dan 2 persen pengusaha. Kesenjangan pendapatan antara kelompok pertama dengan kelompok kedua patut diduga sangatlah lebar.

Memberikan peran yang lebih besar pada pasar semata sudah terbukti pula melemahkan fondasi perekonomian untuk tumbuh berkelanjutan dengan bertumpu pada kekuatan sendiri. Struktur ekonomi kian rapuh. Salah satu kemunduran nyata terlihat dari struktur ekspor. Dalam 10 tahun terakhir struktur ekspor kita makin didominasi oleh komoditi. Pada tahun 2001 peranan komoditi masih sekitar dua per lima dari keseluruhan ekspor nonmigas, sepuluh tahun kemudian sudah naik tajam menjadi 2/3 dari ekspor nonmigas. Dengan memasukkan migas, kondisinya lebih parah lagi.³⁰ Bisa dikatakan kita mengalami ekstraktifikasi dalam struktur ekspor Indonesia, suatu keadaan yang secara tak langsung

³⁰ Lebih parah lagi gambaran ekspor tahun 2012, yang mana 46,4 persen dari ekspor total disumbang hanya oleh enam komoditas primer, yaitu batu bara, gas alam, minyak sawit, minyak mentah, karet, dan tembaga.

menggambarkan kemunduran industrialisasi dan kerapuhan struktur ekonomi.

Memang, setelah krisis peranan sektor industri manufaktur secara persisten mengalami penurunan.³¹ Selain itu, produk manufaktur Indonesia semakin tergopoh-gopoh bersaing di pasar global maupun di negerinya sendiri, sehingga Indonesia menderita defisit perdagangan manufaktur yang terus membesar.³² Padahal sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam menyerap tenaga kerja formal. Peningkatan proporsi tenaga kerja formal akan mempercepat terbentuknya lapisan kelas menengah yang kokoh.

Konsensus Baru

Kita merasa telah menempuh perjalanan jauh, tetapi sebenarnya hanya berputar-putar, tak jauh bering-sut dari titik awal. Di tengah deru modernitas, kita kembali terseret ke sosok perekonomian ekstraktif (*extractive economy*). Reformasi ekonomi masih meninggalkan sosok institusi ekonomi ekstraktif (*extractive economic institutions*) yang kental. Demikian pula dengan gelombang demokratisasi yang masih saja membuat belum beranjak dari sosok institusi politik ekstraktif (*extractive political institutions*).

Nurcholish Majid (Cak Nur) memandang bangsa Indonesia adalah bangsa yang masih dalam pertumbuhan “penjadian diri” (*in making*) (Lihat, Madjid, 2004: 114). Sudah sepantasnya kita lebih sigap untuk mendefinisikan dan menetapkan kendaraan yang kita

³¹ Lihat Peraga 25: “Peranan industri manufaktur terus melorot”, di bagian lampiran buku ini, hal. 157.

³² Lihat Peraga 26: “Produk manufaktur pun telah mengalami defisit”, hal. 158.

pilih agar roh keadilan hadir dalam setiap langkah kebijakan lewat transformasi dari *extractive economic institutions* menjadi *inclusive economic institutions* dan dari *extractive political institutions* menjadi *inclusive political institutions* (Acemoglu and Robinson, 2012).

Bagaimana menghadirkan ini semua? Cak Nur mengajarkan pada kita dari kisah keteladanan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membangun Madinah dengan konsensus yang dituangkan dalam Piagam Madinah, suatu wujud dari *social contract* yang dilandasi oleh kejujuran dan kebajikan (Madjid, 2004: 48). Adakalanya kita mengalah untuk memperoleh hasil yang lebih baik seperti yang dilakoni Rasulullah ketika menyepakati perjanjian Hudaibiyah. Sejarah juga mengajarkan pada kita betapa kedudukan yang sudah di atas angin tak membuat Rasulullah menengubar dendam. Kala memasuki Makkah, kaum kafir Quraisy sudah lemah. Tapi kebesaran jiwa Rasulullah tidak menimbulkan rasa takut pada kaum yang memusuhi Rasulullah.

Inklusi institusi politik dan ekonomi akan mendorong partisipasi luas masyarakat dalam berpolitik dan berekonomi yang dilengkapi dengan jaringan-jaringan pengamanan yang mumpuni, lebih menjamin redistribusi kekayaan nasional, sehingga keadilan sosial lebih mungkin terwujud. Dengan kontrak sosial baru yang menyeimbangkan peran komunitas bisnis, komunitas politik dan *civil society*, niscaya Indonesia bakal menjadi negara besar, berkeadilan sosial, dan sejahtera.

Persoalan paling mendasar yang memerlukan konsensus baru adalah tentang keseimbangan peran negara dan peran pasar. Sudah saatnya kita bergerak

maju dengan tidak mendikotomikan keduanya. Efisiensi lewat mekanisme pasar tak bisa mendukung kesejahteraan dan keadilan. Inilah salah satu bentuk dari kegagalan pasar (*market failure*). Sebaliknya, negara juga bisa gagal melaksanakan fungsinya. Kita pun mafhum bahwa kegagalan pemerintah (*government failure*) lebih sulit dikoreksi ketimbang kegagalan pasar.

Bisa dipahami kalau sementara kalangan apriori terhadap pasar, karena yang mereka bayangkan adalah mekanisme pasar bebas. Pembahasan tentang pasar dalam relung hampa dengan institusinya kerepos. Sehingga, pasar dipandang seperti racun. Pasar yang dibungkus oleh *extractive economic institutions* dan *extractive political institutions*. Sudah barang tentu, desain pasar seperti ini justru tetap membuat hanya segelintir elit yang leluasa mengakumulasi rente ekonomi dan melanggengkannya lewat cengkeraman kekuasaan oligarki politik.

Kedua, pengelolaan sumber daya alam dan keadilan antargenerasi. Kekayaan alam merupakan karunia yang harus dikelola dan dijaga agar bisa dinikmati oleh mayoritas penduduk, bahkan oleh penduduk yang belum lahir sekalipun. *Triple deficits* (manufaktur, pangan, dan migas) merupakan bukti terang-benderang bahwa pengelolaan sumber daya alam sangat serampangan. Kekayaan alam kian dikuras untuk menutup defisit tersebut.³³ Walaupun

³³ Salah satu contoh sangat mencengangkan adalah ekspor bauksit. Pada tahun 2004 ekspor bauksit batu 1 juta ton, namun melonjak luar biasa menjadi 27 juta ton pada tahun 2010 dan naik lagi menjadi 40 juta ton pada tahun 2011. Produksi bauksit seluruhnya diekspor karena kita tak memi-

demikian, pengurusan kekayaan alam yang diekspor mentah-mentah sudah tak mampu lagi menutup defisit di ketiga kelompok barang, sehingga sejak 2012 Indonesia mengalami defisit transaksi perdagangan total (*trade deficit*).³⁴ Khusus untuk minyak, tingkat pengurusan sudah sangat tinggi. Dewasa ini *depletion factor* sudah mencapai 84 persen.³⁵ Jadi tinggal relatif sangat kecil yang disisakan untuk generasi mendatang.

Kita harus adil kepada generasi mendatang dengan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan sehingga memperburuk ekosistem. Kita pun harus menjamin hak generasi mendatang untuk menikmati sumber daya alam tak terbarukan (*non-renewable resources*). Bukan sebaliknya justru menguras habis-habisan sumber daya alam tak terbarukan dengan cara yang semakin semena-mena sehingga menambah beban baru bagi generasi mendatang.

Contoh paling mencolok adalah pengeluaran untuk subsidi BBM tahun 2012 sebesar Rp 240 triliun³⁶ sudah jauh lebih besar dari penerimaan negara dari minyak (berupa bagi hasil minyak sebesar Rp 145

liki industri alumina yang mengolah bauksit. Akibatnya, industri aluminium di Indonesia harus mengimpor seluruh kebutuhan alumina sebagai bahan bakunya.

³⁴ Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2012 defisit transaksi perdagangan Indonesia sebesar 1,7 miliar dollar AS dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada lima bulan pertama tahun 2013, defisit transaksi perdagangan sudah mencapai 2,5 miliar dollar AS.

³⁵ *Depletion factor* diperoleh dari *cumulative production* dibagi *ultimate recoverable reserves*.

³⁶ Termasuk tunggakan pembayaran pemerintah kepada Pertamina sebagai operator pengadaan BBM bersubsidi.

triliun dan pajak keuntungan perusahaan minyak sebesar Rp 33 triliun). Akibat subsidi BBM yang terus meroket, defisit APBN tahun 2013 melonjak, sehingga pemerintah harus menambah utang. Tak bisa dipungkiri, oleh karena itu, subsidi BBM sudah dibiayai oleh utang. Generasi sekarang berfoya-foya mengonsumsi BBM bersubsidi, sementara generasi mendatang bakal dihadapkan pada cadangan minyak yang makin tipis dan tambahan utang yang dilakukan oleh generasi sekarang yang boros.

Sudah sepantasnya belajar dari Timor-Leste yang mengelola seluruh penerimaan minyak lewat Petroleum Fund yang didirikan tahun 2005, sehingga hasil minyak bisa dicicipi pula oleh generasi mendatang. Dalam waktu yang relatif singkat Petroleum Fund yang dikelola bank sentral Timor-Leste sudah mencapai 11,8 miliar dollar AS.

Tak boleh lagi ada tawar menawar untuk mendirikan lembaga serupa di Indonesia. Mulailah, misalnya, dengan menyisihkan 25 persen dana bagi-hasil minyak ke *escrow account* yang dikelola Bank Indonesia secara transparan dan akuntabel. Lambat laun dana yang disisihkan harus lebih besar, harus progresif, karena stok kekayaan sumber daya alam tak terbarukan kian menipis.

Konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh pemerintah sekarang ialah bekerja keras menaikkan nisbah pajak, setidaknya menjadi 15 persen dalam 5 tahun ke depan. Bukan dengan menaikkan tarif pajak dan menjaring perusaha UKM, melainkan memburu para pembayar pajak — baik korporasi maupun orang kaya — yang melanggar aturan dengan mengenakan sanksi tegas tanpa pandang bulu.

Ketiga, kekuatan pekerja harus didorong agar tidak dengan mudah dieksploitasi oleh pemilik modal, agar mereka bisa bernegosiasi dengan pemilik modal dengan kepala tegak. Buruh yang kuat akan membuat mereka lebih rasional, tak melulu berjuang untuk kepentingannya sendiri. Rasionalitas buruh menghasilkan perilaku saling membutuhkan dengan pengusaha. Untuk itu serikat buruh harus semakin kuat.

Menghadapi iklim persaingan yang kian terbuka dan ketat dan agar proses transisi berlangsung mulus, maka pemerintah wajib menghadirkan sistem jaminan sosial dengan lebih banyak porsi pembiayaan dari APBN. Jika pemerintah berhasil melakukan modernisasi perekonomian sehingga porsi pekerja formal makin besar, maka lambat laun porsi APBN dalam pembiayaan sistem jaminan sosial akan berkurang.

Alokasi dana APBN untuk jaminan sosial bukanlah ongkos atau beban, justru sebaliknya merupakan potensi investasi yang dahsyat. Iuran jaminan sosial yang terkumpul bakal menjadi tambahan “darah segar” yang berarti untuk pembiayaan pembangunan, selain juga meningkatkan *financial deepening* sehingga memperkuat jantung utama perekonomian.³⁷ Kehadiran sistem jaminan sosial yang komprehensif juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan yang sampai sekarang masih sangat rendah. Hanya 19,6 persen orang dewasa

³⁷ Perekonomian memiliki dua “jantung” yang bertugas menyedot dan memompakan “darah” ke seujur perekonomian. Jantung pertama adalah sektor keuangan dan yang kedua adalah pemerintah lewat mekanisme APBN.

yang memiliki akun di sektor keuangan formal,³⁸ jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata negara di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 42 persen. Negara tetangga terdekat, Malaysia, memiliki *financial inclusion index* jauh lebih tinggi lagi, yaitu 66,7 persen, sedangkan Thailand 77,7 persen.

Kesadaran akan pentingnya sistem jaminan sosial masih sangat rendah di kalangan pemerintah maupun buruh. Kedua kalangan ini masih ada yang memandang bahwa sistem jaminan sosial bakal membebani anggaran negara dan membebani buruh. Padahal sistem jaminan sosial merupakan “emas” bagi pemerintah maupun bagi buruh.

Dengan sistem jaminan sosial yang komprehensif, pengusaha tak lagi dibayang-bayangi risiko membayar mahal pemutusan hubungan kerja, sementara buruh bisa bekerja lebih tenang dengan penuh kepastian sehingga bisa meningkatkan produktivitasnya.

Oleh karena itu, mengapa buruh, pengusaha dan pemerintah tak segera duduk bersama untuk menghasilkan konsensus baru hingga terwujud *institutional arrangement* baru yang dipateri dengan peraturan perundang-undangan yang lebih solid dan menjamin kepastian para pihak.

Jika buruh sudah terorganisir menjadi kekuatan terbesar maka pintu menuju kesejahteraan sosial kian terbuka. Demokrasi pun akan memiliki landasan yang lebih kokoh dengan pilar-pilarnya yang tidak jomplang.

³⁸ Disebut juga *financial inclusion index*. Angka-angka *inclusion index* bersumber dari World Bank, “Global Financial Inclusion Index 2011.”

Keempat, hadirkan visi pembangunan berbasis maritim. Indonensia memiliki kondisi geografis yang paling unik di dunia dengan gugusan sekitar 17.000 pulau dan dengan bentangan lautan dua kali lebih luas dari daratan.

Presiden Soekarno menyampaikan pesan mendalam di hadapan National Maritime Convention I tahun 1963:

Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan *National Building* bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.

Salah satu faktor terpenting yang membuat perjalanan pembangunan di Indonesia terseok-seok ialah penafian atas kondrat kita sebagai negara maritim. Secara politik Indonesia telah terintegrasi, namun secara ekonomi masih tercerai berai. Hal ini terlihat dari disparitas harga berbagai komoditas antardaerah yang sangat lebar. Penyebab utamanya ialah peranan transportasi laut dan sungai yang lemah dan dilemahkan.

Proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda merupakan cerminan dari sesat pikir para pengelola negara. Laut yang sebenarnya bisa mempersatukan pulau-pulau di Indonesia dipandang sebagai perintang, sehingga dibutuhkan jembatan untuk menghubungkannya. Jembatan Selat Sunda tidak akan memperkuat integrasi ekonomi antarpulau, karena pergerakan barang dengan mengandalkan transportasi darat niscaya akan jauh lebih mahal ketimbang

moda transportasi laut.

Dengan transportasi laut sebagai urat nadi yang mengintegrasikan perekonomian domestik, industrialisasi akan lebih tersebar dan komplementaritas antarpulau akan lebih kuat, sehingga akan lebih cepat terjadi pembangunan yang lebih merata.

Jika perekonomian Indonesia sudah lebih terintegrasi, maka kita tak akan gentar menghadapi gelombang integrasi global maupun regional. Keterbukaan ekonomi global akan kita pandang sebagai kesempatan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diprediksi oleh teori perdagangan internasional.

Penutup

Dunia sedang mengalami perubahan mendasar. Telah terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Pada tahun 2030 diperkirakan sumbangan negara-negara maju yang tergabung di dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) sudah tidak lagi dominan. Peranan negara-negara non-OECD akan melampaui negara-negara OECD, masing-masing 57,7 persen dan 42,3 persen. Peranan China akan menggantikan Amerika Serikat sebagai negara yang perekonomiannya terbesar di dunia.³⁹ Menurut PricewaterhouseCoopers, posisi Indonesia akan berangsur naik ke posisi ke-11 pada tahun 2030 dan ke-8 pada tahun 2050.⁴⁰ Boston Consulting Group lebih optimistik lagi, menempatkan Indonesia pada

³⁹ Lihat Peraga 27: "Pergeseran kekuatan ekonomi dunia", di bagian lampiran buku ini, hal. 159.

⁴⁰ Lihat Peraga 28: "PwC 2013: Top-20 economies", hal. 160.

posisi ke-8 pada tahun 2030.⁴¹

Proyeksi jangka panjang yang dilakukan lembaga-lembaga riset internasional ini memandang Indonesia bakal menjadi pasar yang sangat besar. Berpulang pada kita apakah hanya puas sebagai pasar bagi produk-produk barang dan jasa negara-negara lain. Mereka tak peduli apakah gemerlap pasar itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Mereka tak peduli apakah kita bertahan sebagai konsumen dengan bermodalkan kekayaan alam yang kian tergerus.

Pasar di dalam dirinya tak memiliki desain untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Pasar juga tak menjamin apakah kemajuan kita berkelanjutan dan berhasil keluar dari *middle-income trap*.

Kitalah yang menentukan nasib diri kita sendiri. Tuhan menganugerahi kita karunia sumber (*resource endowments*) berupa gugusan kepulauan yang diikatkan oleh lampanan lautan yang dua kali lebih luas dari daratan. Oleh karena itu kita harus bertumpu pada kekuatan unik ini. Jika kita bisa memanfaatkan karunia sumber yang amat unik dan berharga ini serta mendayagunakan seluruh kekuatan kita secara bertanggung jawab, niscaya kita bakal jadi kekuatan besar di dunia yang disegani, yang menyejahterakan rakyatnya serta menghadirkan keadilan.***

⁴¹ Lihat Peraga 29: "The future of archipelago economy", hal. 161.

Rujukan

- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson (2012), *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* (London: Profile Books).
- Basri, Faisal, dan Haris Munandar, (2009), *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Bower, Joseph L., Herman B. Leonard, and Lynn S. Paine (2011), *Capitalism at Risk: Rethinking the Role of Business* (Boston, Mass: Harvard Business Review Press).
- Cohen, Daniel (2012), *The Prosperity of Vice: A Worried View of Economics* (Cambridge, Mass: The MIT Press).
- Dullien, Sebastian, Hansjörg Herr, and Christian Kellermann (2011), *Decent Capitalism: A Blueprint for Reforming Our Economies* (London: Pluto Press).
- Ferguson, Niall (2012), *The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die* (London: Penguin Books).
- Galbraith, James K. (2012), *Inequality and Instability: A Study of the World Economy just before the Great Crisis* (New York: Oxford University Press).
- Kaletsky, Anatole (2010), *Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis* (New York: Public Affairs).
- Khanna, Ro (2012)., *Entrepreneurial Nation: why Manufacturing is Still Key to America's Future* (New York: McGraw-Hill).
- Krugman, Paul (2012), *End this Depression Now!* (New York: W. W. Norton & Company).
- Lin, Justin Yifu (2012), *Demystifying the Chinese Economy* (Cambridge: Cambridge University Press).

- Madjid, Nurcholish (1995), *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Penerbit Paramadina).
- (1999), *Cita-cita Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Paramadina).
- (2004), *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- (2009), *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Penerbit Paramadina).
- (2010), *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat).
- Reback, Gary L. (2009), *Free the Market!: Why Only Government Can Keep the Marketplace Competitive* (New York: Portfolio).
- Rodrik, Dani (2011), *The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and Democracy Can't Coexist* (Oxford: Oxford University Press).
- Sachs, Jeffrey D. (2011), *The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity* (New York: Random House).
- Schwager, Jack D. (2013), *Market Sense and Nonsense: How the Markets Really work (and How They Don't)* (Hoboken New Jersey: John Wiley & Sons).
- Stiglitz, Joseph E. (2012), *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future* (New York: W. W. Norton & Company).
- Taleb, Nassim Nicholas (2012), *Antifragile: Things that Gain from Disorder* (New York: Random House).
- Zingales, Luigi (2012), *A Capitalism for the People: Recapturing the Lost Genius of American Prosperity* (New York: Basic Books).

BAGIAN II: TANGGAPAN-TANGGAPAN

Faisal Basri dan Konsensus Kebangsaan Baru: Empat Catatan Tambahan

THEE KIAN WIE

Pendahuluan

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberikan tanggapan yang menyeluruh atas makalah Faisal Basri, seorang ekonom yang mumpuni, yang memang sudah komprehensif disertai analisis yang tajam yang didukung oleh banyak referensi yang mutakhir.

Tulisan ini hanya akan menyoroti beberapa faktor tentang ekonomi Indonesia yang masih perlu dibahas lebih luas, dan kiranya bisa melengkapi analisis Faisal yang baik sekali.

Uraian di bawah ini akan membahas beberapa tantangan utama yang bisa menghambat pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama: Menanggulangi Korupsi yang Gawat dan Luas

Korupsi luas terdapat di semua tingkat badan eksekutif (pusat, propinsi, dan kabupaten/kotamadya), legislatif (DPR dan DPRD), dan yudikatif di berbagai tingkat (Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali mungkin Mahkamah Konstitusi, * Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Polisi).

Penting dicatat, hingga kini belum pernah ada negeri dengan korupsi yang begitu luas berhasil menjadi negara yang makmur, demokratis sejati, dan dengan distribusi kekayaan yang merata. Ini karena jumlah dana yang banyak diakumulasi oleh para pejabat dan militer yang korup, sering dengan kroni-kroni bisnis mereka, sering dihaburkan atau disimpan di berbagai bank di dalam atau di luar negeri, atau digunakan untuk membeli rumah-rumah atau apartemen yang mewah di dalam atau di luar negeri, atau untuk perjalanan di dalam atau di luar negeri.

Jumlah dana yang dikorupsi ini, yang sangat banyak, seharusnya digunakan untuk proyek-proyek yang mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan masih tetap merupakan salah satu tantangan utama bagi pemerintah Indonesia, meskipun di masa lampau sudah tercapai kemajuan yang baik dalam meng-

* Catatan editor: Tulisan ini dibuat sebelum tertangkapnya Akil Mochtar, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Oktober 2013

entaskan kemiskinan. Meskipun demikian, upaya mengentaskan kemiskinan masih tetap merupakan tantangan utama bagi pemerintah Indonesia maupun masyarakat luas pada umumnya.

Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk menurunkan angka kemiskinan, namun pada pertengahan September 2013 angka kemiskinan mengungkapkan bahwa masih 28 juta warga Indonesia miskin (setara dengan 11,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia). Pemerintah Indonesia telah merencanakan untuk menurunkan angka kemiskinan sampai 8 hingga 10 persen pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir Oktober 2014 (*The Jakarta Post*, 2 Oktober 2013).

Dalam pada itu perlu diketahui bahwa banyak warga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, bisa jatuh lagi di bawah garis kemiskinan, jika terjadi suatu guncangan internal (di dalam negeri) atau eksternal (dari luar negeri). Contohnya adalah yang terjadi pada Krisis Finansial Asia. Dengan demikian, warganegara dalam lapisan ini bisa disebut warganegara yang “nyaris miskin” (*near poor*).

Oleh karena ini proyek-proyek yang secara ekonomis dan sosial lebih berguna untuk mengentaskan kemiskinan adalah proyek-proyek yang meningkatkan keterampilan dan mutu sumber daya manusia Indonesia, karena sumber daya yang paling berharga dan paling penting untuk pembangunan Indonesia, adalah sumber daya manusianya. Warga yang terampil juga bisa memperoleh penghasilan yang lebih tinggi daripada warga yang tidak atau kurang terampil.

Contoh paling baik dari negara-negara Asia Timur, yang setelah Perang Pasifik yang dahsyat, mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat disertai penurunan pesat dalam angka kemiskinan adalah Jepang, dan keempat Ekonomi Industri Baru Asia (*Newly Industrialised Asian Economies, NIES*), yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Kelima negara ini miskin dalam sumber daya alam (*resource-poor countries*), akan tetapi bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat berkat sumber daya manusianya yang terampil berkat pendidikan yang baik dan etos kerjanya yang sangat tinggi.

Oleh karena ini proyek-proyek yang secara ekonomi dan sosial lebih berguna bagi Indonesia adalah rumah sakit dan poliklinik di seluruh negeri, termasuk di daerah terpencil; sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas (baik umum maupun kejuruan), politeknik, dan perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta), terutama di bidang ilmu-ilmu beta (teknik, ilmu alam, fisika, kimia, biologi, matematika, ilmu informasi dan komputer (ICT)). Ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan Indonesia untuk menjadi negara yang modern dan maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ketimbang ilmu-ilmu alpha (ilmu ekonomi, ilmu-ilmu sosial lainnya, dan ilmu hukum) yang lulusannya kini sudah cukup banyak, sehingga mereka sulit mendapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.

Di samping itu, pendidikan yang baik yang sangat diperlukan adalah terutama bahasa Indonesia, juga bahasa-bahasa lokal di daerah untuk melestarikan dan menjamin keberagaman linguistik Indonesia.

Yang juga penting adalah pendidikan bahasa-bahasa asing, terutama Inggris, tetapi mungkin juga bahasa-bahasa di negara-negara ASEAN lainnya, terutama bahasa Tagalog, Vietnam, dan Thai karena Filipina, Vietnam, dan Thailand adalah negara terbesar dengan penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara sesudah Indonesia.

Di samping itu, bahasa China dan Jepang juga sangat penting untuk hubungan eksternal Indonesia, karena kedua negara ini adalah mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia. Selain perluasan fasilitas pendidikan di semua tingkat, maka mutu perguruan tinggi adalah mutlak untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan manusia Indonesia. Hal ini memang sangat diperlukan, jika Indonesia ingin mewujudkan cita luhur untuk menjadikan Indonesia salah satu negara yang paling maju dalam ekonomi berkat pemanfaatan efektif dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir.

Akan tetapi suatu hal yang memprihatinkan adalah bahwa dalam *Times Higher Education Supplement*, tidak satu pun universitas di Indonesia termasuk dalam 200 universitas terbaik di dunia, sedangkan National University of Singapore (NUS) menempati peringkat universitas ke-29 terbaik (*Times Higher Education World University Rankings, 2012-2013*). Peringkat ini menyajikan satu-satunya penilaian tentang kinerja universitas-universitas di dunia tentang misi inti perguruan tinggi, yaitu mengajar, penelitian, alih pengetahuan, dan pandangan internasional mereka.

Karena pendidikan tinggi sangat mahal, maka seharusnya jumlah beasiswa Bidik Misi (Beasiswa

Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin), yang diperkenalkan pemerintah Indonesia pada 2010 (Hill and Thee, 2013: 175) perlu ditambah lagi. Keharusan ini ditanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan pengumuman pada Februari 2012 bahwa Program Bidik Misi akan diperluas lagi sampai meliputi 40,000 mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi (Hill dan Thee, 2012: 175).

Dengan pemberian beasiswa Bidik Misi ini juga bisa dicapai pemerataan dalam akses ke pendidikan tinggi, sehingga dengan cara ini jumlah manusia Indonesia yang berketrampilan tinggi bisa bertambah. Dengan cara ini juga bisa tercapai pemerataan dalam pembagian pendapatan, karena warga yang berketrampilan tinggi bisa memperoleh penghasilan yang tinggi pula.

Kedua: Mengurangi Ketergantungan Indonesia pada Sumber Daya Alam dan Ekspor Komoditas-Komoditas Primer

Kini lebih dari 50 persen dari ekspor barang-barang (*merchandise exports*) Indonesia terdiri atas ekspor komoditas primer, sama seperti zaman kolonial Belanda. Oleh karena ini Faisal Basri sangat benar ketika menyatakan bahwa telah terjadi pelemahan sektor industri manufaktur.

Di samping itu, perlu juga diperhatikan bahwa negara-negara yang kaya sumber daya alam, seperti Indonesia, sering dihadapi “kutukan sumber daya alam” (*natural resource curse*). “Kutukan” ini adalah pertumbuhan ekonomi yang lamban. Hal ini disebabkan karena negara yang kaya sumber daya alam tidak atau kurang dapat mempertahankan efisiensi

dalam penggunaan faktor-faktor produksi, terutama di sektor industri manufaktur, di mana potensi untuk peningkatan dalam produktivitas adalah paling tinggi (Coxhead, 2005: 71).

Beberapa faktor dapat dikemukakan untuk menerangkan mengapa sumber daya alam yang berlimpah menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi yang lamban dan perbedaan dalam pendapatan per kapita antara negara-negara yang kaya sumber daya alam dan yang miskin dalam sumber daya alam (Coxhead, 2005: 72-74).

Pertama, dampak “Penyakit Belanda” (*Dutch Disease*) dari ekspor sumber daya alam akan menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur, suatu sektor yang pertumbuhannya memberikan eksternalitas produktif yang positif, sehingga dengan demikian dapat menyebabkan hasil-hasil yang makin tinggi (*increasing returns*), dan makin banyak volume produksinya.

Kedua, eksploitasi kekayaan sumber daya alam mengurangi keuntungan atau hasil dari modal insani (*human capital*). Dengan demikian, kekayaan sumber daya alam dapat mengurangi insentif untuk perluasan dan peningkatan mutu pendidikan.

Ketiga, kekayaan sumber daya alam juga dapat mendorong negara yang kaya sumber daya alam menjadi “negara pemangsa” (*predatory state*) ketimbang suatu “negara pembangunan” (*developmental state*). Hal ini bisa terjadi karena di “negara pemangsa” dengan mudah dapat mendorong korupsi yang bertalian dengan penghasilan rente dari sumber daya alam, atau dengan mengurangi atau merusak

“negara pembangunan”, jika penghasilan banyak yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam mengurangi efisiensi dari kebijakan dan administrasi pemerintah.

Keempat, negara yang kaya sumber daya alam juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akibat destabilisasi dari “Penyakit Belanda” yang menyebabkan volume produksi di sektor-sektor yang tidak dikaruniai sumber daya alam yang berlimpah akan menurun.

Ketiga: Menanggulangi Pelemahan Sektor Industri Manufaktur dengan Meningkatkan Daya Saing Internasional Industri Manufaktur Indonesia

Kenyataan bahwa Indonesia masih banyak tergantung pada ekspor komoditas-komoditas primer, termasuk minyak sawit, batubara, karet, kopi, kakao, dan lainnya, dan bukan pada ekspor hasil-hasil industri manufaktur, seperti Malaysia dan Singapura, menunjukkan bahwa daya saing internasional rata-rata sektor industri manufaktur Indonesia (dengan hanya beberapa pengecualian), masih belum cukup tinggi untuk bertarung di pasar dunia yang sangat kompetitif.

Sebenarnya, sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan berbagai paket deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha bagi investor domestik dan asing, setelah berakhirnya *boom* minyak bumi pada 1982, dan memperkenalkan serangkaian kebijakan untuk mengurangi “*anti-export bias*” (bias anti-ekspor) dalam kebijakan niaga (*trade regime*), maka sejak 1987 ekspor hasil-hasil industri ekspor Indonesia telah melonjak dengan pesat. Hal ini bisa terjadi

karena banyak perusahaan manufaktur dari Negara-negara Industri Baru (NIB) dari Asia Timur yang telah mencapai proses industrialisasi yang pesat, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, mendirikan pabrik-pabrik padat karya yang berorientasi ekspor, khususnya pabrik garmen, tekstil, dan alas kaki (Thee, 1991: table 5, 69).

Berkat kebijakan deregulasi dan kebijakan niaga yang banyak mengurangi “bias anti-ekspor”, maka sejak 1987 ekspor hasil-hasil industri manufaktur telah melonjak dengan pesat. Oleh karena lonjakan ekspor hasil-hasil industri manufaktur ini, Profesor Hal Hill dari Universitas Nasional Australia (ANU), Canberra, seorang pakar ekonomi yang telah melakukan banyak penelitian tentang perkembangan sektor industri manufaktur, pernah menyatakan bahwa ‘Indonesia kini mengikuti jejak langkah Negara-negara Industri Baru Asia Timur (Hill, 1987).

Tetapi setelah Krisis Finansial Asia ini, kinerja sektor industri manufaktur Indonesia kurang memuaskan, baik jika dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Timur maupun jika dibanding dengan sektor-sektor lain dari ekonomi Indonesia (World Bank, 2012: 1).

Agar Indonesia dapat memaksimalkan kinerja sektor industri manufakturnya, maka Indonesia perlu memanfaatkan jumlah tenaga kerjanya yang sangat besar serta sumber daya alamnya yang berlimpah, sambil sekaligus berupaya keras untuk naik secara bertahap dalam rantai nilai (*value chain*) di sektor-sektor industri manufaktur dan jasa-jasa. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk melakukan diversifikasi ekonominya dari kegiatan yang kini masih

terlampau banyak terkonsentrasi pada sektor-sektor komoditas primer. Hal ini juga akan memperbaiki kemampuan Indonesia untuk menciptakan kaitan dengan rantai pasokan global (*global supply chains*), sehingga bisa merespons lebih cepat terhadap perubahan besar di lingkungan ekonomi eksternal, sambil mampu melayani pasar domestik yang makin besar karena bertambah banyaknya golongan berpendapatan menengah (*middle class*) (World Bank, 2012: 1).

Keempat: Mengamankan Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan mendapat prioritas tinggi dalam strategi pembangunan pemerintah Indonesia. Dalam hubungan ini pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran pengurangan emisi gas rumah kaca (*glass house gas emissions*) hingga 26% di tingkat nasional pada 2020, dan hingga 41% jika Indonesia mendapat bantuan internasional. Di samping itu, program pengurangan emisi gas rumah kaca juga dilengkapi dengan penetapan sasaran pada tingkat sektoral. Meskipun telah tercapai sedikit kemajuan, namun masih terdapat ruang lingkup yang berarti untuk meningkatkan produktivitas karbon.

Ketersediaan ruang lingkup ini disebabkan karena ada cukup bukti bahwa sumber-sumber daya hutan Indonesia yang terbarukan, dan oleh karena itu sangat berharga, ditebang begitu intensif, sehingga mengancam keberlanjutan hutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperlambat deforestasi yang marak, yang terutama disebabkan oleh penebangan liar (OECD, 2010: 3) dan menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini menyebabkan

asap yang mengganggu kualitas hidup masyarakat di Sumatera dan Kalimantan, juga di Malaysia dan Singapura, dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Penetapan pajak atas emisi karbon akan merupakan alat yang sangat efektif untuk mengurangi intensitas emisi gas karbon dalam pembangkitan listrik dan di sektor industri manufaktur. Hal ini mendesak sekali, karena kini pajak atas emisi karbon belum ada di Indonesia. Upaya mengurangi subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang masih tinggi sekali (meskipun subsidi BBM pada awal tahun ini dikurangi sedikit) akan banyak membantu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon (OECD, 2012: 3), sehingga memperbaiki lingkungan hidup bukan saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, terutama di negara-negara tetangga.

Kesimpulan

Dalam halaman-halaman di atas dibahas empat tantangan utama yang bisa menghambat pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan pertama adalah untuk menanggulangi korupsi yang gawat dan luas, yang bisa menggerogoti wibawa dan kepercayaan kepada pemerintah dan jajaran birokrasinya.

Tantangan kedua adalah ketergantungan Indonesia yang terlampau besar pada sumber daya alam dan ekspor komoditas-komoditas primer, sehingga ekonomi Indonesia menjadi sangat rentan terhadap gejolak dalam pasar internasional. Hal ini juga menyebabkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak bisa stabil, sehingga mempersulit perkiraan per-

tumbuhan ekonomi untuk tahun-tahun mendatang karena kadang-kadang sulit untuk memperkirakan terjadinya gejolak eksternal. Tantangan ketiga adalah menanggulangi pelemahan sektor industri manufaktur Indonesia dengan meningkatkan daya saing internasional industri manufaktur. Ini bisa dilakukan antara lain dengan peningkatan kemampuan teknologi dan kemampuan manajerial perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia. Tantangan keempat adalah mengamankan keberlanjutan lingkungan Indonesia untuk generasi-generasi Indonesia di masa depan.

Sudah barang tentu menanggulangi keempat tantangan bagi pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan bukan hal yang mudah, dan oleh karena ini akan memerlukan upaya besar, yang tidak dapat dipecahkan dalam satu-dua tahun saja.

Namun inventarisasi keempat tantangan besar ini kiranya merupakan langkah pertama untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.***

Rujukan

- Coxhead, Ian (2005), "International Trade and the Natural Resource 'Curse' in Southeast Asia: Does China's Growth Threaten Regional Development?," dalam Budy Resosudarmo (ed.), *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- Hill, Hal (1987), "Survey of Recent Developments," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, September.
- Hill, Hal dan Thee Kian Wie (2013), "Indonesian Universities: Rapid Growth, Major Challenges," dalam Daniel Suryadarma and Gavin W. Jones (eds.), *Education in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- OECD (2012), *OECD Economic Surveys Indonesia – Overview* (Paris: OECD), September.
- Resosudarmo, Budy P. (ed.) (2005), *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- Suryadarma, Daniel and Gavin W. Jones (eds.) (2013), *Education in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- Thee, Kian Wie (1991), "The Surge of Asian NIC Investment into Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 27, No. 3, Desember.
- Times Higher Education World University Rankings, 2012-2013.*
- World Bank (2012), *Picking Up the Pace: Reviving Growth in Indonesia's Manufacturing Sector – Executive Summary* (Jakarta: World Bank), September.

Mencari Titik Temu Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan

Tanggapan atas Faisal Basri

HANDI RISZA

Pendahuluan

Membaca tulisan Faisal Basri, “Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar dan Cita-cita Keadilan”, yang disampaikan dalam rangka Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML), kita merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan yang tidak berujung. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan berdampak pada perjalanan dan cita-cita bangsa ke depan. Mengutip Faisal, “Bahkan 68 tahun belum juga cukup untuk sekadar memilih kendaraan yang hendak kita tumpangi menuju cita-cita kemerdekaan.” Jadi yang kita hadapi saat ini tidak hanya menentukan jalan mana yang harus kita tempuh, tapi juga memilih kendaraan apa yang harus kita gunakan untuk menempuh jalan menuju cita-cita kemerdekaan tersebut. Kondisi Indonesia saat ini

sangat relevan dengan apa yang disebut Nurcholish Madjid sebagai “penjadian diri” (*in the making*).¹ Tulisan di atas menjadi sangat menarik karena Faisal melengkapinya dengan sejumlah data-data terakhir mengenai kondisi perekonomian nasional.

Sebagai ekonom senior yang telah menyaksikan jatuh bangunnya rezim yang pernah berkuasa di Indonesia, Faisal tidak ingin terjebak dalam dikotomi pendekatan ekonomi berdasarkan mazhab atau aliran ekonomi seperti neo-klasik maupun aliran ekonomi lainnya. Melainkan, dia lebih melihat permasalahan bangsa yang kita hadapi saat ini dalam konteks institusional baik secara ekonomi maupun politik. Faisal menilai, rapuhnya pijakan kebijakan yang kita miliki tidak lepas dari faktor kegagalan kita melakukan proses transformasi institusi atau kelembagaan baik secara politik maupun ekonomi. Itu berupa kegagalan dalam mentransformasikan diri dari *extractive economic institution* menjadi *inclusive economics insitution* dan juga dari *extractive political institution* menjadi *inclusive political institution*. Ekonomi dan politik tidak lagi sekadar eksploitasi sumberdaya yang dilakukan negara dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatan per kapita yang semakin membesar, tetapi bagaimana mendorong partisipasi masyarakat dalam segala level agar terlibat aktif dalam membangun perekonomian secara bersama. Pasar harus mampu dimanfaatkan secara bersama melalui partisipasi aktif setiap warga negara. Negara menjamin redistribusi kekayaan ke

¹ Nurcholish Madjid adalah salah satu cendekiawan Muslim yang melahirkan konsep dan gagasan mengenai keindonesiaan, kemodernan dan keislaman (lihat Madjid, 2004).

seluruh masyarakat dan menjamin aktivitas semua warga negara dengan sistem jaminan sosial yang baik.

Pemikiran Faisal dalam memandang perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi strukturalis yang kemudian berkembang menjadi ekonomi kelembagaan (*institutional economics*).² Lahirnya pemikiran ekonomi strukturalis merupakan reaksi dari ketidakpuasan terhadap aliran ekonomi neoklasik yang selama ini telah mempengaruhi pemikiran ekonomi dan pembangunan hampir di seluruh dunia. Teori ekonomi neoklasik tidak dikembangkan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, sehingga menimbulkan banyak bias dalam pembangunan, terutama terjadinya ketimpangan struktural baik antara pemerintah dan pasar maupun antara pelaku pasar.³ Oleh karenanya, bagi negara sedang berkembang, diperlukan teori ekonomi yang lebih sesuai dan memiliki kesatuan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya setempat. Dalam tulisan Faisal disebutkan sebagai keseimbangan antara komunitas bisnis, komunitas politik dan *civil society*, dalam perannya mewujudkan negara yang berkeadilan sosial dan sejahtera.

² Sebagai ekonom senior yang memiliki banyak publikasi ilmiah, posisi Faisal Basri cukup unik. Di kalangan para ekonom strukturalis, nama beliau tidak pernah disebut sebagai seorang ekonom strukturalis Indonesia (lihat Swasono, 2010: 38). Tetapi dari tulisan-tulisannya, penulis kemudian menempatkan posisi beliau sebagai ekonom yang dipengaruhi pemikiran strukturalis, terutama *institutional economics*.

³ Lihat Gunar Myrdal (1972).

Momentum Perubahan yang Terabaikan

Krisis ekonomi, yang diakhiri dengan pergantian rezim pada tahun 1998, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia. Tidak bisa dipungkiri telah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam perkembangan politik, sosial, dan demografis yang banyak mempengaruhi perubahan wajah perekonomian nasional, selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir. Proses transisi politik, yang dikhawatirkan banyak pihak akan menimbulkan instabilitas keamanan dan disintegrasi bangsa, ternyata berlangsung lancar dan menghasilkan komposisi baru antar-lembaga negara dan hubungan dengan militer. Dengan kata lain tercipta keseimbangan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain proses transisi politik, perekonomian nasional juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Kue ekonomi, yang selama ini dikuasai oleh usaha besar atau konglomerasi, secara perlahan mulai terbagi ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu apa pengaruh semua ini terhadap daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi global?

Sayang, dalam tulisannya, Faisal tidak banyak mengungkap kondisi ekonomi pada periode 1998-2008. Padahal sesungguhnya pada periode itulah proses konsolidasi ekonomi nasional terjadi, setelah dihantam krisis multi-dimensi 1997-1998. Saat itu terbentuk keseimbangan (*equilibrium*) baru dalam perekonomian nasional, di mana terjadi migrasi yang sangat besar dari sektor formal seperti buruh pabrik, pekerja kantoran yang terkena dampak PHK, kepada sektor ekonomi mikro kecil dan menengah (UMKM)

dan sektor ekonomi kreatif lainnya. Sehingga secara perlahan terbentuk pasar domestik yang sangat besar untuk memenuhi konsumsi domestik yang juga besar. Ciri khas dari industri UMKM yang terbentuk adalah tidak tergantung kepada lembaga keuangan, bahan baku yang digunakan produksi dalam negeri dan berorientasi pada pasar dalam negeri. Bahkan jumlah pelaku usaha UMKM mencapai 99,99 % atau sekitar 51,26 juta unit usaha dari seluruh pelaku usaha nasional sampai dengan akhir tahun 2008.⁴ Tidak heran kirannya, ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009, perekonomian nasional masih bisa tumbuh sebesar 4%-5%. Sementara itu, pada saat yang bersamaan banyak negara yang justru mengalami pertumbuhan minus.

Konsumsi rumah tangga dan pemerintah telah menyelamatkan perekonomian Indonesia pada saat terjadinya krisis ekonomi 2008-2009. Ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,3% pada saat puncak terjadinya krisis yaitu triwulan II-III 2009.⁵ Sebagian besar pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan yang cukup kuat di tengah krisis ekonomi global. Ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 4% sampai dengan triwulan III-2009.⁶ Tidak bisa dipungkiri, pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan

⁴ Laporan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memperlihatkan terjadinya pertumbuhan jumlah UKM pada periode 1998-2008. Lihat Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), 2009.

⁵ *Berita Resmi Statistik BPS*, No. 50/08/Th.XII, 10 Agustus 2009.

⁶ *Berita Resmi Statistik BPS*, No. 50/08/Th.XII, 10 Agustus 2009.

pemerintah. Bandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang mengalami pertumbuhan minus,⁷ di mana sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara tersebut ditopang pembentukan modal tetap bruto dan ekspor.

Krisis ekonomi global menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada triwulan IV-2009 hingga triwulan I-2010, pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand kembali menggeliat tumbuh di atas angka rata-rata 6%. Sedangkan Indonesia pada saat yang sama hanya tumbuh 4,5%-5% hingga penyusunan APBN 2010.

Dari data-data di atas sangat jelas terbaca bahwa sesungguhnya perekonomian Indonesia belum terlalu terkoneksi dengan kondisi perekonomian global, khususnya pengaruhnya terhadap investasi dan tingkat ekspor. Terbukti, pada saat perekonomian global mulai membaik, respon pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak secepat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah.

Barulah setelah periode krisis ekonomi global 2008-2009 mereda, lembaga-lembaga internasional semakin percaya kepada perekonomian nasional. Investasi asing mulai berdatangan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mengutip Faisal, "sejak tahun 2009 itulah perekonomian Indonesia terbang dengan dua mesin...." Artinya, pada periode sebelumnya, konsumsi masyarakat dan pemerintah saja

⁷ Lihat Nota Keuangan dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, maka semenjak tahun 2009 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai angka 30 persen.

Momentum positif yang ditunjukkan oleh angka investasi yang semakin membaik belum diikuti dengan perubahan pada sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi nasional cenderung bertumpu pada sektor-sektor ekonomi yang bersifat *non-tradable* seperti sektor komunikasi, jasa, keuangan, serta hotel dan restoran. Sedangkan sektor *tradable*, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal ketiga sektor tersebut bersifat padat karya dan merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian. Seperti misalnya pada tahun 2012 dan 2013, sektor-sektor tersebut menyumbang pada kisaran 51% dari PDB nasional. Masih kurangnya kontribusi sektor *tradable* tersebut dalam menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang belum efektif untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

Modal besar yang telah dimiliki Indonesia saat ini adalah stabilitas makro ekonomi nasional yang cukup kuat, kondisi politik dan keamanan yang terkendalikan, dan kemampuan mengelola kebijakan fiskal dan moneter yang semakin baik. Modal besar tersebut harus mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah dan seluruh *stakeholder* perekonomian nasional. Ke depan tantangan terbesar yang dihadapi oleh perekonomian nasional adalah menjaga keberlangsungan ketahanan pangan dan energi yang sampai saat ini belum terkelola dengan baik. Khu-

susnya energi, penggunaan BBM bersubsidi telah mencapai angka 48 juta kiloliter, nilai subsidi yang terkandung di dalamnya sudah sangat memberatkan APBN⁸. Terganggunya kondisi BBM baik dari sisi harga maupun pasokannya, akan sangat berpengaruh terhadap asumsi ekonomi makro lainnya, seperti inflasi dan nilai tukar rupiah.

Berkah atau Bencana?

Faisal Basri melihat persoalan ekonomi tidak hanya dinilai dari indikator-indikator makroekonomi, tetapi juga dari perilaku seluruh *stake holder* bangsa ini. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh kalangan elit nasional semakin tidak terkontrol. Perilaku korupsi yang ditunjukkan oleh para pemangku kebijakan di lembaga-lembaga tinggi negara akan sangat mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap kinerja aparatur pemerintah di Indonesia, terutama dari sisi kepastian dan penegakan hukum (*rule of the law*) dan kualitas peraturan (*regulatory quality*) yang ada. Perilaku korupsi telah menggerogoti efisiensi biaya dalam setiap peraturan, sehingga daya saing perekonomian nasional menjadi tidak efisien dan efektif untuk bersaing dengan negara tetangga. Pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru sebatas menangkap perilaku korupsi, tetapi belum sampai ke arah memperbaiki sistem dan perilaku aparatur pemerintah dalam mengelola birokrasi. Tidak banyak

⁸ Belanja subsidi energi, khususnya BBM dan listrik, sangat memberatkan Anggaran Negara. Lihat : Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

yang digali oleh Faisal terhadap perilaku korupsi yang sudah sangat mengkhawatirkan ini.

Faisal menilai bahwa yang paling menjadi daya tarik para investor untuk datang dan menanamkan modalnya di Indonesia adalah dengan melihat potensi Indonesia dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indonesia sedang berada dalam fase *demographic bonus* atau *demographic dividend*, yaitu jumlah proporsi penduduk usia kerja yang terbesar dan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Jumlah tenaga kerja produktif yang tersedia relatif besar, sehingga diharapkan akan mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Kelompok usia produktif ini juga diyakini akan memiliki tingkat produktifitas yang tinggi, tingkat konsumsi yang tinggi dan memiliki potensi tabungan yang juga tinggi. Dengan terus melihat pergerakan generasi tersebut maka diyakini strata menengah-atas akan mendominasi perekonomian Indonesia pada tahun 2025. Inilah yang kemudian menjadi alasan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat baik di masa yang akan datang.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak dipungkiri telah membangkitkan rasa optimisme terhadap perekonomian nasional kedepan. Tapi Faisal tidak mengelaborasi lebih jauh dampak lain yang akan terjadi jika bonus ini tidak dipersiapkan secara baik: Hal itu bahkan bisa menjadi bom waktu bagi perekonomian nasional di kemudian hari. Asumsi yang dibangun selalu menempatkan penduduk usia kerja yang kita miliki memiliki tingkat pendidikan yang baik. Padahal data riil sungguh sangat berbeda, bahkan menjadi kekhawatiran tersendiri. Data Unit-

ed Nations Development Program (UNDP: 2012)⁹ menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sangat rendah. Pada tahun 2011 IPM Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei, dengan skor 0,617, turun dari peringkat 108 pada tahun 2010. Untuk kawasan ASEAN, peringkat IPM pertama adalah Singapura (dengan nilai IPM 0,866), Brunei (0,838), Malaysia (0,761), Thailand (0,682,) dan Filipina (0,644). Indonesia hanya unggul dari Vietnam (0,593), Laos (0,524), Kamboja (0,523), dan Myanmar (0,483).

Data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik 2011 (BPS: 2012) memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu menamatkan pendidikannya di tingkat SMA hanya sebesar 29,69%.¹⁰ Dari jumlah anak yang masuk SD sekitar 5,3 juta anak, ternyata yang mampu menyelesaikan studinya hingga kejenjang SMA tinggal 2,2 juta pada tahun 2010. Dengan kata lain anak yang mengalami putus sekolah sekitar 3,1 juta. Bagaimana kita akan menggantungkan harapan bagsa ini jika hampir 60 persen jumlah penduduk Indonesia berada di bawah usia 40 tahun, sebagian besar tidak lulus SMA? Yang menjadi kekhawatiran kita adalah jumlah kaum muda yang sebagian besar tidak terdidik serta kurang terdidik justru bisa berbalik menjadi sebuah bom waktu yang siap meledak manakala

⁹ Total anggaran pendidikan yang diamanahkan oleh UU sudah mencapai 20%, tetapi kualitas pendidikan belum menunjukkan arah perbaikan. Ini terbukti dari peringkat HDI yang semakin turun. Lihat UNDP, 2012.

¹⁰ Ternyata anak Indonesia usia 15 tahun keatas yang mampu menyelesaikan pendidikan setingkat SMA sangat sedikit. Lihat *Laporan Badan Pusat Statistik (BPS)*, 2012.

pertumbuhan ekonomi negara gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang cocok bagi mereka.¹¹ Dan pada saat itu, tahun 2030, tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara yang lain, semuanya bebas berkompetisi untuk mengisi ruang kosong yang tidak mampu dimanfaatkan oleh warga negara.

Ketimpangan Struktural

Sebagai seorang strukturalis, Faisal Basri menilai bahwa banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang dimiliki bangsa ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Modal dasar yang dimiliki perekonomian nasional seperti sumber daya alam yang melimpah dan jumlah populasi usia produktif terbesar sepanjang sejarah seolah belum cukup untuk mengelola perekonomian nasional menuju masyarakat yang sejahtera. Momentum perubahan rezim pada tahun 1998 ternyata belum mampu menjadikan mesin birokrasi efektif dan efisien, bahkan muncul indikasi kuat bahwa kehadiran negara dalam mengelola perekonomian justru semakin melemah, sangat bertolak belakang pada masa Orde Baru yang kemudian menimbulkan *abuse of power*. Anomali peran pemerintah di pentas kekuasaan, yang disebut Faisal sebagai pendulum yang bergerak ke ekstrem yang berkebalikan, harus segera dicarikan jalan keluarnya. Perdebatan kembali kepada pola peran negara dan pasar dalam perekonomian.

¹¹ Lihat Anies Baswedan, "Tantangan Dunia Pendidikan di Indonesia," <http://indo.wsj.com/posts/2013/10/09/tantangan-dunia-pendidikan-di-indonesia/> (diakses pada 10 November 2013).

Cara pandang ekonomi neoklasikal, yang selama ini memengaruhi para pengambil kebijakan, ternyata tidak cocok diterapkan dalam perekonomian nasional, tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara sedang berkembang lainnya. Aliran ekonomi neoklasikal yang percaya kepada kebebasan ekonomi dan mengandalkan superioritas mekanisme pasar pada kenyataannya justru menimbulkan bahaya eksploitasi bagi perekonomian. Hal ini terlihat pada bagaimana pola hubungan yang terbangun antara negara kuat terhadap negara lemah yang cenderung eksploitatif, pengusaha yang menguasai sumber daya ekonomi cenderung tidak peduli dengan pengusaha kecil, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan struktural yang sangat parah,¹² sehingga yang timbul adalah persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan kerusakan lingkungan.

Krisis keuangan yang berujung kepada krisis ekonomi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan ilmu ekonomi yang berbasiskan kepada pandangan ekonomi neoklasik.¹³ Seperti disampaikan Schumpeter dalam *History of Economic Analysis*, ilmu ekonomi yang berbasis kepada pencarian kapital semata telah menciptakan suatu kerangka pikiran rasional, telah menghancurkan otoritas moral dan begitu banyak lembaga, pada akhirnya akan menghancurkan ilmu ekonomi itu sendiri.¹⁴

¹² Lihat Galbraith, 1992: 86-88.

¹³ Fakta sejarah mengungkapkan bahwa dalam satu abad terakhir, tidak ada satu negara pun yang luput dari krisis ekonomi. Lihat Davies (1996).

¹⁴ Joseph Schumpeter telah menyampaikan pesan mengenai

Krisis keuangan yang kemudian membesar menjadi krisis ekonomi, telah menjadi masalah besar bagi semua bangsa di dunia.

Menjadi sangat dilematis bagi negara berkembang, di saat kebutuhan investasi dari luar negeri dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi justru akan menimbulkan masalah tersendiri bagi perekonomian sebuah negara. Arus modal dan barang dari negara maju dalam hal ini negara kaya ke negara yang sedang berkembang tidak bisa terbendung. Akibatnya penguasaan aktivitas ekonomi hanya dilakukan oleh segelintir pelaku ekonomi semata yang memiliki akses modal dan barang. Dampaknya adalah perekonomian di negara berkembang menjadi sangat bebas dan liberal. Terjadi pergeseran dan perubahan struktur ekonomi dan pasar di negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah sebuah negara tidak lagi dominan dalam mengatur dan menjalankan kebijakan ekonomi sesuai dengan konstitusi negaranya. Semuanya diatur dalam bingkai pasar bebas. Lebih jauh, pasar bebas lebih mementingkan keuntungan ekonomi dan mengabaikan manfaat ekonomi, sehingga menggeser rakyat dari tanah dan usaha usaha ekonominya. Sehingga mengakibatkan masyarakat tidak lagi menjadi tuan rumah di negerinya

Dalam perjalanannya, konsep pasar bebas yang dipraktikkan di negara-negara berkembang telah memperlihatkan terjadinya ketimpangan struktural, yang kemudian mendorong terbentuknya polarisasi

bahaya yang mengancam perekonomian di banyak negara. Lihat Schumpeter, 1972: 305.

dan kesenjangan sosial ekonomi. Kondisi tersebut telah membentuk polarisasi pelaku ekonomi yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif. Akibatnya para pelaku ekonomi lokal akan semakin terdesak dan akhirnya kehilangan kedaulatan ekonominya di tanahnya sendiri. Paham neoklasikal berdasar mekanisme persaingan pasar-bebas yang selama ini mendominasi pengambilan keputusan terbukti tidak mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural yang ada di pasar. Oleh karena itu perlu pemikiran strukturalisme yang berorientasi pada strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi disertai intervensi mengatur dan mengontrol mekanisme pasar.

Sebagai contoh, mengenai hubungan antara pasar modern dan pasar tradisional telah menjadi isu besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Jumlah pasar tradisional selalu mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir¹⁵. Salah satu pemicu terjadinya penurunan tersebut adalah bermunculannya pasar modern dalam bentuk ritel besar, baik yang berskala mini market, super market dan hypermarket. Tidak terkontrolnya pertumbuhan ritel modern dalam bentuk pasar modern telah berdampak cukup signifikan terhadap para pedagang pasar tradisional yang berada di sekitar ritel modern tersebut.

Tidak bisa dipungkiri, semenjak terbukanya jasa perdagangan ritel bagi penanaman modal asing (PMA) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres), di mana perdagangan eceran skala besar seperti super-

¹⁵ Lihat Collett dan Wallace, 2006: 14-15.

market, hypermarket dan pusat pertokoan dan belanja lainnya menjadi terbuka bagi PMA.¹⁶ Semenjak itu telah terjadi perubahan struktur pelaku pasar dalam perekonomian nasional, yang kemudian melahirkan dikotomi antara pasar modern atau ritel modern dengan pasar tradisional atau ritel tradisional.

Liberalisasi sektor perdagangan ritel tersebut telah mengancam keberadaan pasar tradisional yang berjumlah sekitar 13.450 unit di seluruh Indonesia, di mana para pedagang pasar mencapai 17,1 juta orang. Dalam perkembangannya, pertumbuhan ritel modern tersebut bertolak belakang dengan pertumbuhan pasar tradisional. Yang lebih memprihatinkan adalah ritel modern yang punya omset Rp 70,5 trilyun hanya akan membaginya kepada sekitar 28 pemain utama, sebaliknya ritel tradisional dengan omset Rp 156,9 trilyun harus dibagi kepada sebanyak 17,1 juta pedagang, di mana 70% di antaranya masuk kategori informal .

Perlu dicari penyelesaian yang paling tepat, bagaimana mengelola hubungan antara usaha besar dan usaha kecil yang saling memberikan keuntungan satu dengan yang lain. Peran pemerintah adalah mengatur dan mengelola hubungan antara pelaku bisnis tersebut, sehingga nantinya akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Faisal Basri menyebut dengan istilah kontrak sosial baru yang menyeimbangkan peran komunitas bisnis,

¹⁶ Melalui Keppres No 96/2000 dan diperbarui dengan Keppres No 118/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal. Lihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2007: 3-4.

komunitas politik dan *civil society*. Kita tidak bisa menutup mata, pelaku bisnis besar, menengah dan kecil adalah potensi dalam menggerakkan ekonomi nasional. Pola hubungan yang terbentuk adalah membentuk hubungan ekonomi yang partisipatori-emansipatori, terbentuk pola kemitraan yang saling menjaga dan memiliki satu dengan yang lain¹⁷. Oleh sebab itu, kita perlu mendefinisikan formulasi yang tepat, agar ketimpangan struktural tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Menata Kembali Perjalanan

Faisal Basri menggunakan istilah konsensus baru untuk mencari titik temu dalam merumuskan langkah bangsa ke depan. Tetapi, Faisal kurang memulai pembahasan dari prinsip dasar dan konstitusi negara yang sudah kita miliki selama ini dalam Pancasila dan UUD 1945. Sesungguhnya Pasal 33 UUD 1945 telah menjadi dasar dari terbentuknya demokrasi ekonomi. Dalam penyusunan dasar-dasar perekonomian negara, para pendiri bangsa telah menjadikan pasal tersebut sebagai fondasi dasar yang kokoh, sehingga menjadi inspirasi dari konsep pembangunan ekonomi nasional.¹⁸ Dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 33 telah terintegrasi dan menjadi satu kesatuan

¹⁷ Sri-Edi Swasono, mengungkapkan salah satu tujuan transformasi adalah memperbaiki kondisi struktural ekonomi yang sangat timpang. Lihat Swasono, 2010: 16.

¹⁸ Mohammad Hatta adalah tokoh utama di balik lahirnya Pasal-pasal 27, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945). Hatta tentu mengenal dengan sangat mendalam karakteristik bangsa Indonesia, dan tantangan yang dihadapinya di kemudian hari. Konteks pemikiran Hatta tersebut tentu masih sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi perekonomian nasional dewasa ini. Lihat Swasono, 2010: 15.

sebagai dasar negara. Karakteristik pasal 33 adalah pasal mengenai keekonomian yang berada pada bab XIV, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan dan keadilan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan bangsa. Ini sudah merupakan modal dasar dalam menata kembali perekonomian nasional.

Perekonomian Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi yang sangat kuat. Para pendiri bangsa telah memikirkan dasar dan fundamental ekonomi yang bisa menghadapi kondisi ekonomi jauh ke depan. Perekonomian nasional sudah dipersiapkan secara sungguh-sungguh untuk menghadapi globalisasi ekonomi, sistem ekonomi nasional juga tidak menolak interdependensi ekonomi internasional, sehingga kecil kemungkinan terjadinya dependensi ekonomi nasional terhadap ekonomi internasional. Walaupun demikian pengaruh dan paham pemikiran ekonomi yang sudah mengglobal tetap perlu diwaspadai dampak dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Perekonomian nasional diharapkan tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian dunia yang sudah terintegrasi, dan mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dengan memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga akan tercipta hubungan yang saling memperkuat satu dengan yang lain.

Bahkan semenjak awal kemerdekaan, Mohammad Hatta menegaskan ulang bahwa pembangunan perekonomian Indonesia yang kita hadapi adalah, pertama, soal ideologi. Bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Kedua, soal praktik. Politik perekonomian

apakah yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa datang ini. Ketiga, soal koordinasi. Bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan di seluruh dunia.¹⁹

Pandangan-pandangan tersebut telah menunjukkan bahwa globalisasi telah sejak awal kemerdekaan diantisipasi oleh Mohammad Hatta, sejalan dengan tulisan-tulisannya sejak tahun 1934. Selain itu, bagi Hatta, kemandirian bukan pengucilan diri, kemandirian bisa dalam wujud dinamikanya, yaitu interdependensi. Dalam interdependensi global dan ekonomi terbuka, perekonomian nasional tetap teguh mempertahankan prinsip independensi, yaitu dengan memberikan kesempatan pada bangsa asing menanam modalnya di Indonesia, namun kita sendirilah yang harus tetap menentukan syarat-syaratnya.

Dengan memiliki landasan dan dasar yang kuat tersebut, kita bisa menyusun sebuah pola yang sudah menjadi bagian dari perekonomian nasional. Pola akan membentuk sebuah transformasi ekonomi, kemudian diikuti dengan transformasi sosial budaya yang kemudian menghasilkan struktur dan sistem ekonomi Indonesia yang benar-benar sesuai dan sejalan dengan landasan dan dasar perekonomian nasional yang sudah disusun oleh para pendiri bangsa. Pada bagan III di bawah ini terlihat bagaimana pola yang terbentuk dalam proses transformasi ekonomi nasional, sangat berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang sudah dijalankan selama ini

¹⁹ Disampaikan oleh Mohammad Hatta dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1964. Lihat Swasono, 2008: 42.

Bagian terakhir dari tulisan Faisal Basri semakin memperlihatkan, bagaimana pengaruh *institutional economics* sangat mempengaruhi cara pandang Faisal Basri dalam mencari solusi penyelesaian masalah perekonomian nasional. Momentum reformasi tahun 1997-1998 ternyata gagal membangun institusi ekonomi dan politik yang inklusif, yang lebih mengedepankan partisipasi luas masyarakat dalam berpolitik dan berekonomi, menjamin terciptanya redistribusi kekayaan nasional kepada seluruh masyarakat. Sehingga cita-cita mewujudkan keadilan sosial bukan lagi sekedar angan-angan belaka. Tetapi dalam kenyataan, institusi ekonomi dan politik kembali terseret kepada institusi ekonomi dan politik yang ekstraktif. Institusi politik dan ekonomi harus dikembalikan kembali kepada fungsinya semula, sebagai pelayan dan pelindung bagi masyarakat, mampu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat.

Inspirasi dalam membangun konsensus baru juga diungkapkan oleh Nurcholish Madjid, ketika membangun masyarakat madani yang plural ke dalam bentuk Piagam Madinah, suatu wujud dari kontrak sosial yang dibangun berdasarkan kejujuran dan kebajikan, memperlakukan semua masyarakat sama tanpa membedakan status sosialnya.²⁰ Sama seperti yang pernah diungkapkan Umer Chapra, merupakan hal yang mustahil untuk merealisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan tanpa dilandasi oleh *humanitarian mechanism* yang sederhana.²¹ Pendapat Chapra tersebut diperkuat oleh Monzer Kahf yang menyatakan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk

²⁰ Lihat Madjid, 1995.

²¹ Lihat Umer Chapra, 2001: 20-24.

pemenuhan kebahagiaan seluruh umat manusia. Implikasi dari pandangan tersebut adalah pandangan persaudaraan universal, yang kemudian menimbulkan persamaan sosial dan menjadikan sumber daya alam sebagai amanah, karena statusnya sebagai wakil Tuhan yang menciptakan alam semesta.²² Pandangan ini tidak akan terlaksana secara substansial tanpa dibarengi dengan keadilan sosial-ekonomi.

Faisal Basri menyadari betul bahwa wacana membangun konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak sekedar menjadi wacana akademis belaka, tetapi dia harus hadir dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan di negeri ini. Faisal Basri berkeyakinan membangun bangsa ini tidak boleh hanya memfokuskan pada peran salah satu sektor saja, apakah itu negara atau pasar, dengan mengesampingkan peran yang lain. Tetapi harus ada titik temu dan keseimbangan antara peran pasar dan negara, tidak boleh ada dikotomi antara keduanya, dengan mengembalikan fungsi dan peran negara kepada fungsi semula, dan melakukan transformasi terhadap peran pasar dalam perekonomian. Salah satu fungsi negara yang harus segera diprioritaskan adalah membangun sistem perangkat atau jaringan perlindungan sosial bagi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi harmonisasi antara pengusaha dan pekerjanya. Dengan demikian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi akan bisa terjaga dengan baik.***

²² Lihat Kahf, 1978: 34-35.

Rujukan

- Basri, Faisal (2002), *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Penerbit Airlangga).
- Basri, Faisal dan Haris Munandar (2009), *Lanskap Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenanda).
- Baswedan, Anies (2013), "Tantangan Dunia Pendidikan Indonesia," <http://indo.wsj.com/posts/2013/10/09/tantangan-dunia-pendidikan-di-indonesia/> (diakses pada 10 November 2013).
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2012), *Laporan Tahunan* (Jakarta: BPS).
- Chapra, Umer (2001), *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation).
- Collett, Paul and Tyler Wallace (2006), *Background Report: Impact of Supermarkets on Traditional Markets and Small Retailers in the Urban Centers* (Jakarta: SMERU Research Institute).
- Davies, Glyn (1996), *The History of Money From Ancient time of Present Day* (Cardif: The University of Wales Press).
- Galbraith, John Kenneth (1992), *The Culture of Contentment* (Boston: Houghton Mifflin).
- Kementerian Keuangan (2009), *Nota Keuangan dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2010* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
- (2013), *Nota Keuangan dan Rencana Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2014* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (2009), *Laporan Tahunan* (Jakarta: Menkop dan UKM).

- Khaf, Monzher (1978), *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System* (Indiana: MSA of USA and Canada).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (2007), *Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern* (Jakarta: KPPU).
- Madjid, Nurcholish (2004), *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- (1995), *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina).
- Myrdal, Gunar (1972), *Asian Drama. An Inquiry in to the Poverty of Nations*, An Abridgment by Seth S. King (New York: Vintage Books).
- Swasono, Sri Edi (2010), *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Goblisme dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pusat Ekonomi Pancasila UGM).
- (2010), *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM).
- United Nations Development Program (UNDP) (2012), *Human Developmen Index: Annual Report* (New York, United Nations Development Program).

Indonesia dalam Pusaran Perekonomian Global: Respons dan Agenda Domestik

A. PRASETYANTOKO

Pengantar

Paper Faisal Basri berjudul “Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan” sangat menarik dicermati. Tulisan yang disampaikan dalam rangka Nurcholish Majid Memorial Lecture (NMML) di Universitas Paramadina ini sungguh menggugah dari berbagai sisi. Paling tidak ada dua hal pokok yang bisa ditarik sebagai esensi pemikiran, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam artikel ini. Pertama, ditunjukkan betapa perekonomian Indonesia bergerak cenderung tanpa arah yang jelas, sehingga berisiko tidak berpihak pada kelompok kurang beruntung (*underprivileged people*). Kedua, mekanisme pasar tidak bisa bekerja sendiri tanpa peran negara. Secara implisit tersirat pula bagaimana kita gagal merumuskan kebijakan yang memaksimalkan kepentingan domestik.

Kedua butir esensi pemikiran bermuara pada sebuah kerangka cita-cita besar keadilan sosial yang cenderung terkoyak menghadapi dinamika global akhir-akhir ini. Keadilan, selain kemanusiaan, adalah dua pilar yang merupakan alasan adanya (*raison d'être*) mengapa sistem perekonomian ini ada serta mengapa bangsa ini terus hidup dan berkembang. Adalah tugas kita sebagai penerus bangsa untuk mengupayakan secara maksimal esensi kemanusiaan dan keadilan dalam tatanan perekonomian kita. Bertumpu pada gagasan besar tentang relasi antara sistem perekonomian dan realitas keadilan, sebagai sebuah respons, tulisan ini akan berfokus pada dua hal pokok. Pertama, melihat bagaimana dinamika perekonomian Indonesia akhir-akhir ini dalam dinamika global. Kedua, bagaimana respons dan agenda domestik semestinya dibangun dalam konteks dinamika global tersebut demi terwujudnya cita-cita besar perekonomian Indonesia.

Dalam kacamata awam, tak sulit menunjukkan betapa keadilan belum terwujud dalam dinamika perekonomian kita. Sementara itu, dinamika global terus menyeret kita masuk dalam putaran yang semakin kencang. Ada risiko, kita makin terjebak dan tak bisa keluar dari pusaran tersebut, dengan terus meninggalkan korban-korban yang berserakan. Dengan demikian kita akan semakin menjauhkan cita-cita keadilan dalam sistem perekonomian domestik kita. Paska krisis global 2008, Indonesia justru menjadi salah satu pemain kunci dalam kelompok negara maju (G-20). Pada 2013, kita juga menjadi tuan rumah perhelatan besar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan

pertemuan tingkat menteri World Trade Organization (WTO). Sementara 2015 adalah tenggat waktu dimulainya ASEAN Economic Community (AEC). Semua itu menunjukkan kita semakin eksis dalam percaturan global. Lalu, bagaimana kita sendiri mempersiapkannya? Dan apakah dinamika regional-global tersebut memberikan prospek lebih baik bagi kemanusiaan dan keadilan, atau sebaliknya?

Nasihat penting yang tak boleh dilupakan, sebagaimana sering dikatakan oleh J.M. Keynes, ilmu ekonomi tidak boleh bersifat *counter-intuitive* atau berlawanan dengan akal sehat orang kebanyakan. Kita memang terkadang melupakan akal sehat dan berjarak dengan realitas empirik serta asyik bergumul dengan hal-hal normatif dan teoritis yang mengawang-awang. Tak jarang, kecanggihan abstraktif yang berlumur dengan berbagai macam kerangka teoritis dan pengujian matematis membuat kita terjebak untuk membenarkan proses, sistem dan kebijakan tertentu tanpa melihat pada realitas empirisnya. Padahal, ilmu ekonomi juga harus punya kerangka dan fondasi etis tertentu¹.

Karena itu, upaya pencarian cita-cita keadilan melalui dialektika dunia real dan konseptual selalu menarik untuk dilakukan terus-menerus. Tulisan ini akan dimulai dengan melihat perkembangan dinamika perekonomian Indonesia di tengah dinamika global. Pusaran dan jebakan apa saja yang berpotensi

¹ Sebelum menulis *The Wealth of Nations* pada 1776 yang sangat terkenal, Adam Smith terlebih dahulu menulis buku berjudul *The Theory of Moral Sentiments*, yang dianggap sebagai landasan etis dari sistem pasar yang banyak dibahas di tulisan-tulisan setelahnya.

menjerat kita. Dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai agenda domestik yang harus direspons melalui berbagai kebijakan yang terarah dan terorganisir, selain memiliki roh yang benar atau berorientasi pada dimensi keadilan.

Indonesia: Antara *Booming* dan *Bursting*

Akhir-akhir ini kita menyaksikan betapa perekonomian global berkembang begitu cepat. Kita terhenyak dengan krisis yang melanda perekonomian Amerika Serikat (AS) pada 2007-2008 lalu. Tak pernah disangka sebelumnya, perekonomian AS yang begitu megah tiba-tiba saja runtuh dan seakan tak tertolong lagi. Ada goncangan dalam sistem keuangan global; dan perekonomian kita pun tak luput dari gejala tersebut.

Pada 2008, nilai tukar kita melemah sekitar 16% hingga menyentuh nilai terendahnya pada Rp 12.400. Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkoreksi lebih dari 50% dari level 2.600-an menjadi 1.300 an. Respons kebijakan moneter pada waktu itu menjadi kontraktif dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI rate*) menjadi sekitar 9,25%. Likuiditas benar-benar mengetat, sehingga ekspansi kredit menurun drastis dan pertumbuhan ekonomi pada 2009 terkoreksi menjadi 4,6%. Padahal, pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 6% (2008), dan 6,4% pada 2007.

Namun siklus krisis tak lama terjadi. Setahun kemudian, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah kembali pada fase *fast track* dengan pertumbuhan sebesar 6,2% pada 2010 dan 6,5% pada 2011. Sebuah prestasi yang membanggakan karena bisa relatif stabil tum-

buh di atas 6% selama beberapa tahun. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi kita masih mampu tumbuh sebesar 6,2%. Artinya, selama beberapa tahun terakhir kita mampu tumbuh secara rata-rata cukup tinggi dan relatif stabil. Periode antara 2010 hingga 2012 benar-benar sebuah periode *bullish*. Karena itu, *BI rate* juga bisa ditekan relatif rendah sebesar 5,75% dalam kurun waktu yang cukup panjang.²

Sebelum krisis 2008, beberapa ahli strategi investasi, terutama investasi portofolio, sudah melihat begitu potensialnya negara berkembang. Dan ketika krisis terjadi, seakan mereka mendapatkan legitimasi dari berbagai prediksi dan proyeksi yang telah mereka kemukakan sebelumnya. Akibatnya, banyak lembaga investasi global kebanjiran dana kelolaan untuk ditanamkan ke negara berkembang. Para investor global tersihir oleh proyeksi yang seakan-akan begitu akuratnya, sehingga tak berpikir panjang menyerahkan dana kelolaan mereka dalam jumlah besar dan berekspektasi mendapatkan keuntungan di pasar-pasar keuangan negara berkembang.

Pada 2005, Jim O'Neill, seorang kepala riset di Goldman Sachs, sebuah lembaga investasi besar, mempopulerkan singkatan Brazil, Rusia, India dan China (BRIC). Singkatan yang menyihir persepsi dunia ini memunculkan optimisme luar biasa, sehingga setelah itu keluar berbagai singkatan dengan ramalan yang substansinya kurang lebih sama. Setelah sukses meluncurkan singkatan BRIC, O'Neill bersama Goldman Sachs memperkenalkan istilah "The Next 11

² Lihat Peraga 30: "Grafik Tren Pertumbuhan dan *BI Rate*" di bagian lampiran buku ini, hal. 162.

countries” atau N-11.³ Mereka merumuskan proyeksi bahwa ke-11 negara ini adalah kelompok negara yang akan segera mengikuti sukses kelompok BRIC. BRIC dan N-11 mengingatkan kita pada formulasi “angsa terbang” (*flying geese paradigm*) yang populer sebelum krisis 1998 untuk menggambarkan tahapan industrialisasi di Asia yang menyerupai konfigurasi angsa terbang.⁴

Tak puas dengan akronim BRIC dan N-11, Jim O’Neil kembali meluncurkan singkatan MIKT (Mexico, Indonesia, Korea Selatan dan Turki). Akronim terakhir ini kurang begitu sukses dan tidak banyak dikenal publik. Goldman Sachs tak sendiri. Morgan Stanley, lembaga investasi lainnya, pada Mei 2009 juga merilis sebuah laporan yang secara spesifik memperhitungkan Indonesia.⁵ Laporan ini menyebut secara eksplisit Indonesia harus diperhitungkan untuk masuk dalam kelompok BRIC. Alasannya, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, dan memiliki komoditas unggulan seperti batubara dan minyak sawit (CPO). Argumennya sangat gamblang menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam rantai pasokan nilai (*supply-chain*) yang sangat dekat dengan perekonomian China dan India.

Laporan serupa juga disusun oleh CLSA,⁶ lem-

³ The Next 11 Countries terdiri dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Filipina, Turki, Korea Selatan, dan Vietnam

⁴ Dipopulerkan oleh Akamatsu, seorang sarjana Jepang yang menulis paper berjudul “A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries” di *Journal of Developing Economies*, Edisi 1(1): 3-25, Maret-Agustus, 1962.

⁵ Laporan tersebut berjudul *B-R-I-C Should Include Indonesia*.

⁶ CLSA adalah lembaga investasi besar juga. Pada Mei 2009,

baga investasi besar juga, pada waktu yang hampir bersamaan dengan laporan Morgan Stanley. Dua laporan ini menunjukkan korelasi yang sangat ketat antara perekonomian Indonesia dengan China dan India. Sederhananya, bila China dan India tumbuh tinggi, secara alamiah perekonomian Indonesia juga lebih dinamis. Alasannya, Indonesia merupakan negara utama pemasok sumber energi bagi China dan India. Dua laporan ini sudah sangat jelas menunjukkan betapa pertumbuhan Indonesia sangat mengandalkan dua komoditas utama (batubara dan CPO) serta tergantung pada perekonomian China dan India.

Laporan lain yang juga menina-bobokkan pemerintah kita adalah laporan yang disusun oleh Standard Chartered Bank.⁷ Kinerja perekonomian Indonesia dipuja-puji secara luar biasa, tak hanya oleh lembaga investasi, namun juga oleh media-media barat, seperti *New York Times*,⁸ *Economist*,⁹ *Wall Street Journal*, *Financial Times* dan masih banyak lainnya. Sebelumnya, Economist Intelligence Unit (EIU), unit riset dari *Economist*, pada 2008 juga meluncurkan sebuah singkatan, yaitu CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey dan South Africa).

Evaluasi dari lembaga-lembaga investasi terse-

lembaga ini merilis laporan berjudul *Chindonesia – China, India and Indonesia being Asia's next growth triangle*.

⁷ Laporan berjudul *Indonesia: Asia's emerging powerhouse* (Sept 2009).

⁸ Edisi 5 Agustus 2010 menurunkan tulisan berjudul *After Years of Inefficiency, Indonesia Emerges as an Economic Model*.

⁹ Pada edisi 10 Sept-2009 memuat laporan khusus berjudul *Indonesia's future: A golden opportunity*.

but bukan berhenti pada publikasi laporan riset, melainkan lebih jauh lagi diturunkan dalam racikan portofolio investasi yang mereka tawarkan. Misalnya, Standard & Poor's menyusun *CIVETS 60 Index* yang menawarkan kriteria bagi investor ke mana sebaiknya kelebihan likuiditas yang mereka miliki ditanamkan. Pada Mei 2011 HSBC juga melansir investasi berbasis CIVETS dengan tawaran bisa memberikan imbal hasil lebih dari 25 persen, melebihi investasi di luar kelompok CIVETS. Begitupula dengan Goldman Sachs yang bersama dengan Castlestone Management menawarkan racikan investasi "Next 11 funds". Riset dan publikasi menjadi justifikasi bagi produk-produk yang mereka tawarkan. Atau sebaliknya, keyakinan mereka yang tertuang dalam riset dan laporan memberikan keyakinan pada mereka untuk menawarkan produk-produk investasi yang menggiurkan. Dua-duanya sangat jelas berkorelasi dengan ekpektasi keuntungan di masa depan.

Berbagai laporan oleh lembaga investasi dan media ekonomi juga mendorong lembaga pemeringkat memberikan predikat layak investasi pada Indonesia. Pada Juli 2010, Japan Credit Rating Agency Ltd. menjadi lembaga pemeringkat pertama yang memberikan predikat "investment grade" (BBB-) pada Indonesia. Pada Januari 2012, Moody's juga memberikan predikat layak investasi. Hanya Standard and Poor (S&P) yang belum menaikkan Indonesia pada level investasi.

Puncak dari terbiusnya para birokrat terhadap sihir para konsultan terjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan *keynote speech* pada peluncuran laporan riset oleh McKinsey &

Co., berjudul *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential* pada September 2012. Rilis laporan oleh seorang presiden dari sebuah negara besar dan makmur ini sekaligus menutup seremonial pemujaan tentang Indonesia. Begitu memasuki 2013, banyak pihak mulai menyadari betapa ringkihnya perekonomian Indonesia. Selepas kuartal I 2013, tak terdengar keras lagi suara-suara yang memuji kinerja perekonomian Indonesia. Beberapa riset dari lembaga investasi sudah mulai memberikan peringatan akan bahaya perekonomian Indonesia.

Memasuki kuartal II 2013, fase muram perekonomian Indonesia mulai terasa. Sebuah laporan yang dirilis oleh Credit Suisse¹⁰ pada Mei 2013 menunjukkan titik balik perekonomian Indonesia. Dalam laporan tersebut dijelaskan potensi perlambatan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh berakhirnya *booming* harga komoditas di pasar dunia. Sebenarnya laporan ini sangat sejalan dengan laporan-laporan sebelumnya yang penuh pujian. Dan situasinya memasuki kuartal III 2013 memang mulai melemah secara signifikan. Meskipun tanda-tanda perlambatan sebenarnya sudah terasa pada akhir 2012 atau awal 2013. Mengapa perekonomian Indonesia dipuja? Karena kinerjanya yang menyakinkan didorong oleh dua motor penggerak, yaitu kenaikan harga komoditas (batubara dan minyak sawit) serta melimpahnya likuiditas global. Ketika harga komoditas jatuh, secara alamiah, fase *booming* tersebut segera beralih ke fase *bursting*.

¹⁰ Rilis berjudul *Indonesia Economy: The End of the Investment Boom*.

Tak ada yang istimewa dari laporan-laporan yang menyedot perhatian publik, media dan investor global tersebut. Banyak ekonom domestik sebenarnya sudah banyak yang meningkatkan keringkahan struktur ekonomi kita tersebut. Bahkan masyarakat awam tanpa membutuhkan data serta teknik pengujian yang rumit, sudah bisa melihat kelemahan perekonomian kita. Dengan melihat *trend* data saja terlihat betapa investasi sudah mulai menurun di akhir 2012, akibat melemahnya harga komoditas. Sesuatu yang mungkin luput dari perhatian publik adalah ternyata selama ini investasi yang bergerak sebagian besar berpusat pada sektor pertambangan dan perkebunan. Begitu harga komoditas jatuh, terutama sektor pertambangan langsung terkoreksi tajam. Investasi pun mengikuti pola yang sama dengan koreksi pertumbuhan sektoral tersebut.

Pada kuartal kedua 2013, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,8% dari 6% pada kuartal pertama. Sepanjang 2013 pertumbuhan ditaksir tak lebih dari 5,6%, sementara pertumbuhan 2014 masih diperdebatkan, berapa pertumbuhan perekonomian kita. Grafik (Peraga 30, hal. 162) menunjukkan tahun 2014 diperkirakan tumbuh 6%, meskipun sejatinya agak berat, mengingat berbagai persoalan fundamental dan struktural masih menghantui perekonomian kita, baik pada level domestik maupun global.

Salah satu penyebab penurunan pertumbuhan adalah melemahnya sektor pertambangan. Sudah sejak kuartal pertama 2012, pertumbuhan sektor pertambangan mulai melambat, hingga pada akhir 2012 mulai tumbuh negatif. Dari data ini terlihat sektor pertambangan telah menjadi pendorong utama dari

perlambatan ekonomi. Dengan kata lain, bagusnya pertumbuhan ekonomi kita selama beberapa tahun terakhir banyak ditopang oleh sektor pertambangan. Dan perkembangan sektor perbankan sangat dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar global.¹¹

Jika dilihat dari data di bawah ini (Peraga 32, hal. 164), terlihat bahwa selain ekspor yang terus merosot, investasi juga mulai menurun sejak pertengahan 2012. Penyebab merosotnya dua komponen ini juga terkait dengan penurunan harga komoditas. Sekali lagi data menunjukkan perekonomian kita begitu tergantung pada komoditas primer. Dan investasi langsung (FDI), terutama dari investor global, sebagian besar masuk ke sektor komoditas. Begitu ada koreksi harga komoditas, investasi di sektor tersebut juga terhenti. Dari sisi ekspor, meskipun volumenya tetap, tetapi karena ada penurunan harga komoditas, maka penerimaan kita berkurang. Apalagi, ekspor non-migas sama sekali tak mampu mengkompensasi penurunan harga komoditas tersebut, mengingat permintaan dari negara maju belum pulih, akibat krisis berke-panjangan. Dari sisi ekspor dan investasi, kita benar-benar tertekan mulai 2013 dan 2014.¹²

Lebih jauh lagi, ketergantungan perekonomian Indonesia pada ekspor sektor primer di satu sisi, dan merosotnya harga komoditas di pasar dunia di sisi lain, telah menimbulkan komplikasi yang akut pada sisi neraca perdagangan kita. Pada Juli 2013, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar 2,31 miliar USD. Defisit perdagangan terjadi seiring dengan be-

¹¹ Lihat Peraga 31: "Grafik PDB Berdasarkan Sektor", hal. 163.

¹² Lihat Peraga 32: "Grafik PDB Berdasarkan Pengeluaran Pemerintah", hal. 164.

rakhirnya *booming* harga komoditas, dan pendapatan ekspor terus menurun. Impor terbesar bahan baku/ penolong (13 miliar USD), Barang Modal (3 miliar USD) dan Barang Konsumsi (1,3 miliar USD).

Selain ketergantungan pada ekspor komoditas, perekonomian kita juga begitu tergantung pada bahan baku dan bahan penolong dari impor. Sudah sejak kuartal II 2009, impor bahan baku terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi mendorong impor bahan baku yang tinggi, karena tidak tersedia di pasar domestik. Inilah salah satu bentuk kemalasan pemerintah yang tak mampu menumbuhkan bahan baku dan bahan penolong di dalam negeri. Perekonomian kita mengidap penyakit serius, berupa hilangnya industri perantara. Perekonomian kita keropos di tengahnya atau “missing middle”. Gejala ini menandai tipikal perekonomian yang tak bisa bersaing di pasar global.¹³

Dilihat dari dinamika di pasar modal, terlihat kontribusi sektor pertambangan dan agribisnis sangat signifikan dalam menggerakkan pasar. Kemerosotan dinamika pasar didorong oleh dua sektor utama tersebut, yaitu pertambangan dan agribisnis. Pada awal September 2013, IHSG berada pada level 4,051. Padahal, pada bulan Mei pernah mencapai level tertinggi pada 5,200. Di dalam grafik terlihat bahwa indeks agribisnis dan pertambangan terus menurun setelah mencapai puncaknya pada akhir 2011, dan terutama pada paruh kedua 2013.¹⁴ Sebenarnya, indi-

¹³ Lihat Peraga 33: “Grafik Komposisi Impor”, di bagian lampiran buku ini, hal. 165.

¹⁴ Lihat Peraga 34: “Tabel IHSG dan Indeks Agribisnis dan Pertambangan”, hal. 166.

kator dini (*leading indicator*) dari pengaruh penurunan harga komoditas terhadap perekonomian kita sudah nampak dari dinamika di pasar modal.

Pada awal September, hampir semua indeks tumbuh negatif, kecuali properti dan barang konsumsi. Koreksi terdalam terjadi pada sektor pertambangan (-35,5%) dan pertanian (-30%). Dua sektor tersebut (pertambangan dan pertanian) selama ini menyedot perhatian investor, baik domestik maupun asing, karena margin keuntungan yang sangat tinggi dari emiten yang berbasis pertambangan dan pertanian. Begitu harga komoditas turun, emiten tidak menghasilkan margin keuntungan yang tinggi, sehingga paling banyak dilepas oleh investor.¹⁵

Wake Up Call!: Membangun Pijakan Dasar

Gejolak yang terjadi mulai pertengahan 2013 seakan menjadi dering jam yang mengingatkan kita waktunya bangun. Selama periode tersebut, terutama para birokrat, tertidur akibat bius dan sihir para lembaga investasi dan konsultan yang memberi pujian begitu berlebihan. Pemerintah merasa diri bahwa itulah kinerja mereka selama ini. Padahal, sejatinya kinerja perekonomian kita merupakan derivasi langsung dari dinamika global. Jika dinamika global menguntungkan kita, perekonomian kita tumbuh bagus. Bila tidak, mengempis dengan cepat. Perekonomian Indonesia sering disebut sebagai autopilot, bak pesawat yang tak dikendalikan oleh pilot yang handal. Semuanya berjalan sesuai dengan lingkungan dan cuaca.

¹⁵ Lihat Peraga 35: "Tabel Perubahan Indeks", hal. 167.

Belajar dari pengalaman selama periode 2010-2012 tersebut, agenda penting yang kemudian mengemuka adalah bagaimana harus melakukan intervensi pada perekonomian, agar dinamika perekonomian memiliki arah yang jelas serta tak terombang-ambing oleh cuaca global semata. Intervensi tidak sekedar pemerintah campur tangan, namun justru dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Dalam kata lain, intervensi ditujukan untuk mencapai kesinambungan. Kesinambungan adalah satu hal, sementara pemerintahan adalah hal lain. Dua-duanya perlu diupayakan lewat intervensi pemerintah. Pertumbuhan (*growth*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemerataan (*equity*) adalah tiga komponen yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu hilang, maka tidak menjadi utuh lagi. Dengan demikian, perekonomian menjadi kehilangan rohnyanya.

Campur tangan dalam ekonomi sama sekali tidak ditabukan. Asumsinya, pasar tidak pernah bisa bekerja secara maksimal. Pasar bekerja atas dasar beberapa asumsi pokok. Pertama, semua aktor ekonomi berpikir secara rasional. Padahal, dalam realitasnya rasionalitas adalah sebuah spektrum yang tidak pernah berada pada titik maksimal. Rasionalitas adalah relatif. Rasionalitas yang sempurna tidak pernah ada dalam kenyataannya. Dia hanyalah konsepsi normatif yang ada dalam teori. Kedua, informasi tersedia secara sempurna. Karena itu, pasar bekerja dengan sangat efisien (*efficient market hypothesis*). Sama juga rasionalitas, informasi yang tersedia juga bersifat relatif. Tidak pernah tersedia secara simetris sempurna.

Soal tidak rasionalnya agen ekonomi dan tidak tersedianya informasi secara sempurna telah diulas oleh banyak ahli ekonomi. Hipotesis pasar yang efisien sebenarnya juga tak pernah terjadi. Joseph Stiglitz mendapatkan hadiah Nobel 2001 dalam bidang ekonomi karena menyampaikan konsep mengenai informasi yang tidak simetris. Bersama dengan dua ekonom lainnya, yaitu George Akerlof dan Michael Spence, Stiglitz melihat bahwa tidak mungkin para aktor ekonomi memiliki informasi yang sepadan. Pasti ada bagian yang tidak pernah bisa diungkap sepenuhnya, sehingga akan mempengaruhi rasionalitas agen ekonomi ketika harus mengambil keputusan.

Dengan berbasis pada pemahaman tersebut, bahwa tidak ada sistem pasar yang bekerja secara sempurna, maka dibutuhkan sebuah proses intervensi dari otoritas pemerintah. Namun, dua pilihan ini bukanlah dua hal yang saling menegasi satu sama lain secara eksklusif. Pilihannya hanya dua: sistem pasar atau intervensi. Baik sistem pasar dan intervensi, memiliki risiko yang brutal. Pengalaman perekonomian Asia sebelum krisis 2008 dianggap terlalu banyak intervensi sehingga tidak efisien. Perilaku pemburuan rente (*rent seeking behavior*) biasanya lahir dari intervensi pemerintah.

Sebenarnya ada pendekatan konseptual mengenai biaya transaksi (*transaction cost theory*) yang dipelopori oleh para ilmuwan berhaluan institusionalis gaya baru (*the new institutionalism*), seperti Ronald Coase dan Olivier Williamson¹⁶ yang sangat membantu kita

¹⁶ Baik Ronald Coase (penerima Nobel Ekonomi 1991) maupun

memahami soal pilihan sistem pasar atau intervensi. Sistem pasar bisa diterima sejauh memberikan manfaat yang optimum dengan biaya yang relatif rendah. Dan pada satu titik harus dilakukan intervensi ketika manfaat dengan penerapan sistem pasar sudah mulai menurun, atau tidak maksimum lagi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ketika ada risiko terjadinya kegagalan pasar, maka intervensi harus dilakukan.

Bagaimana kita memahami situasi tersebut dalam konteks perekonomian kita. Pasca krisis 1998, hampir seluruh konstruksi kebijakan perekonomian dilepaskan pada mekanisme pasar. Tak ada satupun tulang punggung kebijakan yang secara solid menjadi pilar penyangga mekanisme pasar. Itulah mengapa, pasca krisis 1998 hampir tak ada kebijakan yang berarti dalam perindustrian. Kita kehilangan kebijakan industrial (*industrial policy*) yang solid. Semuanya disaraskan pada mekanisme pasar.

Salah satu efek terbesar dari pola kebijakan yang bersifat *market-driven* ini kita kehilangan daya saing perekonomian. Banyak persoalan yang kita hadapi hari ini, sebagian besar adalah karena absennya intervensi pemerintah yang salah kaprah. Tak ada pembangunan berarti dalam infrastruktur. Dan ada peta jalan industri nasional, industri penghasil bahan baku dan bahan penolong tak tersedia di dalam negeri. Setiap kebutuhan investasi dan konsumsi selalu diisi oleh barang impor. Itulah mengapa hari ini kita menghadapi persoalan defisit transaksi berjalan yang akut.

Olivier Williamson (penerima Nobel Ekonomi 2009) dianggap memiliki kontribusi penting dalam ilmu ekonomi melalui Teori Biaya Transaksi.

Apakah kita benar-benar tidak memiliki pola intervensi? Kebijakan mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebenarnya diarahkan untuk menata pembangunan dengan cara percepatan dan pemerataan. Dalam dokumen itu sudah tertuang peta jalan serta pemetaan sektoral dan geografis untuk model pengembangan pembangunan perekonomian seluruh kawasan Indonesia. Pertanyaannya, apakah implementasi di lapangan jalan? Dan yang jauh lebih substansial, adakah potensi terjadinya *rent seeking* jauh melebihi manfaat yang harusnya dinikmati, terutama oleh masyarakat setempat (*local people*).

Kevin O'Rouge pernah menulis di harian terkemuka *The Wall Street Journal* (23 Mei 2012) opini berjudul "The Politics of Indonesia's Protectionism," yang isinya mengkritik habis pendekatan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjelang Pemilu 2014. Nuansa berpikir opini tersebut memang cenderung konspiratif, namun tak ada salahnya mencoba menggunakan perspektif tersebut untuk mengkritisi kebijakan yang secara riil dijalankan oleh pemerintah, baik dalam kerangka MP3EI maupun kebijakan lainnya, seperti kewajiban memenuhi pasar domestik (*domestic market obligation*) untuk produk tertentu, penerapan bea keluar maupun kewajiban membangun *smelters* guna mendorong pengolahan komoditas primer di pasar domestik.

Dari seluruh konstruksi berpikir tersebut, persoalan korupsi dan tata kelola benar-benar menjadi jantung. Hari ini sebenarnya tak terlalu penting dan perlu memikirkan apakah kita menganut pasar bebas atau intervensi. Hal lebih mendasar, seberapa

kuat kita bisa menekan praktik korupsi dan perilaku pemburuan rente, baik dalam tatanan yang berbasis pada mekanisme pasar maupun pola intervensi.¹⁷

Jadi kegamangan kita memasuki dinamika global akhir-akhir ini semestinya direspons pertama-tama dengan sikap yang begitu tegas terhadap perilaku korupsi serta pemburuan rente ekonomi. Kita benar-benar tidak akan ke mana-mana dan menjadi apa-apa, dalam sebuah tatanan regional dan global yang terus berubah. Korupsi hanya akan membuat kita menjadi bangsa yang kalah dan tertinggal dari seluruh proses dan dinamika regional dan global tersebut. Sebagai bangsa kita hanya akan menjadi korban. Elit akan mendapatkan keuntungan maksimum, sementara masyarakat pada umumnya mendapat sangat sedikit, sehingga kehidupannya tak berubah menjadi lebih baik. Ketimpangan menjadi isu besar yang harus diselesaikan. Selain karena sistem tidak memungkinkan terjadi pemerataan, ketimpangan diperparah oleh perilaku pemburuan rente ekonomi yang terjadi secara masif di antara kelompok elit masyarakat kita.

Penutup

Tak bisa disangkal, perekonomian kita begitu kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun, kemampuan kita mengelola sumber daya tersebut sangat rendah. Dan masalahnya bukan karena tidak mampu, melainkan tidak mau. Banyak sarjana dan ilmuwan Indonesia yang berhasil di luar negeri. Banyak birokrat kita yang pandai dan

¹⁷ Lihat buku Michael Sandel, *What Money can't Buy: The Moral Limits of Markets* (New York: Pinguin Book: 2012).

berkompetensi tinggi. Namun, kebijakan yang dihasilkan tidak menunjukkan kinerja yang baik. Selain karena masing-masing terjebak pada isu sektoral dan bahkan personal, kita kehilangan pemimpin yang menggerakkan mesin birokrasi mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan rakyat.

Birokrasi dalam pemerintah kita terpenjara oleh sikap dan pandangan yang tidak berorientasi pada kinerja yang baik. Dan jika ditelusur lebih lanjut berujung pada kemampuan kepemimpinan yang lemah dalam mendorong dinamika ekonomi kita ke arah yang solid. Dari dinamika yang dijelaskan di bagian terdahulu, terlihat perekonomian kita terombang-ambing dalam dinamika global. Jika situasi menguntungkan, pertumbuhan kita bagus. Begitu situasi global tidak menguntungkan, perekonomian kita meredup. Secepat itulah dinamika *boom* dan *burst*, sehingga dinamika kita terlihat begitu telanjang, tanpa katalis (peredam) dari dinamika eksternal.

Perekonomian yang besar dan sangat potensial ini sangat miskin pemimpin yang kompeten, bersih dan berpikir untuk kepentingan bangsa. Di luar itu, faktor keberanian mengambil keputusan menjadi kunci penting. Keteladanan dari para tokoh terdahulu, seperti Cak Nur menjadi sangat relevan. Upaya untuk terus menghidupkan cita-cita para tokoh menjadi salah satu upaya mencari dan menemukan arah bangsa, termasuk di bidang perekonomian.***

Rujukan

- Akerlof, G. dan R. Shiller (2010), *Animal Spirit How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism* (Princeton, NJ.: Princeton University Press).
- Dumenil, G., dan D. Levy (2002), *Crisis et renouveau du capitalisme le 20e siècle en perspective* (Paris: Le Presse de l'Universite Laval).
- Harvard Kennedy School Indonesia Program (2011), *From Reformasi to Institutional Transformation: A Strategic Assessment of Indonesia's Prospects for Growth, Equity and Democratic Governance* (Massachusetts: Indonesia Program Rajawali Foundation Institute for Asia, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Harvard Kennedy School).
- O'Neill, J. (2012), *The Growth Map: Economic Opportunity in the BRICs and Beyond* (United Kingdom: Penguin Books).
- Prasetyantoko, A. et al. (eds.) (2012), *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia* (Jakarta: LP3ES dan Prakarsa).
- Prasetyantoko, A. (2008) *Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang Publik*, Cetakan IV (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- (2010), *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Rodrik, D. (2011), *The Globalization Paradox*, (New York: W.W. Norton and Co.).
- Sandel, M. (2012), *What Money can't Buy: The Moral Limits of Markets*, (New York: Pinguin Book).
- UNDP (2009), *Overcoming Barriers: Human Mobility and Development*, (New York: Human Development Report).

World Bank (2010), *Conneting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy* (Washington, DC: World Bank).

World Bank, *Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy* (Washington, DC: IBRD/World Bank).

World Economic Forum (2009), *The Global Enabling Trade Report 2009* (Davos: World Economic Forum).

_____ (2009), *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009* (Davos: World Economic Forum).

_____ (2010), *The Global Competitiveness Report 2009-2010* (Davos: World Economic Forum).

Pasar Kerja Fleksibel dan Keadilan bagi Kaum Pekerja: Tanggapan bagi Faisal Basri

INDRASARI TJANDRANINGSIH

Dalam bukunya *Indonesia Kita*, Nurcholish Madjid menuliskan bahwa salah satu dari 10 platform politik untuk memperbaiki bangsa dan negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan bernegara. Masalah ini juga menjadi perhatian pokok Faisal Basri, dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) yang disampaikannya tahun lalu. Masalahnya sekarang, di Indonesia kini, yang sebagian warganya semakin kaya dan sejahtera, masih lebih besar lagi bagian warganya yang belum menikmati kue kesejahteraan. Bagian besar warga itu adalah kaum pekerja yang dalam sebuah situasi persaingan global menjadi kelompok yang masih harus berjuang untuk dapat mencicipi kue itu. Apa yang terjadi pada pekerja di Indonesia?

Liberalisasi pasar sebagai ciri utama ekonomi dunia saat ini juga menandai pasar tenaga kerja. Kerentanan ekonomi global yang semakin tinggi, yang ditandai oleh krisis yang semakin sering terjadi, membuat penentu utama pasar, yakni kaum pemilik modal, berupaya membuat strategi agar guncangan ekonomi tidak terlalu mendatangkan kerugian bagi usahanya. Salah satu strategi yang ditempuh adalah menerapkan fleksibilisasi produksi dan fleksibilisasi pasar kerja.

Fleksibilisasi pasar kerja diperlukan untuk menggantikan pasar kerja yang terlalu kaku yang ditandai oleh intervensi pemerintah dalam perlindungan pekerja yang membuat biaya tenaga kerja menjadi tidak fleksibel karena jumlah dan jenis pekerja yang digunakan tidak dapat menyesuaikan fluktuasi tekanan persaingan dalam pasar komoditas. Pasar kerja yang fleksibel dipromosikan oleh Bank Dunia karena pasar kerja yang kaku diyakini tidak sesuai lagi untuk kondisi perekonomian global yang semakin kompetitif dan liberal. Sebaliknya Bank Dunia menganggap bahwa pasar kerja yang fleksibel merupakan sistem pasar yang dianggap paling tepat bagi kelompok sosial mana pun (Nugroho & Tjandraningsih 2007).

Liberalisasi pasar kerja dan ketimpangan yang semakin besar di antara para pelaku pasar, khususnya antara pengusaha sebagai pembeli tenaga kerja dan pekerja sebagai penjual tenaga kerja, menjadi salah satu pokok keprihatinan Faisal Basri dalam tulisannya di atas. Tulisan ini hendak menanggapi keprihatinan tersebut dengan menguraikan apa yang terjadi ketika upaya fleksibilisasi pasar kerja secara keras dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha

melalui kebijakan dan praktik ketenagakerjaan.

Ada tiga perubahan yang menyolok yang terjadi di dunia kerja dengan fleksibilisasi pasar kerja. *Pertama*, perubahan dalam arti kemunduran dalam kondisi kerja dan kesempatan kerja di berbagai sektor. *Kedua*, perubahan dalam sektor formal – yang dijadikan andalan penyerapan tenaga kerja sekaligus sebagai salah satu tanda kemajuan ekonomi – yang mengharuskan dilakukannya pemikiran ulang terhadap keunggulan sektor ini dan terhadap dikotomi formal-informal dalam pasar kerja. *Ketiga*, bangkitnya kekuatan gerakan buruh sebagai kekuatan penyeimbang sebagai sebuah situasi anomali dalam iklim pasar yang liberal.

Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena ada ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan ketenagakerjaan dengan kondisi obyektif angkatan kerja, kondisi institusi-institusi pasar tenaga kerja, kebijakan makro perekonomian dan – yang terpenting – menurunnya tanggung jawab negara terhadap perlindungan pekerja dan kesejahteraan warganya (Nugroho & Tjandraningsih, 2007). Dampaknya secara umum menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan industrial yang cenderung merugikan kaum pekerja sebagai kelompok warga negara yang posisinya paling lemah di hadapan negara dan kaum pemilik modal.

Pasar Kerja Fleksibel dan Wujudnya di Indonesia

Gejala pasar kerja fleksibel sebagai ciri utama hubungan kerja mulai muncul di awal tahun 2000-an dan terus meluas hingga sekarang. Sepanjang kurun waktu satu dekade setelahnya, di tingkat implemen-

tasi penerapannya, gejala itu menjadi salah satu sumber kerisauan pekerja dan menjadi penyebab sekaligus pokok masalah dalam konflik industrial di Indonesia. Sementara itu, di tingkat kebijakan, masih terus menjadi perdebatan apakah pasar kerja di Indonesia masih terlalu kaku atau sudah fleksibel. Perdebatan ini mengikuti perdebatan mengenai keuntungan dan kerugian pasar kerja fleksibel yang kemudian membentuk kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap konsep maupun praktik ini.

Pasar kerja fleksibel menjelaskan sebuah situasi di mana pasar kerja dapat cepat menyesuaikan diri dan mencapai keseimbangan dari gejolak ekonomi dan kompetisi. Ciri pokok pasar kerja fleksibel adalah kemudahan untuk merekrut dan memecat pekerja, tenaga kerja yang fleksibel secara jenis pekerjaan dan tempat kerja serta pengurangan intervensi pemerintah yang dapat mendistorsi pasar.

Setidaknya ada tiga prinsip dasar pasar kerja yang fleksibel. *Pertama* adalah keleluasaan transaksi jual-beli tenaga kerja yang diasumsikan berjalan secara alamiah yang mempertemukan antara pembeli dan penjual tenaga kerja. Prinsip ini mengandaikan kekuatan tawar yang seimbang antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Diasumsikan bahwa pembeli tenaga kerja bebas mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pembeli, sedangkan tenaga kerja bebas memilih pembeli tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan rasional tenaga kerja (Islam, 2001).

Kedua, keleluasaan untuk mempekerjakan dan melepas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi yang melindungi pekerja. Prinsip ini menghendaki

dihapuskannya berbagai peraturan pemerintah yang melindungi tenaga kerja agar beban biaya tenaga kerja dapat dikurangi dan agar perusahaan dapat dengan lincah mengambil tindakan ketika terjadi guncangan ekonomi.

Ketiga, keleluasaan untuk menerapkan hubungan dan syarat kerja tanpa gangguan dari serikat buruh. Prinsip ketiga ini melihat bahwa serikat buruh merupakan sebuah entitas kolektif yang menimbulkan biaya tinggi dalam urusan hubungan kerja dan mengurangi kelincahan perusahaan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi guncangan ekonomi, dalam hal ini berkaitan dengan fleksibilitas dalam penggunaan jumlah pekerja. Oleh karena itu peran serikat buruh sebagai basis kekuatan kolektif mulai dikurangi atau setidaknya didorong ke arah bentuk yang lebih korporatis dan sistem kolektivisme dalam hubungan industrial mulai digeser ke arah individualisme. Individualisasi hubungan-hubungan kerja dianggap sebagai kunci penting untuk mendorong produktivitas dan mengurangi kontrol kolektif serikat buruh terhadap kepentingan-kepentingan produksi dan ekspansi modal (Nugroho & Tjandraningsih, 2007).

Ketiga prinsip tersebut mewujudkan dalam bentuk baru hubungan kerja yang mengandalkan sistem kontrak dan *outsourcing* yang merupakan bentuk dari fleksibilitas numerikal dan fungsional (selain fleksibilitas upah dan lokasi). Model hubungan kerja berdasarkan sistem kontrak dan *outsourcing* diterapkan dan diperluas cakupannya untuk memungkinkan fleksibilisasi tersebut. Penerapan hubungan kerja kontrak (*short-term contract workers* atau *temporary*

workers) dan *outsourcing* (*agency workers*) dilakukan untuk mengurangi jumlah pekerja tetap dan dengan demikian mengurangi komponen biaya tenaga kerja.

Di Indonesia penerapan hubungan kerja kontrak dan *outsourcing* merupakan warna dominan hubungan kerja di berbagai pabrik besar dan menengah dan sekaligus menggeser posisi para pekerja tetap. Penelitian di sektor otomotif dan elektronik (Tjandraningsih et al, 2010), garmen (AKATIGA 2011) dan perbankan (Herawati et al, 2011) menemukan bahwa dengan diterapkannya hubungan kerja kontrak dan *outsourcing* telah terjadi pengurangan jumlah pekerja tetap secara signifikan. Seiring dengan pengurangan itu, terjadi pula penurunan kepastian kerja dan kesejahteraan pekerja. Dalam hubungan kerja kontrak – baik kontrak langsung dengan perusahaan maupun melalui pihak ketiga – pekerja hanya menerima upah pokok dan beberapa tunjangan untuk masa tertentu dan ketika hubungan kerja berakhir pengusaha tidak perlu membayar pesangon. Dengan mengurangi pekerja tetap dan mempekerjakan pekerja kontrak, biaya tenaga kerja dapat berkurang hingga 40%. Perbedaan upah pekerja tetap dan pekerja *outsourcing* mencapai lebih dari 25% untuk kewajiban dan perintah kerja yang sama (Tjandraningsih et al, 2010).

Pasar kerja yang fleksibel dalam bentuk *outsourcing* tenaga kerja dalam penerapannya justru membawa eksese buruk bagi pekerja karena sistem pengawasan terhadap perusahaan penyalur amat lemah dan memungkinkan terjadi eksploitasi terhadap pekerja melalui sistem pemotongan gaji oleh perusahaan penyalur terhadap tenaga kerja yang disalurkan. Praktik *outsourcing* tenaga kerja yang terjadi

di Indonesia memang sebuah fenomena yang sarat dengan ketidakadilan. *Outsourcing* tenaga kerja melibatkan perusahaan penyalur tenaga kerja yang peran dan mekanisme kerjanya serupa dengan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ke luar negeri.

Bagi perusahaan penyalur tenaga kerja, bisnis ini sangat menguntungkan karena: 1) proses perekrutan tenaga kerja tidak lagi dilakukan oleh perusahaan pengguna dan pekerja yang hendak mencari pekerjaan harus melalui perusahaan penyalur; 2) sistem komisi per tenaga kerja yang disalurkan maupun *management fee* yang diberlakukan, dan; 3) kemudahan pendirian usaha serta pengawasan yang amat longgar. Bagi pekerja, mencari pekerjaan melalui penyalur berarti memerlukan sejumlah uang untuk dapat disalurkan dan sejumlah uang lagi untuk dapat mempertahankan pekerjaannya atau untuk dapat terus-menerus dipekerjakan.

Harus diakui memang banyak perusahaan penyalur tenaga kerja yang bekerja secara profesional, taat terhadap peraturan dan menghormati hak-hak buruh, akan tetapi jauh lebih banyak lagi perusahaan yang nakal dan tidak mengindahkan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan buruh hidup tidak layak, sebagaimana diakui ketua umum asosiasi perusahaan alih-daya. Sumber yang sama juga mengungkapkan dari 12 ribu jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja yang diketahui beroperasi, hanya separuhnya yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan hanya seratus perusahaan yang tergabung dalam asosiasi (ekbis. sindonews/read/2012/11/09). Perusahaan penyalur

tenaga kerja selain yang berbadan hukum juga banyak yang beroperasi secara informal dan melibatkan berbagai pihak mulai dari para tokoh masyarakat formal dan informal, para pejabat birokrasi dan parlemen bahkan para pengurus serikat pekerja. Perusahaan semacam inilah yang beroperasi tanpa pengawasan dan tanpa sanksi ketika menjalankan praktik penyaluran pekerja secara melanggar hukum. Akibatnya, pekerja menjadi pihak yang dirugikan karena menjadi sumber eksploitasi.

Aparat Dinas Tenaga Kerja di berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kepulauan Riau sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan merasa kebijakan mengenai *outsourcing* merupakan kebijakan yang merepotkan sebab kemunculan perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja seringkali membawa nama bupati yang menyebabkan 'gigi' pengawas ketenagakerjaan menjadi tumpul dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Situasi semacam ini pada akhirnya kembali menyebabkan para pekerja *outsourcing* menjadi pihak yang dirugikan.

Situasi di atas muncul karena sikap dan posisi pemerintah pusat yang tidak jelas dalam menerbitkan peraturan sekaligus ketidaksiapan untuk mengawal peraturan yang dibuatnya. Dalam praktiknya, peraturan mengenai *outsourcing* digugat baik oleh pekerja maupun perusahaan penyalur karena inkonsistensi pemerintah. Pemerintah juga tidak siap dalam mengawasi dan menjamin kepatuhan para obyek hukum terhadap peraturannya. Dalam hal ini yang paling menyolok adalah ketidaksiapan para pengawas tenaga kerja dalam menjalankan perannya, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Persoalan lain yang muncul dengan pasar kerja yang fleksibel adalah kecenderungan terjadinya informalisasi hubungan kerja di sektor formal. Bank Dunia sebagai sponsor utama pasar kerja fleksibel mengasumsikan antara lain bahwa pasar kerja yang fleksibel akan menjamin terbukanya peluang para pekerja di sektor informal untuk berpindah ke sektor formal yang lebih aman, terlindungi dan menyejahterakan (World Bank, 2005; World Bank 2006). Dengan semakin banyak orang bekerja di sektor formal, maka akan lebih banyak pekerja yang memperoleh jaminan perlindungan hukum formal, tunjangan kesehatan, pendidikan dan pensiun, serta peningkatan keterampilan.

Di tingkat implementasi, asumsi tersebut tidak terbukti sebab hubungan kerja yang fleksibel justru cenderung menerapkan hubungan kerja informal di sektor formal sehingga sektor formal tidak lagi dapat diandalkan.

Gejala ini belum banyak disadari atau tidak banyak diangkat terutama oleh para ekonom ketenagakerjaan dan para pengambil kebijakan. Resep kemajuan ekonomi dengan indikator semakin banyak tenaga kerja dari sektor informal yang terserap ke sektor formal masih dianggap cocok. Keunggulan sektor formal dengan aspek regulasi dan perlindungan dan kesejahteraan masih dianggap tak tergoyahkan dan oleh karena itu tetap hendak diusahakan agar lebih meningkat penyerapan tenaga kerjanya.

Faisal Basri termasuk dalam kelompok ini dengan menyatakan bahwa sektor formal adalah basis untuk mempercepat terbentuknya lapisan kelas menengah yang kokoh. Alih-alih menciptakan lapisan mene-

ngah yang kokoh, fleksibilisasi pasar dan hubungan kerja di sektor formal kini justru menciptakan barisan pekerja yang semakin rentan dan suram masa depannya. Penelitian yang dilakukan penulis maupun para peneliti lain menunjukkan diterapkannya hubungan kerja kontrak pendek, hubungan kerja tanpa kontrak, harian lepas dan magang di berbagai pabrik yang masuk dalam kategori sektor formal. Jenis-jenis hubungan kerja ini menyebabkan para pekerja menjadi sibuk berusaha mempertahankan pekerjaannya dan tidak sempat untuk memunculkan identitasnya sebagai kelas menengah dengan potensi kekuatan politik yang besar. Dengan kata lain, ide pembentukan kelas menengah dari kaum pekerja di sektor formal dalam situasi fleksibilisasi pasar kerja adalah sebuah situasi yang 'jauh panggang dari api'. Dalam konteks yang lain, kaum pekerja kerah putih yang diasumsikan menjadi bagian penting dari kelas menengah yang kokoh justru adalah kelompok pekerja yang lebih tidak menyadari hak-haknya sebagai pekerja dibandingkan kaum pekerja kerah biru.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia kerja tersebut merupakan pemantik munculnya gerakan buruh sejak lima tahun terakhir. Secara konsisten gerakan buruh selalu menyuarakan perbaikan kondisi kerja dan penghapusan *outsourcing* karena praktik-praktiknya yang semakin merisaukan. Munculnya gerakan buruh sebagai kekuatan penyeimbang yang penting dalam hubungan industrial maupun dalam proses demokrasi di Indonesia adalah sebuah situasi anomali. Dalam sebuah situasi yang secara konseptual pengaruh dan kekuatan serikat pekerja semakin lemah karena sistem pasar kerja

fleksibel, pengalaman Indonesia justru memperlihatkan kebangkitan gerakan buruh yang secara solid dan konsisten menuntut peran pemerintah untuk menyediakan jaminan sosial dan perlindungan kaum pekerja. Situasi anomali ini muncul karena kombinasi dua situasi. Pertama, situasi yang berkembang karena iklim kebebasan berserikat yang dibuka oleh Presiden Habibie ketika itu, yang berpadu dengan munculnya generasi baru pimpinan serikat pekerja dengan ciri: muda, berpendidikan tinggi, kritis, melek teknologi dan berjejaringan luas. Generasi baru pimpinan serikat pekerja ini secara cerdas memanfaatkan seluruh modal tersebut untuk menegaskan kembali eksistensinya dan untuk menyusun strategi perjuangannya. Kedua, kinerja birokrasi pusat dan daerah yang gamang dan kebingungan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan hubungan industrial dan karakter baru gerakan buruh, membuat aparat pemerintah terkait tampil inkonsisten dan tidak profesional. Berbagai aksi buruh yang fenomenal untuk menekan pemerintah bahkan berhasil membuat pemerintah tunduk terhadap tuntutan pekerja. Inkonsistensi dan ketidak-profesionalan pemerintah justru menyebabkan konflik industrial meningkat.

Situasi anomali inilah yang memungkinkan harapan Faisal Basri bahwa kekuatan pekerja akan muncul. Kekuatan pekerja memang muncul dan secara cerdas mampu bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan pengusaha dalam upaya meletakkan pendulum untuk bergerak di sekitar titik keseimbangan. Kekuatan kolektif pekerja sebagaimana sudah dibuktikan dalam isu kenaikan upah dan jaminan sosial, secara inklusif mampu mendorong

pemerintah untuk menjalankan perannya melindungi seluruh warganya.

Fleksibilisasi Pasar Kerja dan Peran Pemerintah

Dalam kerangka globalisasi, pasar kerja yang fleksibel telah menjadi sebuah keniscayaan yang sulit ditolak. Dukungan institusi-institusi multinasional terhadap sistem ini yang mempercayai sisi positif fleksibilisasi dan membuatnya dapat dilembagakan dalam pasar kerja adalah yang membuatnya niscaya. Pasar kerja yang fleksibel akan menurunkan biaya tenaga kerja, meningkatkan daya saing perusahaan dan memberi peluang bagi usaha untuk lebih responsif dalam menghadapi perubahan ekonomi; sehingga dengan demikian perusahaan akan terus beroperasi dan mengurangi pengangguran, bahkan menciptakan kesempatan kerja. Tujuan itu hanya dapat dicapai jika dilengkapi dengan serangkaian kondisi struktural penunjang. Pasar kerja fleksibel memerlukan dukungan sebuah kebijakan pasar kerja yang koheren dan terintegrasi dengan sistem hubungan industrial, strategi industrialisasi dan sistem jaminan sosial yang baik.

Secara lebih spesifik struktur pasar kerja yang ditandai oleh suplai yang besar dari buruh terampil, aksesibilitas yang luas terhadap informasi mengenai pasar kerja dan penarikan sumber dana untuk jaminan sosial yang didistribusikan secara merata menjadi faktor-faktor penting yang menentukan efektivitas pasar tersebut (Nugroho & Tjandraningsih 2007). Akan tetapi persis justru struktur penunjang itu yang belum disediakan oleh pemerintah Indonesia sehingga penerapan pasar kerja fleksibel bahkan

menimbulkan situasi ketidakadilan. Pengusaha memperoleh keuntungan akan tetapi para pekerja menanggung kerugiannya. Pengalaman Indonesia dengan pasar kerja fleksibel jelas membuktikan bahwa bagi kualitas pasar kerja yang rendah dan dipenuhi dengan buruh tidak terampil, sistem ini merugikan pekerja. Di samping jumlahnya yang berlebih, keterampilan yang rendah telah menempatkan pekerja dalam posisi lemah untuk melakukan tawar-menawar. Sistem jaminan sosial universal juga belum sepenuh hati diterapkan dan diperlukan tekanan publik secara terus-menerus kepada pemerintah untuk mau melaksanakannya.

Penutup

Pasar kerja fleksibel sebagai kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang tidak utuh dan tidak didasarkan pada kondisi obyektif pasar kerja Indonesia. Dampak yang muncul karenanya menimbulkan kerumitan situasi dan gejolak hubungan industrial. Kaum pekerja sebagai pihak yang lebih lemah di hadapan pengusaha dan pemilik modal menjadi kelompok yang menderita kerugian yang lebih besar dari kerumitan tersebut. Amanat konstitusi agar negara menjamin kesempatan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh warganya belum sepenuhnya dijalankan. Kaum pekerja masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan.

Kaum pekerja yang tahun ini dicatat oleh BPS berjumlah 114 juta orang merupakan bagian besar bangsa Indonesia yang harus dilihat sebagai warga negara yang perlu dilindungi terutama jika dilihat dari mutu tenaga kerja yang 48% hanya berpendi-

dikan SD dan 18% berpendidikan SMP. Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan investasi perlu lebih berorientasi keadilan agar amanat konstitusi dan cita-cita Nurcholish Madjid dapat diwujudkan di tengah dunia yang semakin timpang dan lebih menguntungkan bagi sedikit orang. Visi Indonesia yang adil dan sejahtera memang masih jauh dan jalan untuk menempuhnya semakin sarat dengan tantangan dan rintangan, akan tetapi kehendak untuk mewujudkannya melalui perhatian yang lebih besar kepada kaum pekerja sudah merupakan langkah penting dalam perjalanan meraihnya.***

Rujukan

- Chang, Dae-Oup (2009), "Informalising Labour in Asia's Global Factory," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 39, No. 2, May 2009, 161-179.
- Herawati et al. (2011), *Penelitian Praktek Kerja Outsourcing pada sub-sektor Perbankan: Studi Kasus Jakarta, Surabaya, Medan* (Bandung: AKATIGA-OPSI-FES).
- Hewison, Kevin & Arne L. Kalleberg (2012), "Precarious Work and Flexibilisation in South and SouthEast Asia," *American Behavioral Scientist*, 57 (4) 395-402.
- Hewison, Kevin & Woradul Tularak (2013), "Thailand and Precarious Work: An Assessment," *American Behavioral Scientist*, 57 (4) 444-467.
- Islam, Iyanatul (2001), "Beyond Labour Market Flexibility: Issues and Options for Post-Crisis Indonesia," *Journal of the Asia Pasific Economy* 6 (3) 2001: 305-334.
- Maiti, Dibyendu (2012), "Precarious Work India: Trends and Emerging Issues," *American Behavioral Scientist*, 57 (4) 507-530.
- Nugroho, Hari & Indrasari Tjandraningsih (2007), "Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggungjawab Negara, Kertas Posisi," terbit terbatas.
- Tjandraningsih et al. (2010), *Diskriminatif dan Eksploitatif: Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing di Sektor Metal di Indonesia* (Bandung: AKATIGA-FSPMI-FES).
- Vosko, Leah F. et al (2003), *Precarious Jobs: A New Typology of Employment in Statistics*, Canada Catalogue no 75-001-XIE
- World Bank (2005), *Doing Business in 2005, Removing Obstacles to Growth* (Washington: IBRD/ World Bank).
- World Bank (2006), *Doing Business in 2006, Creating Jobs* (Washington: IBRD/ the World Bank).

Revitalisasi Demokrasi untuk Menangkal Jebakan Kelas Menengah

BUDI HIKMAT

*Anakin: My powers have been doubled since the last time
we met, Count.*

Dooku: Good. Twice the pride, double the fall

— Star Wars, episode III: “Revenge of the Sith” (2005)

Pasar keuangan telah menjadi *voting machine* yang independen, spontan, pragmatik dan sekaligus bengis. Investor merayakan kredibilitas presiden, menteri keuangan dan gubernur bank sentral baru walau mungkin secara sosial dan politik kurang *friendly*. Investor tidak harus menunggu jadwal pemilu. Setiap saat mereka dapat mengartikulasikan persepsi tentang efektivitas beragam kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, demografi atau energi melalui keputusan mengakumulasi atau mengobral surat berharga. Globalisasi memperluas pilihan investor. Kenyataan ini memaksa politisi bersaing lebih ketat antar negara.

Tahun 2013 ini memberikan contoh mutakhir. Optimisme kebangkitan *consuming class* di Indonesia melandasi arus masuk modal asing hingga memacu IHSG menyentuh paras tertinggi 5.215 pada 20 Mei 2013.¹ Selain menjaga kurs rupiah pada kisaran 9.600 per dollar, *vote of confidence* investor memungkinkan pemerintah untuk turut menikmati ongkos penerbitan utang rupiah semurah 5% untuk tenor sepuluh tahun. Bisa jadi ini ongkos berutang termurah sepanjang sejarah kita.

Namun pernyataan Ben Bernanke, Chairman pada Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), yang mengindikasikan pemangkasan stimulus membalikkan situasi. Sejak operasi *quantitative easing* digelar, Fed menjadi penopang utama surat berharga negara AS. Akibatnya *Fed tapering fever* itu memicu penurunan harga (kenaikan *yield*) T-bond secara tajam yang kemudian berdampak *re-pricing asset* secara global. Diimangi oleh prospek ekonomi AS yang lebih cerah dan kenaikan *yield* T-bond, investor merotasi rotasi investasi menuju AS. Aksi ini menyebabkan penguatan dollar global.

Rotasi regional itu menggerus IHSG, melonjakkan *yield* SUN dan melemahkan rupiah. Hingga bulan Juli 2013 koreksi tajam pada harga saham, obligasi dan nilai tukar bersifat global terkait *Fed tapering fever*. Namun sejak awal Agustus setelah pengumuman membengkaknya defisit neraca berjalan, kejatuhan pasar modal dan nilai tukar lebih terkait faktor domestik terutama efektivitas kebijakan makroekonomi.

¹ Lihat Peraga 36, "Perkembangan Pasar Modal dan Valuta Selama Tahun 2013", di bagian lampiran buku ini, hal. 168.

Pelemahan rupiah yang mengikuti pola eksponensial mengindikasikan persoalan serius. Memang kemudian terungkap kerapuhan mendasar pengelolaan ekonomi yang erat bertalian dengan sistem politik Indonesia. Demokrasi populis dan pemihakan berlebihan kepada industri ekstraktif sumber daya alam telah meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap dana asing untuk pembiayaan defisit anggaran dan neraca berjalan. Pengingkaran terhadap komitmen reformasi berisiko menyeret Indonesia pada pusaran jebakan kelompok menengah (*middle-income crisis*).

Memburuknya defisit neraca berjalan memang disebabkan oleh penurunan surplus non-migas. Perlambatan ekonomi global kerap dijadikan kambing hitam. Namun, bila dicermati lebih dalam hal itu ternyata dipicu oleh defisit neraca perdagangan minyak dan neraca pendapatan. Hal ini merupakan konsekuensi mempertahankan subsidi BBM yang ternyata kita impor. Sementara semakin deras repatriasi keuntungan bisa mencerminkan penurunan tingkat keuntungan berinvestasi di sektor riil Indonesia. Sangat bisa jadi, repatriasi keuntungan ini terkait dengan keterbatasan infrastruktur dasar, militasi tenaga kerja hingga antisipasi menjelang pemilu 2014.

Kecemasan investor terhadap memburuknya defisit neraca berjalan didasarkan pertimbangan logis. Indonesia dikuatirkan menjadi *the next* India atau South Africa yang menggantungkan diri kepada dana asing untuk membiayai defisit itu. Investor pada dasarnya mencemaskan tambahan utang baru (*supply risk*) dan pelemahan rupiah (*currency risk*) yang bakal

menggerogoti keuntungan nominal berinvestasi di Indonesia.

Kami membuat model ekonometri sederhana untuk menduga defisit neraca minyak yang dikaitkan dengan jumlah kendaraan bermotor (mobil dan motor), harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan harga premium bersubsidi. Model ini kami nilai layak dengan koefisien R-square sekitar 80%.² Silakan perbaiki spesifikasi model ini agar lebih baik.

Pada bulan Juli 2013 lalu, defisit neraca minyak mencapai \$2,8 miliar. Ini angka tertinggi sepanjang sejarah. Kumulatif defisit selama tujuh bulan 2013 sudah mencapai \$16,2 miliar atau melonjak 30,6%. Pada periode yang sama, penjualan kendaraan bermotor mencapai 5,3 juta unit atau bertumbuh sebesar 8,6%.

Model kami menaksir setiap kenaikan penjualan kendaraan bermotor sebesar 1% akan menambah defisit neraca minyak sebesar 0,64%. Harga ICP menjadi faktor yang paling sensitif mempengaruhi defisit neraca minyak seperti ditunjukkan oleh koefisien elastisitas yang paling besar secara absolut.

Sangat bisa jadi tidak banyak yang tahu bahwa pertambahan jumlah kendaraan bermotor selama sepuluh tahun terakhir hingga Juli 2013 mencapai 65 juta unit. Angka ini melesat 330% dibandingkan kumulatif 10 tahun sebelumnya. Sekitar 58 juta dari tambahan itu adalah motor yang tambahannya meroket 375%. Jadi tidak heran jalan terasa semakin macet. Apalagi ketika mudik. Pengendara motor seperti jam pasir yang melesak dari sisi kiri dan kanan. Kenda-

² Lihat Peraga 37: "Proyeksi Defisit Neraca Minyak Indonesia", di bagian lampiran buku ini, hal. 169.

raan mobil hanya baru bisa lewat apabila arus motor itu telah melaju. Masyarakat tentunya tidak punya pilihan. Sebab kualitas transportasi umum yang tidak nyaman dan memadai.

Bila pada tahun 2013 ini pertumbuhan kendaraan mencapai 10% dan harga ICP berada pada kisaran \$110 per barel, kami duga defisit neraca minyak mencapai Rp209 triliun atau sedikit lebih tinggi dari lokasi yang sudah dianggarkan pada APBN-P 2013, Rp200 triliun. Ini berarti pemerintah membutuhkan pendanaan valas sekitar \$21 milyar. Sebagai akibatnya pemerintah harus membiayainya dengan tambahan utang dan atau melepas cadangan devisa yang berisiko menekan nilai tukar rupiah.

Pada kolom "*forecasting*", kami menduga berapa besar posisi defisit neraca minyak dan pendanaannya sekira harga minyak dinaikkan menjadi Rp9.000,00 per liter atau tidak lagi disubsidi. Seperti terlihat, defisit neraca minyak tetap terjadi yang mengharuskan pemerintah menyiapkan sekitar \$18 hingga \$19 miliar per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibanding surplus neraca perdagangan non-migas yang selama periode 1984 hingga 2002 mencapai rata-rata \$15,6 miliar.

Angka ini merupakan sumber permintaan asli untuk valas yang akan sangat memengaruhi pergerakan rupiah. Penting diingat bahwa sejak dua tahun terakhir, asumsi nilai tukar rupiah pemerintah dalam APBN cenderung lebih kuat dari kenyataan.

Tingginya kebutuhan valas ini mencerminkan Indonesia sudah terjebak dalam *middle-income trap*. Yang terjadi adalah aktivitas *consumption-without-domestic*

production yang tidak menghasilkan *income* melainkan tambahan utang. Risiko ini harus diketahui dan diantisipasi oleh seluruh anak bangsa. Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan diri pada ekspor komoditas ekstraktif yang banyak dikuasai oleh politisi. Demikian juga masyarakat harus sadar ketergantungan pada konsumsi pada *non-renewable energy* tidak dapat diteruskan. Pengeluaran pemerintah sebaiknya harus difokus pada penguatan kapasitas produktif masyarakat seperti penyediaan infrastruktur transportasi, pelabuhan, diversifikasi energi dan ketahanan pangan, pendidikan dan pelatihan.

Sejumlah ekonom asing memang sudah lama menilai ekonomi Indonesia berisiko *overheated*. Paling tidak ini tercermin dari pertumbuhan kredit yang jauh melebihi rata-rata GDP *nominal growth* sebagai acuan normatif. Keputusan pemerintah meningkatkan upah minimum regional dan alokasi subsidi BBM yang demikian besar merupakan sumber penciptaan daya beli. Namun di lain sisi kita melihat proses de-industrialisasi yang tercermin pada penurunan rasio nilai tambah sektor manufaktur terhadap GDP. De-industrialisasi dan pelemahan daya saing manufaktur ini merupakan suatu kemunduran fundamental.

Tidak dibutuhkan *rocket scientist* untuk menyimpulkan bahwa neraca berjalan pasti beralih dari surplus menjadi defisit. Kurs rupiah cenderung tertekan. Apalagi arus masuk investasi langsung (FDI) yang lebih berorientasi domestik cenderung tidak menghasilkan dollar. Perusahaan Samsung dan LG membuat TV berlayar datar yang disukai kelompok menengah domestik. FDI ditengarai memperburuk defisit neraca berjalan.

Apa yang dibutuhkan memang konfigurasi makroekonomi pamungkas mengantisipasi siklus bisnis dalam konstelasi demokrasi produktif dan inklusif. Setelah membaca tulisan R. William Liddle dan tanggapan Faisal Basri,³ dalam kapasitas saya sebagai *financial economist* yang sempat melintasi beragam krisis ekonomi, saya langsung teringat kepada Mesir. Namun bukan negeri Mesir yang sekarang tengah dililit gejolak sosial politik. Melainkan kepada Mesir kuno seperti yang secara parallel diabadikan di dalam Perjanjian Lama dan Al-Quran.

Saya merasa beruntung pernah melancong sejumlah kota di Mesir. Walaupun harus mengenang kunjungan saat itu tidak nyaman. Rencana perjalanan berantakan tertahan oleh dampak aktivitas Presiden Hosni Mubarak yang seolah mengikuti jadwal kami. Saya pernah menyaksikan ratusan tentara berjajar rapat sambil menghadap rumah penduduk di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh sang presiden. Nampaknya ada kesempatan kerja untuk meredam kecemasan penguasa.

Paparan Bill Liddle mengenai *virtu* dan *fortuna* mengingatkan saya kepada dua sosok kitabiah yang melintas ketika saya merenung di tepian sungai Nil di kota Luxor: Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Sementara itu, pentingnya *inclusive political institution*, yang disarankan oleh Acemoglu-Robinson dan dirujuk oleh Faisal Basri, justru mengingatkan kepada profil kontras dua raja Mesir (Firaun) yang berkuasa ketika kedua Nabi di atas hidup.

³ Lihat R. William Liddle et al., *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi [PUSAD], Yayasan Paramadina, 2012).

Seperti diketahui bersama, dikisahkan Raja Mesir bermimpi melihat tujuh lembu yang gemuk dan kurus serta tujuh tangkai gandum yang bernas dan kopong. Raja kecewa ternyata tidak ada penasehatnya yang dapat menerjemahkan mimpinya (Kejadian 41:8).

Nabi Yusuf yang masih berada di penjara akhirnya dimintai nasehat. Beliau ternyata tidak hanya menafsirkan mimpi tersebut sebagai rangkaian masa malang dan gemilang yang datang silih berganti. Suatu fenomena yang kini kita kenal sebagai *business cycle* (*recovery, boom, recession, depression*) yang dulu lebih dipengaruhi oleh perubahan iklim. Namun Nabi Yusuf juga menyarankan ramuan kebijakan pamungkas untuk melawan gejolak siklus bisnis itu:

Hendaklah kalian bercocok tanam dengan sungguh-sungguh. Apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Kecuali sedikit untuk kamu makan (QS 12:46-48).

Saran Nabi Yusuf itu tersusun menurut prioritas kepentingan sekaligus *time horizon*. Dalam jangka panjang, kebijakan ekonomi harus difokuskan untuk penguatan kapasitas produktif terutama untuk penyediaan kebutuhan pangan. Para ekonom mengenal kebijakan ini sebagai *structural policy* yang meliputi tindakan berani melibas penghalang produktivitas terutama terkait dengan campur tangan berlebihan birokrasi pemerintah dan aksi korupsi yang berujung pada ekonomi biaya tinggi. Dalam sisi positif, kebijakan struktural merekomendasikan komitmen untuk penguasaan teknologi, kompetisi dan penguatan jalur distribusi.

Dalam jangka menengah, kebijakan ekonomi diarahkan untuk pengawetan hasil panen untuk menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Contoh paling klasik bagi Indonesia adalah bumbu-bumbuan seperti cabai. Mengapa tidak dibiasakan masyarakat mengkonsumsi cabai bubuk?

Sedangkan dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi diarahkan pada pengendalian konsumsi. *Policy option* untuk *demand management* ini secara konvensional mencakup kebijakan fiskal melalui pajak dan kebijakan moneter melalui suku bunga.

Saya sendiri mengalami metamorfosa dalam menghayati saran Nabi Yusuf itu setelah menjadi *financial economist*. Saran Nabi Yusuf itu sangat bersesuaian dengan proses perencanaan keuangan komprehensif yang meliputi *growth* (melalui saham), *protection* (melalui obligasi negara) dan *distribution* (melalui asuransi annuitas).

Aspek yang tidak kalah menarik dari kisah Nabi Yusuf, yang ternyata dinobatkan sebagai Kisah Terbaik dalam Al-Quran, adalah kualifikasi Nabi Yusuf dan Raja yang berkuasa. Hal ini sangat kontras dengan kisah Nabi Musa dan Firauan yang menjadi seterusnya. Dalam kisah Nabi Yusuf, Sang Raja tidak hanya memiliki visi yang diwakili oleh mimpi, namun berani mengganti pejabat negara yang tidak mampu dengan Nabi Yusuf yang nyatanya bukan penduduk asli Mesir (QS 12:44). Berdasarkan kisah ini dapat disimpulkan Sang Raja menerapkan nilai inklusif.

Nabi Yusuf sendiri telah menempuh *fit and proper test* yang membuktikan beliau tidak bersalah. Selain

itu beliau memiliki dua karakter utama yang sejatinya merupakan atribut (asma) Tuhan (QS 12:45) yakni *good governance* dan berilmu (*hafizun aaliim*). Selanjutnya dalam Kejadian 41:36 diabadikan bahwa negeri Mesir – berkat kombinasi penguasa dan birokrat yang prima tersebut – berhasil terhindar dari kemalangan.

Sejarah kemudian berlanjut ketika keturunan Yaqub yang diajak oleh Nabi Yusuf menempati Mesir dan kemudian ditekan oleh tirani Firaun hingga akhirnya muncul perlawanan Nabi Musa. Yang penting untuk dihayati adalah Firaun seteru Nabi Musa cenderung mengutamakan ambisi ketimbang visi dan bersikap eksklusif. Nabi Musa tidak hanya harus menghadapi Firaun, tetapi beliau harus memimpin rakyat Bani Israil yang ternyata berpuak-puak. Al Quran juga menisbahkan Nabi Musa dengan dua karakter dasar yang juga menjadi atribut Tuhan (QS 28:28) yakni kuat dan dapat dipercaya (*qawiiyyun amin*).

Sejalan dengan paparan Bill Liddle, kita sangat berharap memiliki pemimpin yang *fortuna* seperti Nabi Musa yang didukung oleh birokrat *virtu* seperti Nabi Yusuf. Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat dan dapat dipercaya. Kombinasi dengan “dan” bukan pilihan “atau”. Kita tidak ingin dapat dipercaya namun tidak kuat. Apalagi yang tidak kuat dan tidak dapat dipercaya. Demikian juga birokratisasi harus diarahkan jadi administrasi yang kompresif, transparan, mutakhir, mudah dan murah diakses serta merangkul.

Terkait keputusan mengendalikan subsidi BBM, kita tidak dapat melupakan kompromi politik triwulan pertama 2012. Ketika itu pemerintah yang

pada awal tahun mengusulkan pemangkasan subsidi BBM akhirnya bersama DPR menyepakati rumusan yang mempersulit kenaikan harga BBM. Ketika rumusan itu tidak berlaku lagi pada tahun 2013, *wrong timing and poor execution* kenaikan harga BBM yang mendekati Ramadan dan perayaan Idul Fitri memperburuk profil makroekonomi. Apalagi dalam waktu yang bersamaan terjadi demam pemangkasan Fed. Kita berpacu dengan waktu. Punya pagu. Dan tidak dapat menunggu.***

BAGIAN III:
TANGGAPAN ATAS
TANGGAPAN

Epilog dan Apresiasi atas Tanggapan

FAISAL BASRI

Tidak perlu waktu terlalu lama menunggu berbagai praktik baru dari perpaduan antara *extractive economic institutions* dan *extractive political institutions*. Tak sampai setahun dari Nurcholish Madjid Memorial Lecture VI, terbongkar praktik pemburuan rente daging sapi yang melibatkan ketua umum partai politik. “Perampokan” *consumer surplus* puluhan triliun rupiah dilakukan secara vulgar. Serupa vulgarnya dengan kasus korupsi Hambalang yang melibatkan ketua umum dan bendahara umum partai berkuasa dan seorang menteri.

Ketika proses persidangan atas kedua skandal itu masih berlangsung, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menerima uang sogok di rumah dinas. Sejauh ini dua sengketa pilkada disangkakan kepada ketua MK. Tak tertutup kemungkinan hakim

Mahkamah Konstitusi lain terlibat dan lebih banyak lagi putusan sengketa Pilkada yang dipertanyakan karena uang pelicin. Legitimasi berbagai Pilkada mulai dipertanyakan. Urgensi Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) MK juga dipertanyakan.

Penyebab tercorengnya MK boleh jadi juga merupakan serpihan dari *extractive political institution*. *Trias politica* diinterpretasikan sesuka-hati sebagai bagi-bagi “kue”, bukan pemisahan kekuasaan eksekutif-legislatif-yudikatif supaya terbentuk mekanisme *checks and balances*. Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur jumlah hakim Mahkamah Konstitusi sebanyak sembilan orang, diajukan merata masing-masing tiga orang oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Tak pelak lagi, MK menjadi alat strategis bagi partai-partai untuk memperjuangkan kemenangan calon-calonnya di Pilkada sekalipun kalah dalam pesta demokrasi di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.

Di ranah kebijakan, pemerintah meluncurkan *low cost green car* (LCGC). Dari penamaan saja sudah kontroversial, apatah lagi substansinya. Di tengah tekanan berat keseimbangan eksternal yang hingga kini membuat lunglai nilai tukar rupiah, pemerintah mengumbar insentif menggiurkan untuk membeli mobil. Pilihan instrumen pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang nyata-nyata mengeksploitasi potensi penjualan menunjukkan betapa dangkal perspektif perumus kebijakan untuk memajukan industri otomotif yang memaksimalkan maslahat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Seandainya pemerintah hendak memajukan industri otomotif dengan lebih mendorong investasi baru dan ekspor lewat pemanfaatan keekonomian skala (*economies of scale*), sudah barang tentu pemerintah akan membuat rencana strategis dan *roadmap* pengembangan industri otomotif yang *proper* terlebih dahulu, kemudian memilih instrumen yang paling cocok untuk itu. Instrumen kebijakan yang bisa dipilih antara lain adalah *tax holiday* bagi investasi baru dan berbagai insentif untuk menggairahkan produksi dengan ongkos yang kompetitif. Pemerintah menyampaikan kriteria rinci tentang mobil ideal yang memenuhi ciri-ciri mobil masa depan yang betul-betul ramah lingkungan, efisien, dan memiliki potensi besar untuk diekspor, sehingga keekonomian skala mencapai tingkat optimal, dan karena itu harga mobil di dalam negeri bisa lebih rendah karena ongkos produksinya lebih murah, bukan karena pembebasan PPnBM.

Kerapuhan struktur perekonomian sebagaimana diungkapkan pada naskah NMML VI akhirnya bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mengena ke semua komponen produk domestik bruto: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor. Pertumbuhan ekonomi merosot ke aras di bawah 6 persen. Defisit akun semasa (*current account*) menggelembung ke tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Surplus transaksi perdagangan juga merosot tajam. Bahkan sejak tahun 2012 akhirnya transaksi perdagangan jebol, mengalami defisit untuk pertama kalinya sejak zaman Majapahit. Dalam kondisi seperti itu, perekonomian kian rentan menghadapi

tekanan eksternal.

Betul saja, Indonesia mengalami tekanan nilai mata uang yang semakin parah sejak The Fed mengumumkan rencana pemotongan dana stimulus. Namun, persoalan mendasar nyata-nyata adalah struktur ekonomi domestik yang rapuh.

Tak ada kata lain kecuali penghargaan amat tinggi kepada para penanggap yang telah memperkaya tulisan yang awalnya diniatkan sebagai percikan pemikiran untuk membangun kesadaran lebih luas atas persoalan mendasar perekonomian nasional di satu pihak, dan peluang yang terbuka luas untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara besar yang menyejahterakan rakyatnya.

Ulasan Budi Hikmat sangat bernilai untuk memahami kondisi perekonomian terkini yang tengah diterpa badai yang bersumber dari faktor eksternal. Krisis ekonomi tahun 1998-1999 dan krisis finansial global tahun 2009 belum cukup menjadi pelajaran berharga untuk selalu sedia payung sebelum hujan. Betapa pemerintah berulang kali membuat kesalahan yang sama, membiarkan pemburukan sampai titik tak ada lagi pilihan, sehingga ongkosnya sangat mahal dan membuat kemunduran tak terelakkan. Bahkan keputusan yang akhirnya diambil pun setengah-setengah sehingga menjadi hambar dan tak bisa menyentuh akar masalah. Budi Hikmat memandang masalah yang muncul silih berganti bersumber dari penafian atas nilai-nilai yang bersifat universal yang telah diketahui sejak ribuan tahun silam.

Tanggapan ekonom dan peneliti senior Thee Kian Wie yang menyorot korupsi sudah mewabah ke sekujur sendi kehidupan bernegara memunculkan pertanyaan: dari mana kita memulai pembenahan? Pertanyaan serupa pernah penulis utarakan kepada Cak Nur. Jawabannya: kala kita sudah berada dalam situasi yang teramat rumit dan tidak tahu lagi dari mana kita memulai pembenahan, maka tindakan sekecil apa pun akan menjadi langkah awal. Jangan ragu, lakukan sekarang juga.

Tanggapan Indrasari Tjandraningsih yang mengedepankan fenomena pasar kerja fleksibel sebenarnya sejalan dengan landasan pemikiran penulis. Jika pasar menjadi instrumen penentu pasar kerja, niscaya buruh akan berada pada posisi lemah. Oleh karena itu negara harus berperan untuk menjamin keadilan dengan menghadirkan sistem jaminan sosial semesta dan perlindungan sosial yang memadai. Negara harus menjamin agar kaum pekerja, terutama tenaga kerja produktif mampu menjadi tulang punggung pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan yang inklusif. Jika kita memiliki sistem jaminan sosial nasional semesta, niscaya kaum buruh merupakan tulang punggung pembangunan. Buruh bukan dipandang sebagai faktor produksi semata, melainkan juga sebagai sumber “darah segar” yang mumpuni untuk mendanai pembangunan.¹ Kuncinya

¹ Berdasarkan perhitungan dengan asumsi konservatif, dalam kurun waktu hanya sepuluh tahun, akumulasi iuran kesehatan dan jaminan hari tua dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional akan mencapai sekitar Rp 1.500 triliun, suatu nilai yang amat berarti untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik sehingga produktivitas nasional meningkat dan pada gilirannya menciptakan banyak lapangan kerja

adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Sudah barang tentu, di negara mana pun, lapangan kerja yang berkualitas bagi mayoritas rakyat bertumpu pada kekuatan sektor formal. Sektor informal yang sangat menjamur subur bukanlah *by design*, melainkan sebagai ekses dari tersumbatnya perkembangan sektor formal, terutama sektor industri manufaktur.

Gerakan buruh yang menuntut peningkatan upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL) bisa dipahami karena ketiadaan sistem jaminan sosial semesta dan perlindungan sosial, sehingga upah layak dipandang sebagai *safety net* bagi buruh. Upah layak bukanlah substitusi dari sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Lemahnya perlindungan sosial tercermin dari *social protection index* Indonesia yang tergolong sangat rendah, hanya berada di urutan ke-27 dari 35 negara Asia-Pasifik. Posisi Indonesia terceder jauh dari negara-negara Asean-5, bahkan dengan Timor-Leste sekalipun.²

baru yang lebih berkualitas. Kehadiran sistem jaminan sosial diyakini bakal mendongkrak *financial inclusion index* Indonesia yang sekarang hanya 19,6 persen, hanya sedikit lebih tinggi dari negara-negara Sub-Sahara Afrika. Inilah salah satu wujud dari pembangunan inklusif.

² Lihat Asian Development Bank, *The Social Protection Index: Assessing Results for Asia and the Pacific*, 2013. Timor-Leste berada pada urutan ke-11, China ke-12, Vietnam ke-13, Thailand ke-16, dan Filipina ke-17. Pilar ketiga dari perlindungan sosial adalah *active labor market programs* yang menolong orang memperoleh jaminan pekerjaan. Komponen utama dari pilar ini adalah program pengembangan dan pelatihan keterampilan serta kerja khusus, seperti *cash- or food-for-work programs*.

Jangan biarkan buruh diadu dengan pengusaha. Tuntut negara untuk melaksanakan kewajibannya menyejahterakan buruh. Oleh karena itu, sudah saatnya orientasi perjuangan kaum buruh bergeser dari upah ke kesejahteraan. Jika negara berperan optimal, antara lain dengan menyediakan perumahan dan transportasi publik yang terjangkau, aman, dan nyaman, niscaya buruh akan jauh lebih sejahtera ketimbang sekarang.

Tanggapan Handi Risza menginspirasi sejumlah pekerjaan rumah yang menghadang untuk mewujudkan cita-cita keadilan. Tinjauan kritisnya atas perjalanan satu dekade krisis membekali kita untuk menilai apakah kita sudah di jalur yang benar untuk mewujudkan cita-cita reformasi.

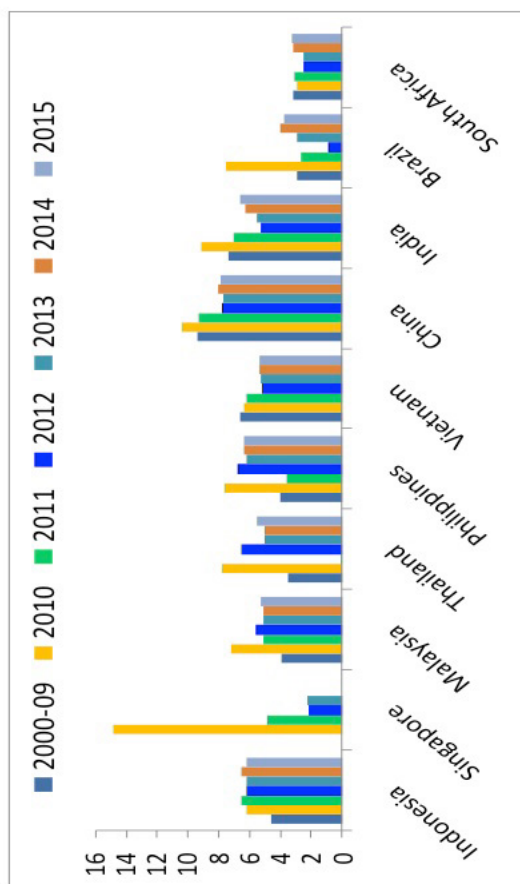
Muncul kesan perjalanan satu dasawarsa reformasi kita masih berkutat pada pendikotomian yang tidak produktif. Membenturkan peran negara versus peran pasar cenderung akan membuat persoalan-persoalan substansial terpinggirkan sehingga kita hanya berjalan di tempat. Bahayanya, kita bakal mengulangi kesalahan masa lalu.

Sudah saatnya kaum muda lebih aktif menyampaikan pandangan-pandangan subyektifnya tentang masa depan negeri tercinta dan mengambil inisiatif untuk menjawab tantangan masa depan yang bakal jauh lebih berat. Tuntutlah hak generasi mendatang. Jangan sampai sumber daya nasional kian terkikis oleh egoisme dan hawa nafsu negeri tua yang mengeksploitasi kekayaan nasional demi menutupi

kekasalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Dan ada satu cara jitu untuk itu, yakni mentransformasikan *extractive political and economic institutions* menjadi *inclusive political and economic institutions*.***

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peraga 1: “Pertumbuhan PDB di Asean-6 dan Emerging Markets”



Sumber: World Bank, *Global Economic Prospects*, June 2013, except for Singapore from ADB.

Peraga 2: "Perbandingan Beberapa Indikator antara BRICS dan Indonesia, 2010"

	China	India	Brazil	Russia	Indonesia	S. Africa
Population (million)	1,344	1,225	195	142	240	50
Life expectancy at birth, total (years)	73.3	65.1	73.1	68.8	68.9	52.1
Surface are (million sq. km)	9.6	3.3	8.5	17.1	1.9	1.2
GDP (current US\$)	5,930	1,684	2,143	1,488	708	304
Industry, value added (% of GDP)	46.7	27.1	28.1	36.7	46.9	30.8
Gross capital formation (% of GDP)	48.2	35.1	20.2	22.7	32.4	19.3
Merchandise trade (% of GDP)	50.1	33.8	18.4	43.6	41.4	48.2
Market cap. of listed companies (% of GDP)	80.3	95.9	72.1	67.5	50.9	278.5
Electric power consumption (kWh per capita)	2,631	571	2,206	6,133	590	4,532
Internet users (per 100 people)	34.4	7.5	40.7	43.3	10.9	18.1
Military expenditure (% of GDP)	2.0	2.7	1.6	3.9	0.7	1.3

Sumber: World Bank, World Development Indicators.

Peraga 3: "TNC' s Top Prospective Host Economies for 2013-15"



Sumber: UNCTAD, *World Investment Report 2013*, p. 22.

Paraga 4: "Japanese FDI: upward evaluation of Indonesia"

Promising countries for overseas business operation by Japanese Manufacturing Companies over the medium term (next 3 years or so)											
Rank	1997	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1st	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China	China
2nd	USA	Thailand	Thailand	India	India	India	India	India	India	India	India
3rd	Indonesia	USA	India	Thailand	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Thailand	Indonesia
4th	Thailand	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Thailand	Thailand	Russia	Thailand	Thailand	Vietnam	Thailand
5th	India	India	USA	USA	USA	Russia	Thailand	Russia	Brazil	Indonesia	Vietnam
6th	Vietnam	Indonesia	Russia	Russia	Russia	USA	Brazil	Brazil	Indonesia	Brazil	Brazil
7th	Philippines	Korea	Indonesia	Korea	Brazil	Brazil	USA	USA	Russia	Russia	Mexico
8th	Malaysia	Taiwan	Korea	Indonesia	Korea	Indonesia	Indonesia	Indonesia	USA	USA	Russia
9th	Brazil	Malaysia	Taiwan	Brazil	Indonesia	Korea	Korea	Korea	Korea	Malaysia	Myanmar
10th	Taiwan	Russia	Malaysia	Taiwan	Taiwan	Taiwan	Taiwan	Malaysia	Malaysia	Taiwan	USA

Sumber:

Japan Bank for International Cooperation (JBIC), "Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies, various issues.

Peraga 5: "FDI Flows (inward) as % of GFCF"

Country	1990	1997	2000	2005	2011	2012Av.	90-97Av.	01-10Av.	05-12
Venezuela	8.6	28.4	19.1	8.8	6.8	4.3	9.9	5.2	2.9
Ecuador	6.4	17.1	-0.7	6.0	3.4	2.9	11.9	7.4	3.6
Bangladesh	0.1	6.7	5.5	6.0	4.3	3.4	1.4	4.1	4.5
China	3.5	14.4	10.0	8.0	3.7	3.3	10.9	7.1	5.2
Sri Lanka	2.7	11.1	4.2	4.8	6.1	4.3	5.2	5.6	5.6
India	0.3	3.6	3.3	2.9	5.9	4.3	1.4	5.3	6.1
Indonesia	3.4	7.7	-13.8	12.3	7.1	6.8	5.8	3.3	6.7
Philippines	4.4	5.1	12.5	9.0	4.2	5.6	6.3	6.2	6.8
South Africa	-0.4	15.5	4.5	16.0	7.8	6.1	3.4	10.3	7.9
Mexico	5.1	15.0	13.4	14.3	9.3	5.2	10.5	14.0	10.5
Argentina	9.3	16.1	22.6	13.4	9.8	12.3	10.7	10.9	10.7
Thailand	7.2	7.5	12.5	15.4	8.4	8.1	4.5	13.7	11.8
Brazil	1.2	12.6	30.3	10.7	14.0	15.1	4.2	14.3	12.4
Bolivia	11.0	56.8	49.0	-23.2	18.9	20.5	24.1	20.8	12.9
Malaysia	15.4	12.6	14.1	12.7	19.1	13.0	16.0	12.3	14.6
Myanmar	29.6	71.8	24.2	15.5	20.9	18.1	32.2	19.5	18.3
Peru	0.7	15.2	7.5	17.7	17.5	21.5	13.6	18.0	20.2
Vietnam	21.2	31.0	15.1	11.2	20.4	25.6	33.6	17.0	21.0
Chile	7.6	22.1	29.4	26.8	39.8	46.0	13.8	29.8	34.5
Cambodia	..	36.4	22.1	32.1	44.0	63.8	33.1	29.6	42.4
Mongolia	..	9.4	18.6	26.6	113.4	89.5	3.9	33.9	56.1
Singapore	46.1	42.2	54.3	68.3	91.9	86.6	33.4	73.0	81.0
South-East Asia	11.4	15.2	15.7	19.6	18.6	17.3	11.5	18.0	18.7
Asia	3.9	9.2	13.8	10.7	7.6	6.5	6.5	9.8	9.5
South America	3.5	16.0	24.7	15.0	15.1	16.8	7.5	14.3	13.8
Developing economies	3.9	11.4	16.2	12.0	10.1	9.0	7.0	11.9	11.6
World	4.2	7.2	19.1	10.0	10.6	8.3	4.5	10.8	11.4

Citation: FDI = Foreign Direct Investment (inward); GFCF = Gross Fixed Capital Formation; .. Sumber: UNCTAD, World Investment Report 2013.

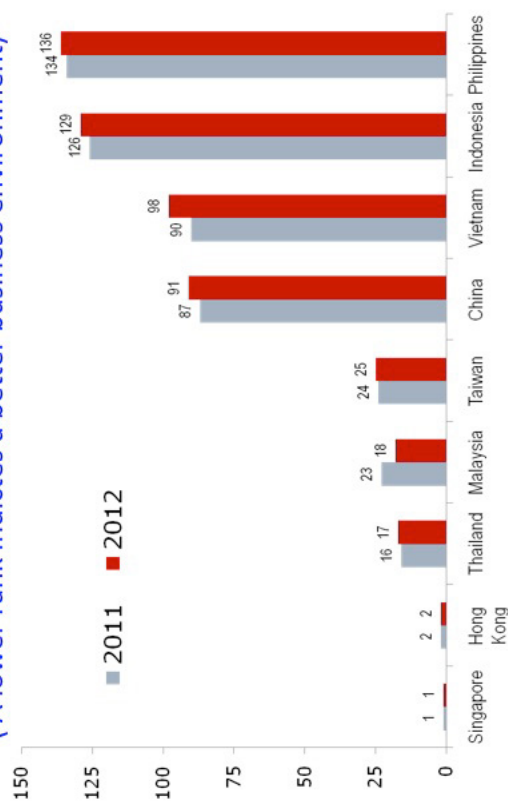
Peraga 6: "FDI stocks (inward) as % of GDP"

Country/su	1990	1997	2000	2005	2011	2012Av.90-97	Av.01-10	Av.05-12
Bangladesh	1.7	3.4	4.8	5.6	5.8	6.5	1.9	5.9
India	0.5	2.5	3.5	5.2	10.9	12.2	1.2	7.6
China	5.1	15.6	16.2	11.9	9.9	10.3	10.5	11.6
Korea, DPR	3.9	9.9	9.8	11.0	12.4	13.0	7.7	10.7
Philippines	6.7	10.4	17.0	14.5	12.6	12.4	7.9	13.7
Venezuela	8.2	28.8	30.3	30.6	14.1	12.9	13.2	27.3
Indonesia	6.9	13.3	15.2	14.4	21.9	23.4	9.0	12.9
Ecuador	14.5	20.5	38.9	26.7	18.8	17.8	17.0	26.0
Brazil	10.1	8.0	19.0	20.6	28.1	31.2	10.4	22.8
Argentina	6.4	14.4	23.8	30.1	21.9	23.2	9.2	30.1
Peru	4.5	13.1	20.7	20.0	28.4	31.4	7.8	23.0
Myanmar	5.4	29.5	44.1	39.3	17.5	20.6	14.6	35.2
Mexico	7.8	12.7	16.0	26.8	26.2	26.8	10.1	25.2
South Africa	8.2	11.2	32.7	32.0	32.9	35.6	9.1	32.3
Malaysia	21.7	39.1	54.1	31.0	40.0	43.6	28.8	35.5
Thailand	9.3	8.9	24.7	33.3	40.7	40.7	10.2	34.6
Bolivia	21.1	28.4	61.8	51.4	32.4	32.5	23.5	51.5
Vietnam	3.8	38.6	47.3	42.4	51.9	51.6	20.2	46.8
Cambodia	2.2	27.8	43.1	39.3	53.4	59.4	10.6	44.0
Mongolia	0.0	6.2	16.0	29.1	110.4	130.7	2.3	36.8
Chile	46.7	40.5	59.1	63.9	69.1	77.7	39.1	64.6
Singapore	78.5	75.3	117.2	188.2	240.8	252.3	76.9	206.7
South-East Asia	16.8	25.7	41.9	46.4	54.3	56.4	20.4	49.0
Asia	15.0	17.5	25.8	23.8	25.2	26.9	16.0	25.6
South America	10.6	13.1	23.2	26.5	28.7	31.3	11.3	21.2
Developing economies	13.4	16.4	25.3	25.8	28.6	30.4	14.5	27.4
World	9.7	15.0	23.3		29.8	32.2	11.3	27.4

Source: FDI = Foreign Direct Investment (inward); GDP = Gross Domestic Product. Sumber: UNCTAD, World Investment Report 2013.

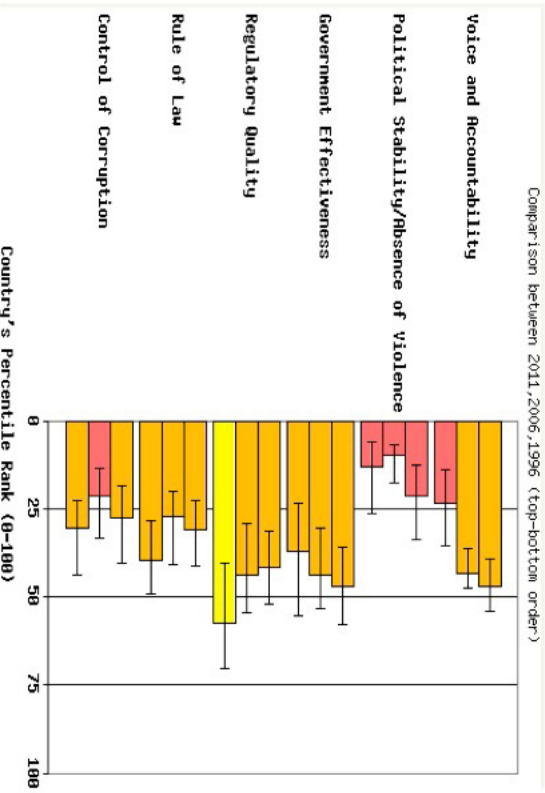
Peraga 7: "Ease of Doing Business"

(A lower rank indicates a better business environment)



Sumber: IMF, 2013

Peraga 8: "Indonesia: Governance Indicators"



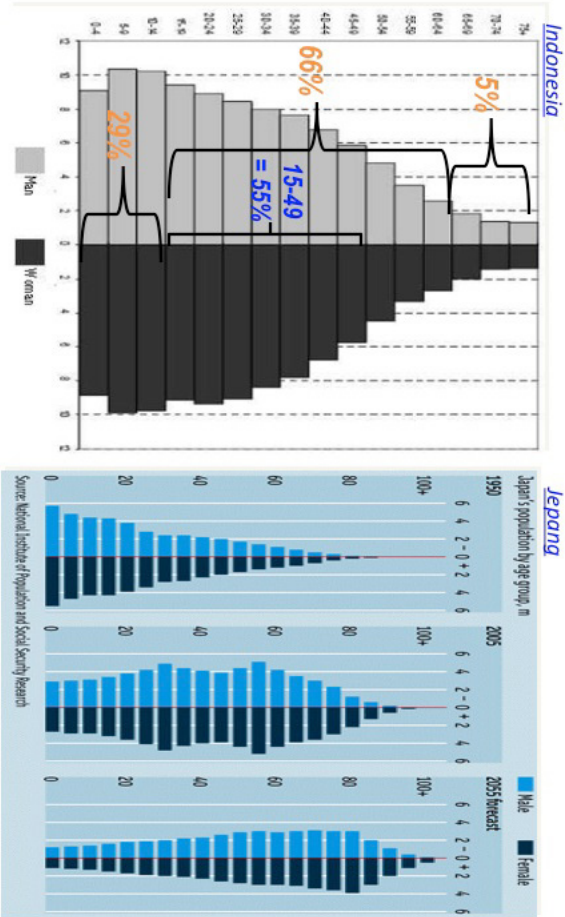
Sumber: World Bank, World Governance Indicators (<http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm>)

Peraga 9: "PERC Perception Corruption Index"

Score is 0-10, whereby 0 means very clean and 10 means very corrupt					
Country	2009	2010	2011	2012	2013
Singapore	0.92 (16)	0.99 (16)	0.37 (16)	0.67 (16)	0.74 (16)
Australia	1.40 (15)	1.47 (15)	1.39 (13)	1.28 (15)	2.35 (14)
Hong Kong	1.74 (14)	1.75 (14)	1.10 (15)	2.64 (12)	3.77 (13)
Japan	2.63 (13)	2.63 (12)	1.90 (12)	1.90 (14)	2.35 (14)
U.S.A.	2.71 (12)	1.89 (13)	1.39 (13)	2.59 (13)	3.82 (12)
Macau	3.75 (11)	5.71 (9)	4.68 (11)	2.85 (11)	4.23 (11)
Taiwan	5.85 (9)	5.62 (10)	5.65 (10)	5.45 (10)	5.36 (10)
Malaysia	7.00 (6)	6.05 (8)	5.70 (9)	5.59 (9)	5.38 (9)
South Korea	4.97 (10)	4.88 (11)	5.90 (8)	6.90 (6)	6.98 (7)
Thailand	6.76 (7)	7.33 (5)	7.55 (7)	6.57 (8)	6.83 (8)
China	7.30 (5)	6.70 (7)	7.93 (6)	7.00 (5)	7.79 (6)
Vietnam	7.40 (4)	7.13 (6)	8.30 (5)	7.75 (4)	8.13 (4)
Cambodia	8.10 (1)	8.30 (2)	9.27 (1)	6.83 (7)	7.84 (5)
India	6.50 (8)	8.23 (4)	8.67 (4)	8.75 (2)	8.95 (1)
Philippines	7.68 (3)	8.25 (3)	8.90 (3)	9.35 (1)	8.28 (3)
Indonesia	7.69 (2)	9.07 (1)	9.25 (2)	8.50 (3)	8.83 (2)

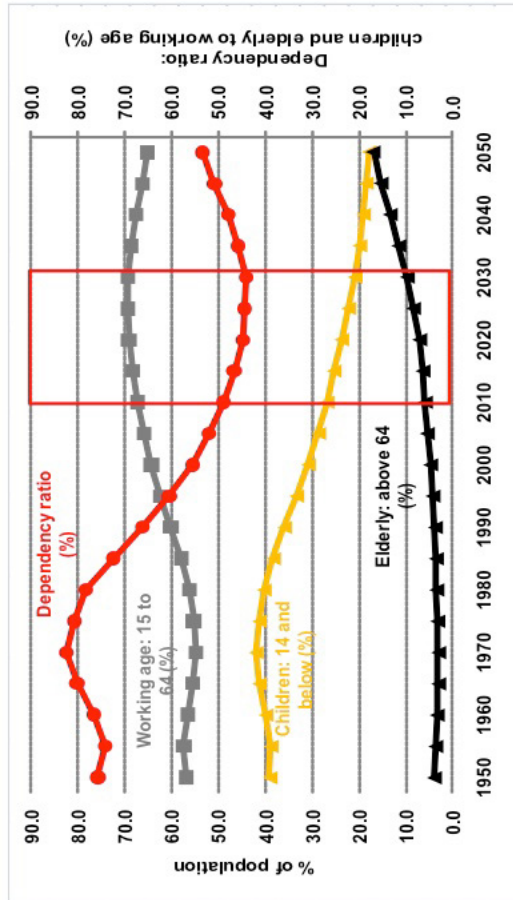
Sumber: Political and Economic Risk Consultancy, Ltd, based in Hong Kong.

Peraga 10: “Penduduk Indonesia Mirip Jepang Tahun 1950”



Sumber: Badan Pusat Statistik and http://www.economist.com/blogs/dailychart/?page=1&src=scomfbw/bd/dailychartian10_120101120_WOC951

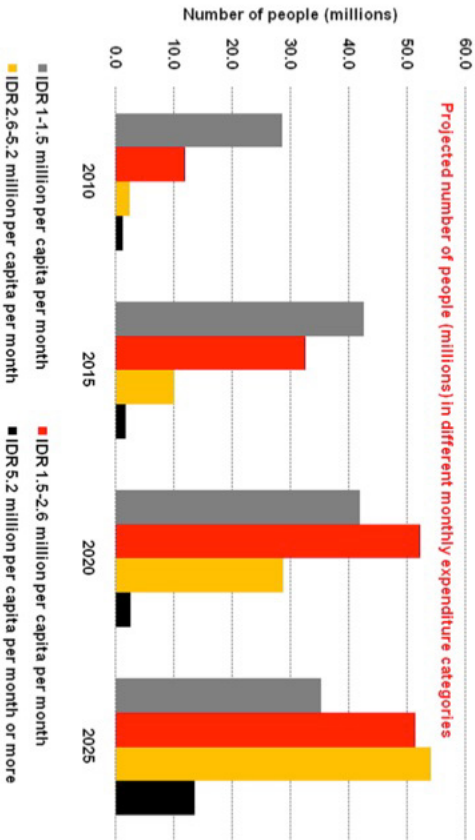
**Peraga 11: Maximizing opportunities:
Indonesia's remaining demographic dividend**



Sumber: World Bank, "Indonesia economic update: Near-term issues and looking ahead to 2012," March 2011.

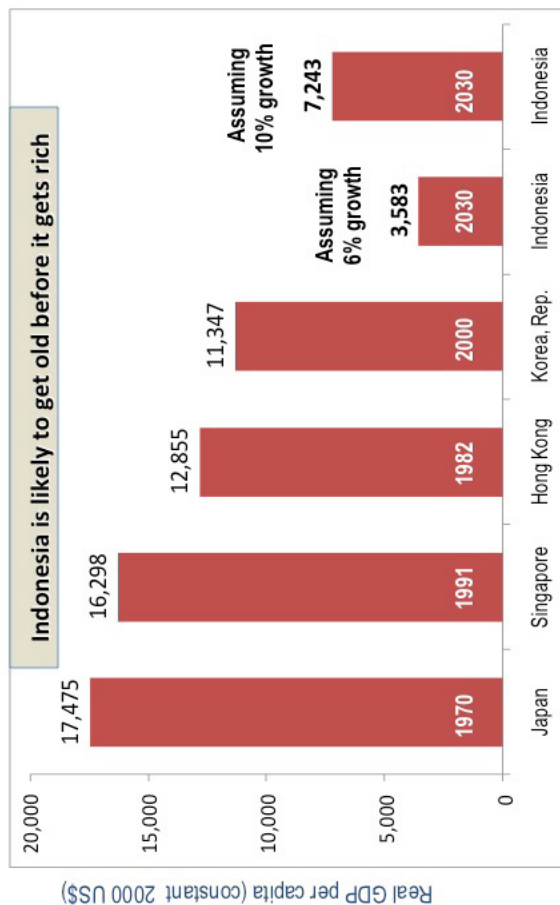
Peraga 12: “Looking ahead within Indonesia”

To a growing middle class...



Sumber: World Bank, June 2012

Peraga 13: “GDP per Capita when Demographic Bonus End”



Sumber: World Bank, dipresentasikan oleh Shubham Chaudhuri pada Kompas Economic Panel Discussion, 21 Juni, 2012.

Peraga 14: “Population, GDP/capita, and Structure of GDP”

Country	Population (million)	GDP per capita (current US\$)	GDP components (%)				
			Cp	Cg	I	X	M
China	1344.1	5445.0	34.4	13.1	48.4	31.4	27.3
India	1241.5	1488.0	57.2	11.7	36.6	24.6	29.8
Indonesia	242.3	3495.0	56.8	9.0	32.8	26.3	24.9
Brazil	196.6	12594.0	60.3	20.7	19.7	11.9	12.6
USA	311.6	48112.0	71.6	17.3	14.9	14.0	17.8
Japan	127.8	45903.0	60.4	20.6	19.9	15.2	16.1
Germany	81.7	44060.0	57.4	19.3	18.3	50.2	45.1
UK	62.6	39038.0	64.3	22.4	14.9	32.5	34.1
Korea	49.8	22424.0	53.1	15.4	29.5	56.2	54.1
Philippines	94.8	2370.0	73.7	9.6	21.7	31.0	36.0
Vietnam	87.8	1407.0	62.7	6.5	35.0	87.0	91.2
Thailand	69.5	4972.0	55.6	13.3	26.6	76.9	72.4
Malaysia	28.8	9977.0	47.5	13.0	23.6	91.6	75.7
Singapore	5.2	46241.0	40.6	10.3	22.4	209.0	182.3
Brunei	0.4	40301.0	17.2	17.3	13.4	81.3	29.1

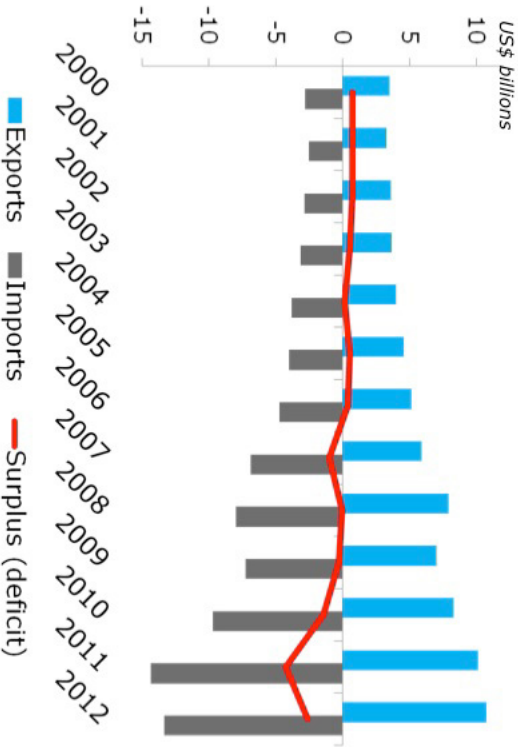
Sumber: World Bank, *World Development Indicators*.

Peraga 15: “Alokasi Subsidi pada APBN, 2009-2013”

Jenis subsidi	Nilai (Trill Rp)					Persen				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
BBM, LPG, BBN	45.04	82.35	165.16	211.90	193.80	32.62	42.73	55.92	61.18	61.09
Listrik	49.55	57.60	90.45	94.58	80.94	35.88	29.89	30.62	27.31	25.52
Pangan	12.99	15.15	16.54	19.12	17.20	9.41	7.86	5.60	5.52	5.42
Pupuk	18.33	18.41	16.34	13.96	16.23	13.27	9.55	5.53	4.03	5.12
Benih	1.60	2.18	0.10	0.06	1.45	1.16	1.13	0.03	0.02	0.46
PSO	1.34	1.37	1.83	1.93	1.52	0.97	0.71	0.62	0.56	0.48
Kredit program	1.07	0.82	1.52	1.11	1.25	0.77	0.42	0.51	0.32	0.39
Pajak	8.17	14.82	3.41	3.71	4.82	5.92	7.69	1.15	1.07	1.52
Bhn baku kedelai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minyak goreng	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obat generik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	138.08	192.71	295.36	346.36	317.22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Kementerian Keuangan

Peraga 16: “Transaksi Perdagangan Pangan sudah Defisit”



Sumber: Badan Pusat Statistik.

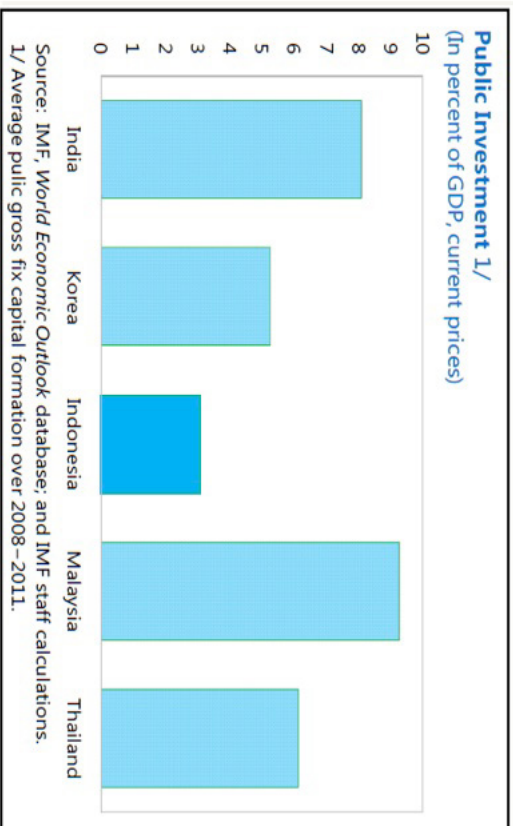
Peraga 17: "Global Food Security Index 2012"

Weighted total of all category scores
(0-100 where 100 = most favourable)

Country	Ranking	Score
United States	1	89.5
France	4	86.8
Netherlands	5	86.7
New Zealand	11	82.7
Australia	14	81.1
Japan	16	80.7
South Korea	21	77.8
Israel	22	77.7
Malaysia	33	63.9
China	38	62.5
Thailand	45	57.9
Viet Nam	55	50.4
Philippines	63	47.1
Indonesia	64	46.8
Myanmar	78	37.2
Congo	105	18.4

Sumber: Economist Intelligence Unit, *Global food Security index 2012*, London, 2012.

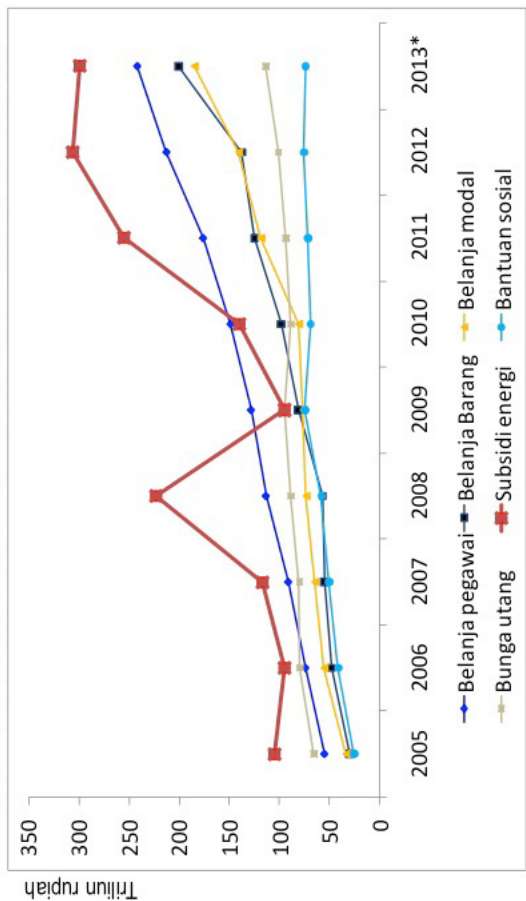
Peraga 18: “Peran Pemerintah makin Loyo”



Sumber: IMF, *Indonesia: selected Issues*, IMF Country Report No. 12/278, September 2012.

Peraga 19: “Belanja Pemerintah Pusat”

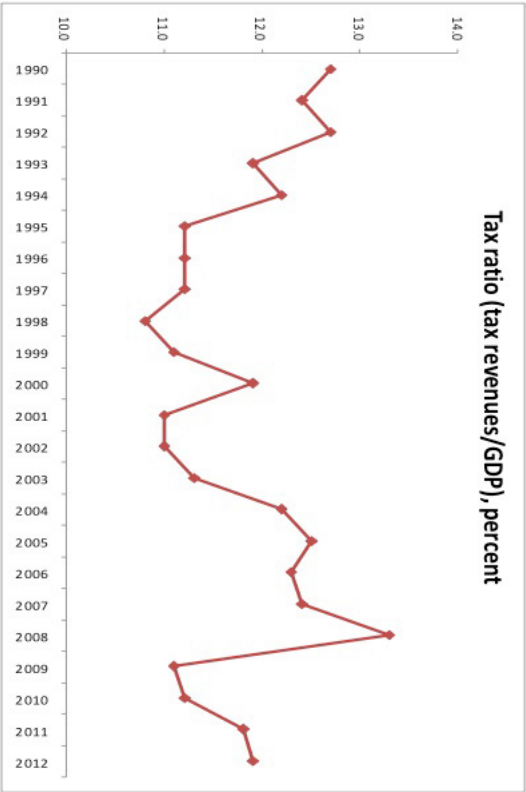
Penerimaan minyak Rp 178 triliun, subsidi BBM Rp 240 triliun



* APBN-P

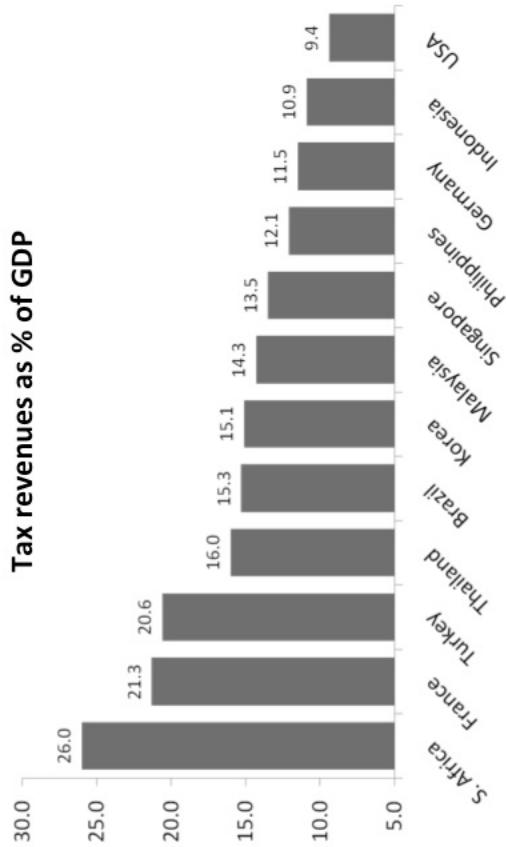
Sumber: Kementerian Keuangan

Peraga 20: “Nisbah Pajak Indonesia”



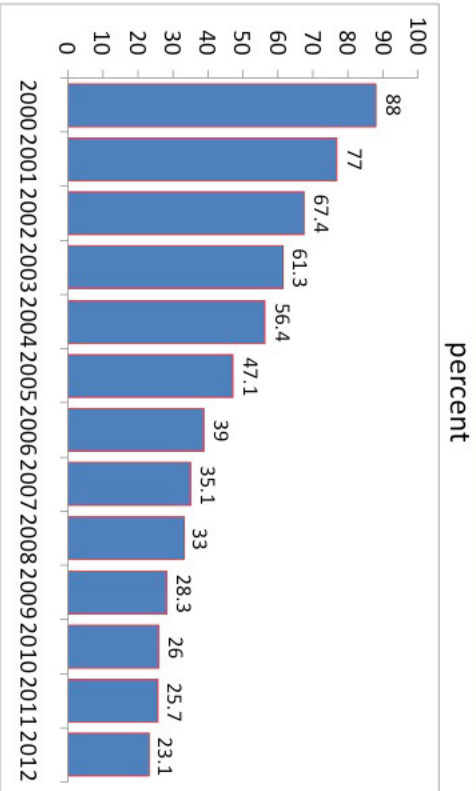
Sumber: Kementerian Keuangan

Peraga 21: "Tax Ratio in Selected Countries, 2010"



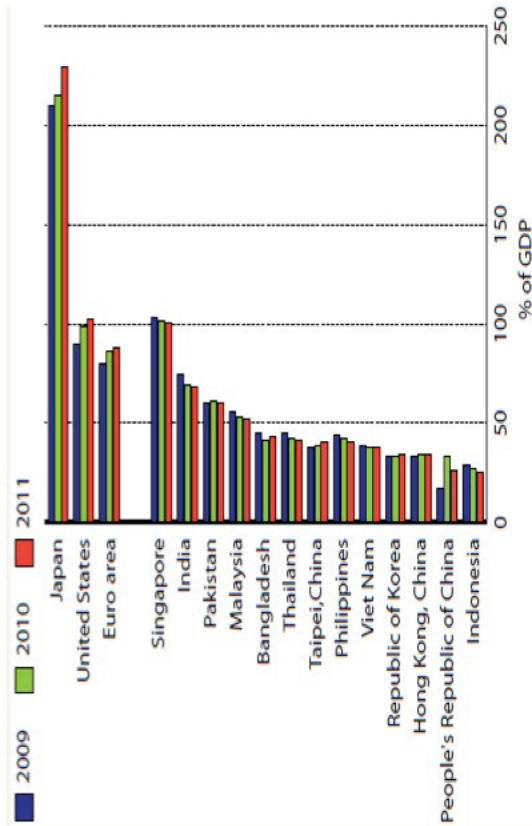
Sumber: World Bank

Peraga 22: "Government Debt to GDP Ratio"



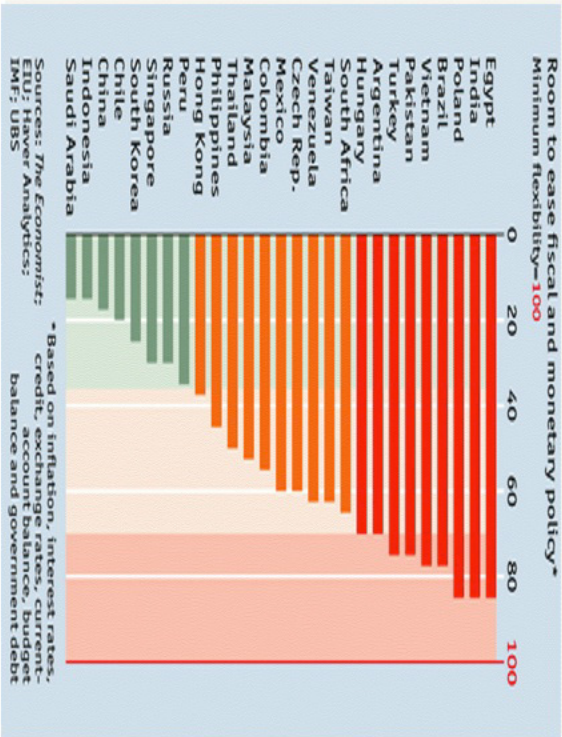
Sumber: Kementerian Keuangan

Peraga 23: "Central Government Gross Debt Ratio"



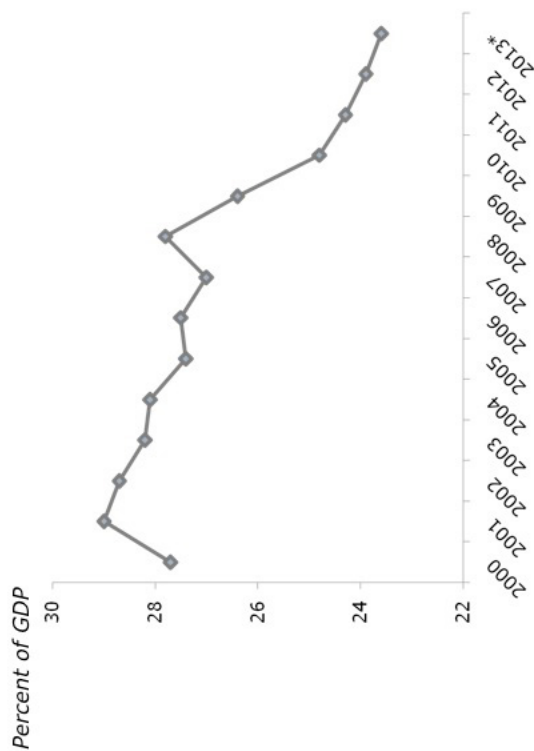
Sumber: ADB, Asian Development Outlook 2012 Update, Oktober 2012..

Peraga 24: “Wiggle-room Index”



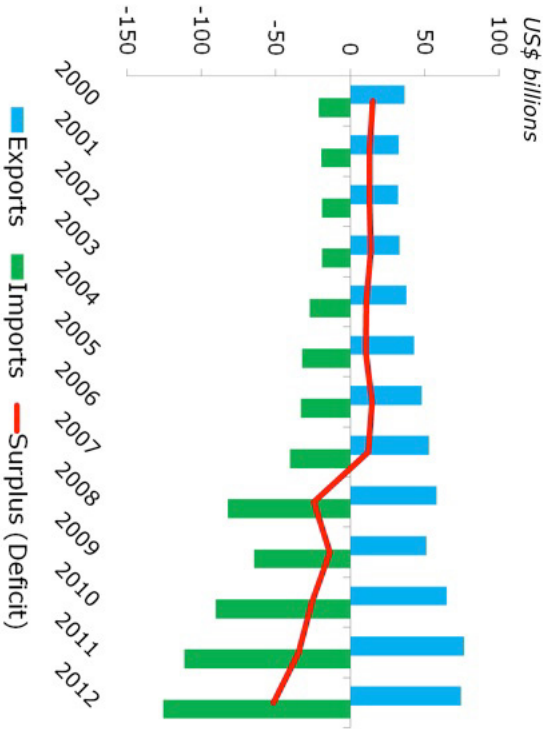
Source: The Economist, 27 January 2012, <http://www.economist.com/blogs/freexchange/2012/01/emerging-economies>.

Peraga 25: "Peranan Industri Manufaktur terus Melorot



* Triwulan pertama.
Sumber: BPS.

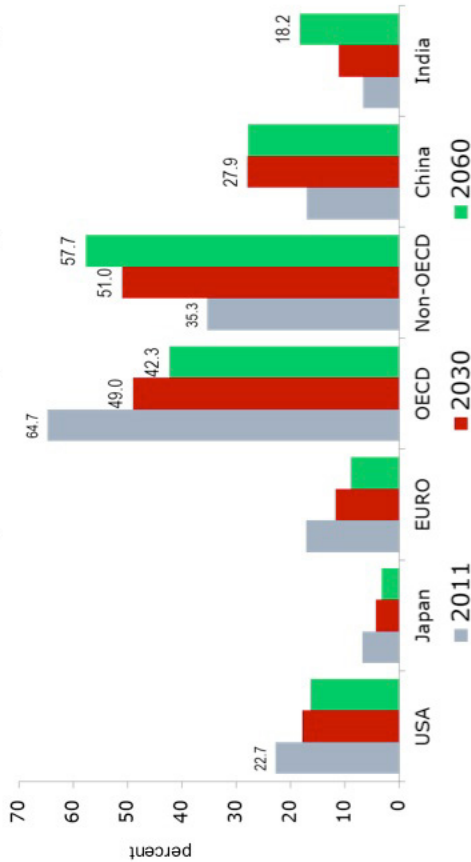
Peraga 26: “Produk Manufaktur pun telah Mengalami Defisit”



Sumber: Badan Pusat Statistik.

Peraga 27: “Pergeseran Kekuatan Ekonomi Dunia”

Share of world GDP, 2005 PPPs (Purchasing Power Parities)



Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Economic Policy Papers No.3, 09 November 2012.

Peraga 28: "PwC 2013: Top-20 Economies"

PPP rank	Country	2011	Country	2030	Country	2050
		GDP at PPP (2011 US\$bn)		GDP at PPP (2011 US\$bn)		GDP at PPP (2011 US\$bn)
1	US	15,094	China	30,634	China	53,856
2	China	11,347	US	23,376	US	37,986
3	India	4,531	India	13,716	India	34,704
4	Japan	4,381	Japan	5,842	Brazil	8,825
5	Germany	3,221	Russia	5,306	Japan	8,065
6	Russia	3,031	Brazil	4,665	Russia	8,013
7	Brazil	2,305	Germany	4,118	Mexico	7,409
8	France	2,303	Mexico	3,662	Indonesia	6,346
9	UK	2,287	UK	3,458	Germany	5,822
10	Italy	1,979	France	3,427	France	5,714
11	Mexico	1,701	Indonesia	2,912	UK	5,596
12	Spain	1,512	Turkey	2,760	Turkey	5,032
13	South Korea	1,504	Italy	2,639	Nigeria	3,964
14	Canada	1,398	Korea	2,454	Italy	3,867
15	Turkey	1,243	Spain	2,327	Spain	3,612
16	Indonesia	1,131	Canada	2,148	Canada	3,549
17	Australia	893	Saudi Arabia	1,582	South Korea	3,545
18	Poland	813	Australia	1,535	Saudi Arabia	3,090
19	Argentina	720	Poland	1,415	Vietnam	2,715
20	Saudi Arabia	686	Argentina	1,407	Argentina	2,620

Source: World Bank estimates for 2011, PwC estimates for 2030 and 2050

Source: PwC, *The world in 2050*, New York, 2013.

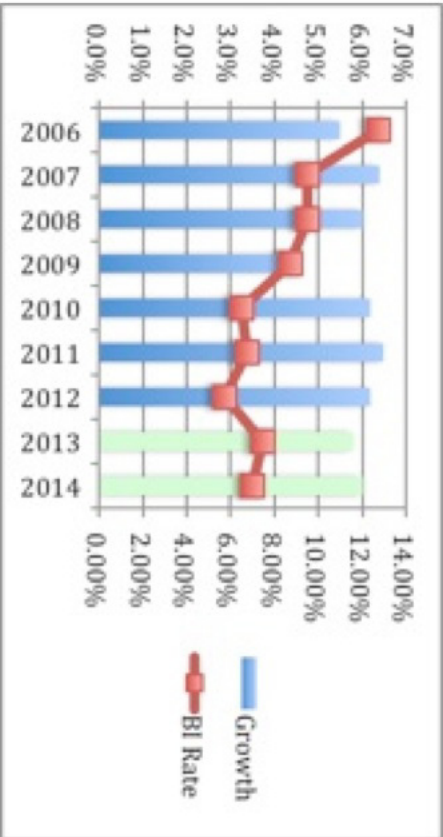
Peraga 29: "The Future of Archipelago Economy"

	Indonesia Today	Indonesia in 2030
Economy in the world	16th-largest	7th largest
Member of the consuming class	45 million	135 million
Population in the cities ...	53%	71%
... producing	74% GDP	86% GDP
Number of skilled workers	55 million	113 million
Market opportunity	\$0.5 trillion	\$1.8 trillion



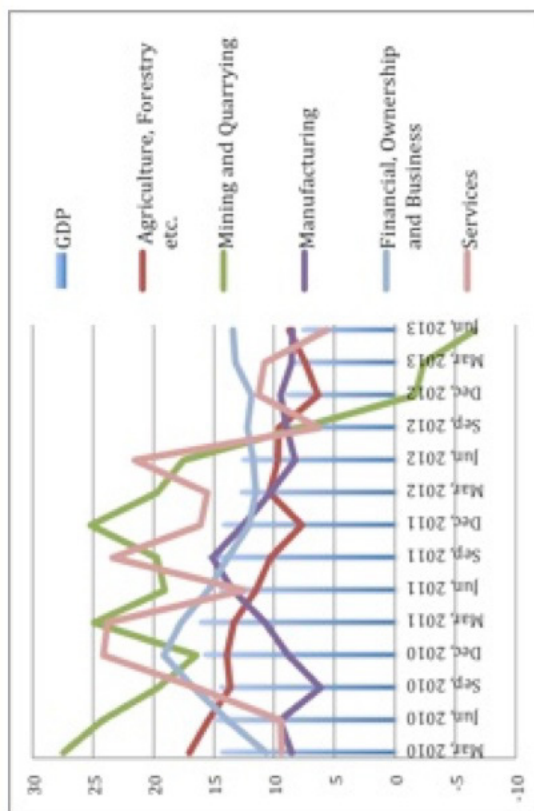
Sumber: McKinsey, *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*, 2012.

Peraga 30: “Grafik Tren Pertumbuhan dan BI Rate”



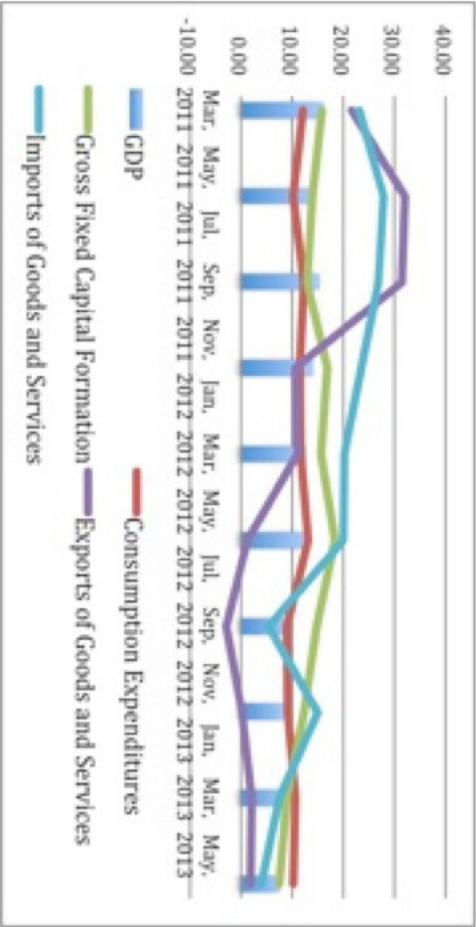
Sumber: BI, CEIC (Angka 2013 dan 2014 merupakan proyeksi)

Peraga 31: “Grafik PDB berdasarkan Sektor”



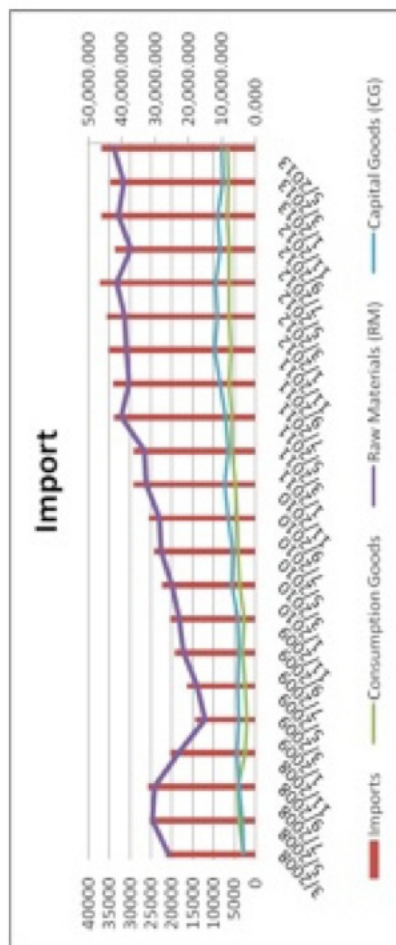
Sumber: Bank Indonesia, BPS

Peraga 32: “Grafik PDB berdasarkan Pengeluaran Pemerintah”



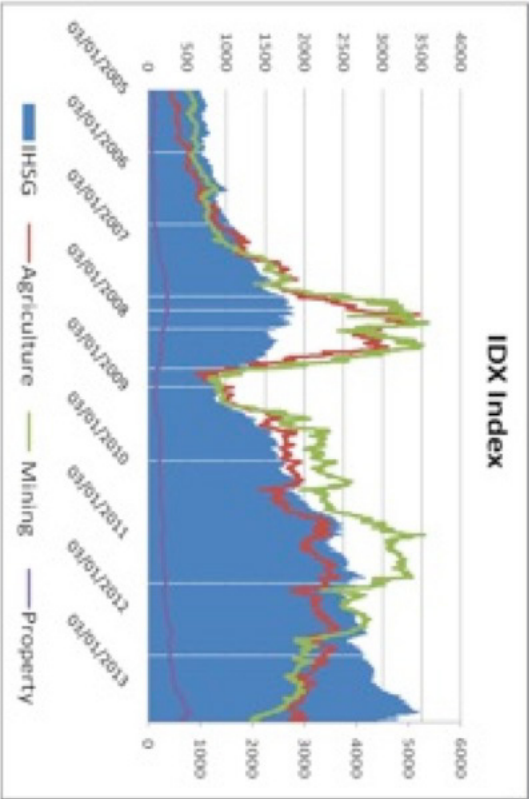
Sumber: Bank Indonesia, BPS

Peraga 33: “Grafik Komposisi Impor”



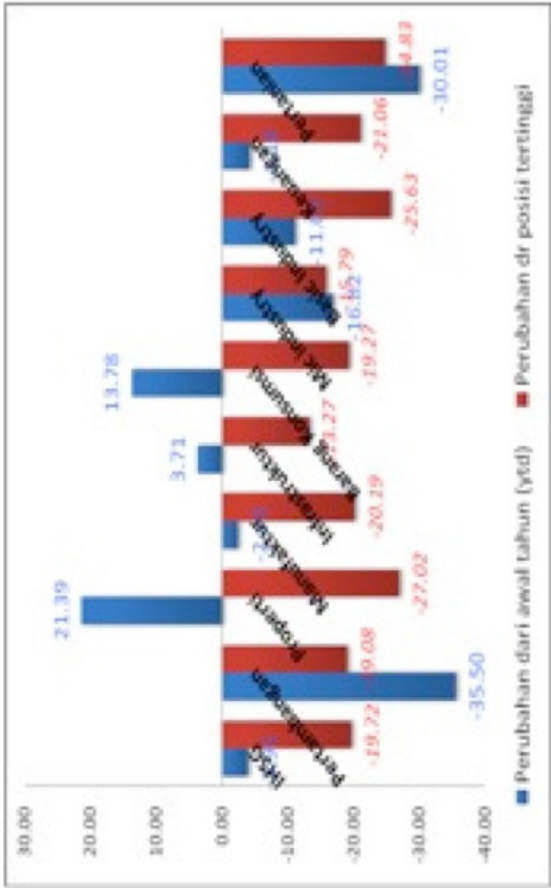
Sumber: Bank Indonesia, BPS

Peraga 34: “Tabel IHSG dan Indeks Agribisnis dan Pertambangan”



Sumber: CEIC

Peraga 35: “Tabel Perubahan Indeks”



Sumber: CEIC

Peraga 37: “Proyeksi Defisit Neraca Minyak Indonesia”

BahanaTCW Macroeconomic Dashboard: Projecting Oil Deficit							Sep-03	Jul-13
Last data	Jul-13	MoM	YoY	CumYTD	YoY			
Deficit Oil	2,812.3	34.7%	95.4%	16,152.00	30.6%			
Automobile	814,607	6.7%	19.5%	5,340,518	8.6%			
ICP	103.13	3.2%	0.2%					
Gasoline88	6500	0.0%	44.4%					

Model	Coef	t-stat	Elasticity	Forecasting				
Intercept	(712.5406)	-5.93		Avg12	Automobile in growth			
Automobile	0.0012	4.19	0.64	716,834	-5.00%	0%	10%	
ICP	16.1685	8.85	1.19	106.82	106.82	106.82	106.82	
Gasoline88	(0.0362)	-1.14	(0.14)	4,833.3	6500	9000	9000	
R2	79.4%		US\$mn	1,711	1,566	1,517	1,600	
StdError	309.16		Ann Rptn	205.31	187.97	182.07	192.01	
Alokasi APBN 2013		200		20.53	18.80	18.21	19.20	
Asumsi IDR	10000			6500				
AutoY/ICP	95	100	105	110	115	120	125	
-5%	165.03	174.74	184.44	194.14	203.84	213.54	223.24	
0%	170.01	179.71	189.41	199.11	208.81	218.51	228.21	
5%	174.98	184.68	194.38	204.08	213.78	223.49	233.19	
10%	179.95	189.65	199.35	209.06	218.76	228.46	238.16	
15%	184.92	194.63	204.33	214.03	223.73	233.43	243.13	
20%	189.90	199.60	209.30	219.00	228.70	238.40	248.10	
25%	194.87	204.57	214.27	223.97	233.67	243.38	253.08	

Sumber: BahanaTCW dan CEC

Sumber: Bahana TCW

Tentang Penulis

Agustinus Prasetyantoko menempuh pendidikan sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Program Master dari University of Science and Technology Lille, Perancis, dan Program Doktorat dalam Ilmu Ekonomi di bidang Moneter, Keuangan dan Ekonomi Internasional dari Ecole Normale Superieure (ENS)-Lyon bekerja sama dengan ESCP Europe Business School-Paris, Perancis. Studi master dan doktor dibiayai sepenuhnya oleh beasiswa Pemerintah Perancis (*Boursiers du Gouvernement Francais*). Saat ini menjadi pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta dan Program Magister Manajemen, FEB-UGM, Kelas Jakarta. Dia menulis buku dengan tema utama krisis ekonomi, di antaranya *Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang Publik* (Penerbit Buku Kompas/PBK, 2008) dan menjadi salah satu buku *best seller*; *Ponzi Ekonomi: Indonesia di tengah Instabilitas Global* (Penerbit Buku Kompas/PBK, 2010). Sejak 2012 menjadi penulis tetap untuk kolom Analisis Ekonomi Harian *Kompas*.

Budi Hikmat adalah Chief Economist dan Director for Investor Relation pada PT Bahana TCW Investment Management. Bergabung dengan PT Bahana Securities pada tahun 1997, Budi termasuk “Indonesian Best Domestic Macroeconomist” menurut *Asiamoney Magazine* tahun 2003. Setelah menamatkan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia, Budi mendapat beasiswa Ford Foundation untuk meraih gelar Master di bidang ekonomi dari National University of Singapore. Dia pernah bekerjasama sebagai peneliti dengan ekonom senior Darmin Nasution, Sri Mulyani Indrawati dan Faisal H. Basri di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Kini, selain kolumnis tetap Bahana Investor Corner untuk Majalah *Investor*, Budi juga menjadi Staf Pengajar Prasetiya Mulya Business School.

Dinna Wisnu adalah ilmuwan politik dengan spesialisasi politik ekonomi internasional, diplomasi dan kebijakan bidang kesejahteraan sosial. Dinna termasuk peneliti dan ilmuwan muda yang produktif. Dia rutin melakukan penelitian dan sampai saat ini telah menghasilkan puluhan artikel koran/majalah berbahasa Indonesia maupun Inggris, puluhan artikel untuk jurnal ilmiah dan sejumlah buku atau bagian dari buku, antara lain buku *Politik Sistem Jaminan Sosial* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) dan artikel bertajuk “Risks and Social Protection in Indonesia, the Philippines and Singapore,” yang memenangkan penghargaan sebagai salah satu makalah terbaik mahasiswa pascasarjana yang diterbitkan Princeton University (2006). Dinna juga pernah terlibat dalam sejumlah kegiatan konsultasi untuk sejumlah lembaa-

ga pemerintah seperti Bappenas, TNP2K, dan Kementerian Luar Negeri dan lembaga internasional/asing seperti ILO, UNESCAP, USAID dan Friedrich Ebert Stiftung. Dinna meraih beasiswa penuh S2 dan S3 sekaligus kesempatan mengajar di Departemen Ilmu Politik di The Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat (2001-2007), dan memenangkan sejumlah dana penelitian dan perjalanan dari berbagai lembaga di Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia untuk mempresentasikan hasil-hasil penelitiannya. Gelar S1 diperolehnya di bidang ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Sejak Desember 2008, Dinna bergabung dengan Universitas Paramadina dan memperoleh kepercayaan untuk mengembangkan unit bisnis di Universitas tersebut yakni sebagai Direktur Program Pascasarjana sekaligus mengetuai dan memimpin pendirian dan pengembangan Program Pascasarjana Bidang Diplomasi di Universitas Paramadina, yang adalah program perdana bidang diplomasi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Faisal Basri adalah ekonom dan aktivis sosial. Pria berdarah Batak ini, salah seorang keponakan mendiang Wakil Presiden RI Adam Malik, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) (1985) dan Master of Arts (M.A.) dalam bidang ekonomi dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat (1988). Sejak 1981 hingga sekarang, dia menjadi staf pengajar pada almamaternya, FEUI, di mana dia juga sempat mengetuai Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Sejak tahun 2000, dia menjadi anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

(KPPU). Kini dia juga kolumnis tetap harian *Kompas*. Faisal juga sempat terjun ke dunia politik praktis. Di saat-saat genting menjelang reformasi, dia ikut menjadi salah satu pendiri Mara (Majelis Amanah Rakyat), yang merupakan cikal-bakal Partai Amanat Nasional. Pada Oktober 2011, dia menggandeng Biem Benyamin, putra tokoh legendaris Betawi Benyamin Sueb, untuk maju mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, tapi gagal terpilih.

Handi Risza adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Paramadina, dan sejak 2009 banyak mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan Islam. Handi salah satu pegiat ekonomi dan keuangan Islam yang mendapat gelar doktor (Dr.) dalam bidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN, Jakarta) serta gelar Master (M. Ec.) dalam bidang yang sama dari Internasional Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur. Dia juga banyak melakukan penelitian dan menulis dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam. Saat ini Handi aktif di Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (DPP-MES) dan salah satu Ketua Departemen di Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPP-IAEI).

Ihsan Ali-Fauzi adalah Direktur Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, dan staf pengajar pada Paramadina Graduate School, Jakarta. Selain di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dia juga pernah belajar sejarah dan ilmu politik pada Ohio University, Athens, dan The Ohio State Univer-

sity (OSU), Colombus, keduanya di Amerika Serikat. Dia menulis di berbagai media massa nasional seperti *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, dan *Republika*. Beberapa tulisannya sudah diterbitkan jurnal *Studia Islamika* dan *Asian Survey*. Bersama peneliti lain, dia sudah memublikasikan sejumlah hasil penelitian, misalnya: *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia 1990-2008* (2009), *Melaporkan Kebebasan Beragama 2008* (2010), dan *Kontroversi Gereja di Jakarta* (2011). Dia antara lain menulis buku *Gerakan Kebebasan Sipil* (2009), bersama Saiful Mujani, dan *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (2011), bersama Rizal Panggabean.

Indrasari Tjandraningsih adalah peneliti senior AKATIGA dengan latar belakang studi pembangunan. Selain aktif melakukan riset seputar isu perburuan dan pemberdayaan pekerja anak (dan perempuan), dia juga aktif dalam jaringan perburuan nasional maupun internasional. Karya-karya ilmiahnya yang berkaitan dengan isu perburuan telah banyak diterbitkan, di antaranya, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi mengenai Pendampingan Pekerja Anak* (1995) dan *Diskriminatif dan Eksploitatif: Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing di Sektor Metal di Indonesia* (2010). Saat ini dia mengajar mata kuliah Hubungan Industrial di Magister Manajemen dan Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung.

Thee Kian Wie adalah salah satu peneliti, akademisi dan intelektual publik paling senior di Indonesia. Dia belajar ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memperoleh gelar doktor dalam bidang ekonomi dari University of Wisconsin, Amerika

Serikat (AS). Dia bekerja sebagai Staf Ahli pada Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Jakarta, dan Anggota Komisi Ilmu-Ilmu Sosial pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI). Dr. Thee sudah menulis dan menyunting sekitar 17 buku dan sekitar 70 artikel di buku-buku suntingan atau jurnal ilmiah, mengenai berbagai segi ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara, sebagiannya dalam bahasa Inggris. Salah satu karyanya yang terpenting adalah *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia* (2002), yang ditulisnya bersama tiga akademisi dunia lainnya. Meski sudah pensiun, dia masih rajin menulis di media nasional seperti *Kompas* dan *Tempo* atau jurnal internasional seperti *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Sepanjang karirnya, Dr. Thee juga sudah menerima berbagai penghargaan, antara lain Bintang Jasa Utama (2002), yang paling prestisius di Indonesia untuk menghargai jasa-jasanya sebagai pelayan publik.



"Demokrasi dan Kekecewaan"

oleh Goenawan Mohamad,
Ihsan Ali-Fauzi (editor),
Rizal Panggabean (editor)

PUSAD Paramadina, 2009
Soft cover, 100 halaman
ISBN: 978-979-19725-0-5

Seperti mewakili perasaan banyak orang tentang kualitas demokrasi kita, dalam buku ini Goenawan Mohamad mengungkap sejumlah pengaruh buruk yang muncul dari keharusan para pemimpin politik untuk tunduk kepada hukum "kurva lonceng" demokrasi: agar mereka tampak dibutuhkan banyak orang, menang pemilu, berkuasa...

Tapi, Goenawan tak serta-merta menampik demokrasi, karena alternatifnya adalah anarkisme atau terorisme Al Qaeda. Ia hanya menegaskan perlunya kita memperkuat susu "perjuangan" di dalam demokrasi.

Berbagai detail mengenai hubungan antara sisi "perjuangan" dan sisi "kurva lonceng" dalam demokrasi inilah yang dibahas para komentatornya: William Liddle, Rocky Gerung, Rizal Panggabean, Dodi Ambardi, Robertus Robet, dan Ihsan Ali-Fauzi. Dilengkapi komentar balik Goenawan, buku ini memuat perdebatan yang mutakhir, substantif, dan kredibel tentang mengapa kita bisa kecewa kepada demokrasi dan mengapa pula kita bisa, dan harus tetap, berharap kepadanya.

Bermula dari Nurcholish Madjid Memorial Lecture II (2008), buku ini perlu dibaca oleh setiap kita yang hendak menjadi warganegara yang melek politik dan tak sudi dibohongi para politisi gadungan. Di pundak merekalah terletak peningkatan kualitas demokrasi di Tanah Air tercinta.



"Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita"

oleh Ahmad Syafii Maarif,
Ihsan Ali-Fauzi (editor),
Rizal Panggabean (editor)

PUSAD Paramadina, 2010

Soft cover, 134 halaman

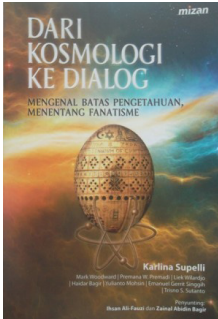
ISBN: 978-979-772-025-4

Dalam buku ini Buya Ahmad Syafii Maarif secara terbuka menelanjangi ancaman kekerasan oleh kelompok Islam tertentu di Indonesia, yang disebutnya sebagai kelompok "Preman Berjubah." Katanya, "yang menjadi *burning issues* dalam kaitannya dengan masalah politik identitas sejak 11 tahun terakhir ialah munculnya gerakan-gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam..."

Sebagaimana *partner* mereka di bagian dunia lain, gerakan-gerakan ini juga anti-demokrasi dan anti-pluralisme, dan sampai batas-batas yang jauh juga anti-nasionalisme." Dan meskipun terdiri dari berbagai faksi, dalam satu hal mereka punya tuntutan sama: pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan bernegara.

Bermula dari orasi ilmiah yang disampaikan pada Nurcholish Madjid Memorial Lecture III (2009), dalam buku ini Buya juga menunjukkan mengapa kita tidak perlu terlalu khawatir dengan ancaman di atas. Itu karena pluralisme, yang memomorsatukan keragaman, sudah merupakan bagian esensial bagi keindonesiaan.

Selain renungan Buya, buku ini juga memuat tanggapan tujuh orang lain, dari berbagai latar belakang, atas pidato Buya. Seluruhnya ingin memperkuat sendi-sendiri pluralisme kita dari ancaman politik identitas.



*"Dari Kosmologi ke Dialog:
Mengenal Batas Pengetahuan,
Menentang Fanatisme"*

oleh Karlina Supelli,
Ihsan Ali-Fauzi (editor),
Zainal Abidin Bagir (editor)

Paramadina & Mizan, 2011,
Soft cover, 280 halaman
ISBN: 978-602-97633-5-5

Laplace bersabda, "daya-daya alam sendirilah yang melakukan koreksi ketika terjadi penyimpangan. Karena keseimbangan dinamis tatasurya ialah konsekuensi hukum-hukum fisika." Lantas di mana posisi agama & kitab suci harus kita letakkan dalam soal pelik ini? Masih belum cukup. Melalui *M-Theory* & *Theory of Everything* (teori segalanya), "tembok" energi yang menyembunyikan singularitas semesta dapat ditembus sehingga mimpi Einstein – untuk membaca pikiran Tuhan kala menciptakan alam semesta – mungkin dapat menjadi kenyataan, lalu ilmu pengetahuan berhenti berkembang & manusia menjadi sama dengan Tuhan.

Itu semua jelas bicara ketegangan antara jelajah nalar & cerapan keimanan. Antara memercayai perubahan dunia dengan fakultas rasio & fakultas intuisi. Sementara di saat bersamaan, kebenaran yang dengan tergopoh kita kejar – tetap menjadi hantu yang berkelibat tapi tak pernah dapat dijerat. Dalam karya unggulan yang dianggit dari Nurcholis Madjid Memorial Lecture IV (2010) inilah, ketegangan itu coba dilerai dengan sebuah dialog berarus tenang, namun mengendang. Semata demi memafhumi dimana batas untuk berpijak hingga takkan lagi ada fanatisme yang jumud dan akut.



MEMPERBAIKI MUTU
DEMOKRASI DI INDONESIA
Sebuah Perdebatan

R. William Liddle

Faisal Basri - AA. GN. Ari Dwipayana - Usman Hamid & A.E. Priyono
Airlangga Pribadi - Goenawan Mohamad - Sri Budi Eko Wardhani
Burhanuddin Muhtadi

Disunting oleh
Faisal Basri dan Sri Budi Eko Wardhani



*"Memperbaiki Mutu Demokrasi
di Indonesia: Sebuah Perdebatan"*

oleh R. William Liddle,
Ihsan Ali-Fauzi (editor),
Rizal Panggabean (editor)

PUSAD Paramadina, 2012,
Soft cover, 184 halaman
ISBN: 978-979-772-037-7

Bermula dari Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) yang disampaikan R. William Liddle, buku ini mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan mutu demokrasi di Indonesia dan arah yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya. Bagi Liddle, *counsel of despair* (nasihat berputus-asa) bukanlah pilihan. Diinspirasi Niccolo Machiavelli, Liddle menyebut sejumlah kemungkinan agar warganegara (*full citizens*) di Indonesia bisa menjadi aktor-aktor yang mengubah pilihan-pilihan politik mereka di masa depan.

Pandangan Liddle di atas dikomentari Faisal Basri, AA. GN. Ari Dwipayana, Usman Hamid & A. E. Priyono, Airlangga Pribadi, Goenawan Mohamad, Sri Budi Eko Wardhani, dan Burhanuddin Muhtadi. Semuanya melihat pandangan Liddle sebagai sesuatu yang berharga, provokatif, memancing pikiran dan mendorong kita bergerak ke arah perbaikan lebih jauh.

Perdebatan ini penting dibaca oleh para pengambil kebijakan, akademi, aktivis sosial dan politik. Ini juga penting diikuti oleh para mahasiswa yang peduli akan masa depan mereka dan negeri tercinta ini.



Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML)

Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) adalah kegiatan tahunan Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina. Selain untuk mengenang sosok dan pemikiran almarhum Nurcholish Madjid, pendiri Yayasan Paramadina, NMML juga dimaksudkan untuk melanjutkan sumbangan pemikirannya bagi bangsa Indonesia dewasa ini dan di masa depan.

NMML tahun ini adalah yang keenam. Sebelumnya, NMML pernah disampaikan oleh Komaruddin Hidayat (2007), Goenawan Mohamad (2008), Ahmad Syafii Maarif (2009), Karlina Supelli (2010), dan R. William Liddle (2011).

Pidato NMML akan dibukukan, sesudah diberi komentar oleh para intelektual, politisi, aktivis LSM dan lainnya. Sejauh ini sudah terbit empat buku dari NMML: *Demokrasi dan Kekecewaan* (2009); *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (2010); *Dari Kosmologi ke Dialog: Mengenal Batas Pengetahuan, Menentang Fanatisme* (2011); dan *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan* (2012). Buku *Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan* adalah buku kelima dalam seri ini.



Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina adalah satu lembaga di bawah Yayasan Paramadina yang melakukan riset dan advokasi dalam bidang sosial, politik dan keagamaan. PUSAD dibentuk pada 2006, dengan misi “mendorong peningkatan mutu demokrasi Indonesia ke arah yang lebih berkeadilan, damai dan menghargai keragaman.”

Selain memanfaatkan teori dan pendekatan mutakhir dalam ilmu-ilmu sosial untuk melihat masalah-masalah tertentu di Indonesia, riset PUSAD Paramadina juga memerhatikan berbagai variasi dalam kasus-kasus yang dipelajari. Dengannya, pelajaran bisa diambil dari kasus-kasus di mana peningkatan kualitas demokrasi ditemukan.

PUSAD dijalankan berdasarkan prinsip bahwa riset dan advokasi saling terkait. Advokasi yang kuat hanya bisa dilakukan berdasarkan hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara metode dan data. Sebaliknya, hasil riset akan lebih bermanfaat jika disebarluaskan lewat jalur dan model advokasi yang memadai. Itu sebabnya, selain disampaikan kepada para pengambil kebijakan dan mitra-mitra LSM, hasil-hasil riset PUSAD juga disiarkan melalui media sosial dan bisa diakses publik dengan mudah.

PUSAD Paramadina
Bona Indah Plaza Blok A2 No D12
Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak
Jakarta Selatan 12440

<http://paramadina-pusad.or.id/>